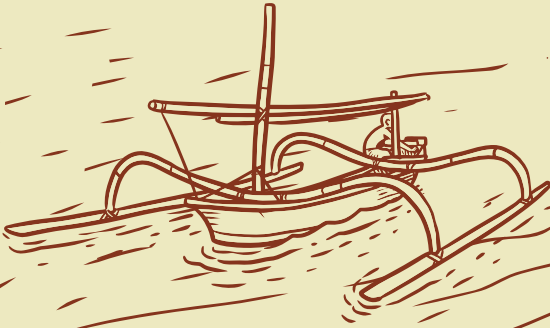


Rumusan Hasil
Kongres Kebudayaan Desa
1 Juni-15 Agustus 2020



DATAKRASI

Meningkatkan Kualitas Hidup
Berbasis Data

DATAKRASI

Meningkatkan Kualitas Hidup Berbasis Data

Webinar Seri 15

Kongres Kebudayaan Desa 2020

1-10 Juli 2020



DATAKRASI

Meningkatkan Kualitas Hidup Berbasis Data

© Sanggar Inovasi Desa 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Diterbitkan oleh Sanggar Inovasi Desa 2020

Kampoeng Mataraman, Jl. Ringroad Selatan, Glugo No. 93, Panggunharjo,
Yogyakarta.

Web: www.sanggarinovasidesa.id

Penanggung jawab	: Faiz Ahsoul
Penyunting	: Dadang Ari Murtono
Penyelia aksara	: Dyah Permatasari
Tata letak isi	: Rio Ap
Desain dan ilustrasi sampul	: Ketjilbergerak, Arif Gunawan, Agus Teriyana

Cetakan pertama, Agustus 2020

Kongres Kebudayaan Desa

xxxiv, 116 hal., 13x19 cm.

ISBN :

Dilarang memperbanyak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial. Setiap tindak pembajakan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pengutipan untuk kepentingan akademis, jurnalistik, dan advokasi diperkenankan dalam batas ketentuan yang berlaku.



Pengantar Editor

Dadang Ari Murtono

Salah satu yang menyebabkan tahun 2020 akan dikenang sepanjang masa adalah pandemi Covid-19. Pandemi ini mengubah begitu banyak tatanan, baik yang sudah berjalan maupun yang masih direncanakan. Covid-19 datang pada sebuah era ketika dunia tengah beralih memasuki era revolusi 4.0. Ini adalah sebuah era ketika algoritma dan data raya (*big data*) dapat dikatakan tahu tentang diri kita melebihi yang kita ketahui tentang diri kita sendiri. Dengan itu, tumbang pula individualisme yang inheren dalam

tesis *pengetahuan-diri*. Martin Suryajaya dalam tulisan bertajuk “Membayangkan Politik Dunia Setelah Corona: dari Demokrasi ke Datakrasi” di laman pribadinya mengatakan bahwa ada tiga hal yang bisa dibayangkannya tentang nasib politik demokrasi tingkat dunia pada masa Corona. Pertama, surutnya politik berbasis hak. Kedua, semakin usangnya wacana tentang legitimasi dan representasi. Ketiga, transformasi demokrasi menjadi datakrasi. Datakrasi sendiri—masih menurut Martin Suryajaya—bisa diartikan sebagai sebuah tata pemerintahan yang dikelola secara impersonal, tanpa individu ataupun kelompok pemimpin, sepenuhnya berdasarkan kecerdasan buatan (AI) dengan berbasiskan data raya yang terhimpun dari seluruh aktivitas warga negara. Dengan ini, pemerintahan sepenuhnya dijalankan dengan formulasi AI yang ditentukan berdasarkan nilai-nilai demokratis. Interpretasi manusia tidak dibutuhkan dan diharapkan menjauh dari simpulan kebenaran yang dirumuskan oleh AI.

Untuk membicarakan hal tersebut maka Webinar Seri 15 Kongres Kebudayaan Desa tahun 2020 mengangkat tema “Datakrasi: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa Berbasis Data Menuju Tatanan Indonesia Baru”. Webinar ini diselenggarakan melalui aplikasi Zoom pada tanggal 9 Juli 2020 dengan *total users* mencapai 910. Webinar ini juga ditayangkan melalui YouTube dan hingga tulisan ini dibuat tanggal 24 Juli 2020 sudah disaksikan sebanyak 1.157 kali. Webinar kali ini menghadirkan enam narasumber, antara lain Dr. Ivanovich Agusta (Pusdatin Kemendes), Onno W. Purbo (pakar telematika), Budiman Sudjatmiko (Inovator 4.0 Indonesia), Sukamdi (Kependudukan



UGM), Mochamad Hadiyana (Deputi Informasi dan Data KPK), Margiyono Darsasumarja (pemerhati *cyber law*, mantan Komisaris Independen Telkom), serta dimoderatori oleh G. Ragil Wibawanto, M.A. (Sosiologi UGM).

Sebegitu penting dan berkuasanya data itu? Dalam buku yang disusun berdasarkan hasil Webinar Seri 15 Kongres Kebudayaan Desa ini, Margiyono Darsasumarja, seorang pemerhati *cyber law* sekaligus Komisaris Independen Telkom tahun 2015-2020, menyebut bahwa kekuasaan dan data merupakan satu jalinan yang tidak terpisah saat membicarakan dunia digital, data menjadi komoditas penting yang membuat seseorang atau sebuah kelompok menguasai orang lain dalam skala besar. Di era digital seperti saat ini, data bahkan telah dianggap oleh kalangan tertentu sebagai *the next currency* atau mata uang baru selanjutnya. Oleh karena itu, kemudian muncul istilah *datanomics*, sebuah istilah yang mengandung pengertian bahwa data merupakan sumber daya ekonomi yang penting.

Contoh lain menyangkut betapa penting dan berpengaruhnya data dapat kita lihat dari peristiwa yang disebut sebagai Cambridge Analytica. Pada tahun 2016, data pengguna Facebook bocor dan digunakan oleh tim kampanye Donald Trump untuk memenangkan pemilihan presiden Amerika Serikat. Berkaca dari peristiwa tersebut, seturut Margiyono, kita membutuhkan keadilan data. Keadilan data akan menjamin data-data dari empu data aman dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu tanpa seizin si empu data tersebut. Hal itu menjadi penting karena bagaimanapun juga, era *big data* atau data raya ini memang tak



bisa dihindari. Dengan kalimat yang puitis, Margiyono menyatakan bahwa *big data* adalah hujan, tetapi kita tak perlu payung untuk menghentikannya. Yang kita perlukan agar tidak basah kuyup dan masuk angin adalah payung. Payung tersebut adalah *data governance* atau regulasi yang mengatur data-data yang tersebar.

Isu pemanfaatan *big data* dan media sosial untuk perumusan kebijakan publik bukan hal yang baru dibahas. Salah satu artikel yang ditulis oleh Douglas Yeung (2018) mengenai manfaat analisis (*big data*) media sosial terhadap arah kebijakan kesehatan merupakan contoh yang cukup jelas. Bagi Yeung, data media sosial memberikan informasi yang *real-time* sehingga pembuat kebijakan mengetahui apa yang benar-benar dianggap penting oleh publik. Pengetahuan ihwal perilaku publik yang diproses melalui teknologi *machine learning* sangat berguna untuk mengukur perilaku dan tingkat kesehatan masyarakat, serta intervensi kebijakan seperti apa yang seharusnya dilakukan. Ketika pandemi Covid-19 tiba, kebutuhan akan data yang akurat benar-benar urgen. Dalam hal data kependudukan, seperti yang disampaikan oleh Sukamdi dari Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, misalnya. Ia menyebut bahwa ada kecenderungan selama masa pandemik Covid-19 ini pemanfaatan *big data* semakin meluas dan intensif.

Salah satu contoh pemanfaatan *big data* untuk analisis perubahan pola mobilitas penduduk semasa pandemi Covid-19 dilakukan oleh Google. Analisis perubahan pola mobilitas semacam ini menjadi tidak bisa ditawar lagi karena watak virus Corona yang begitu mudah menyebar, baik melalui *droplet* atau kontak fisik.

Analisis perubahan mobilitas penduduk juga memudahkan kita melakukan *tracing* penyebaran virus Corona.

Mengapa analisis sebagaimana dilakukan oleh Google tidak pernah muncul dari dalam negeri? Alasan yang paling jelas adalah karena kontrol terhadap data tidak berada di tangan kita. Atau alasan lain yang paling elementer adalah tidak ada yang paham tentang keberadaan data tersebut dan sekaligus bagaimana mengolah dan menganalisis. Setidaknya, begitulah kesimpulan yang dinyatakan Sukamdi.

Big data juga merupakan sebuah terobosan mutakhir untuk menuju pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Datakrasi bisa menjadi alat ampuh untuk meminimalkan terjadinya korupsi. Prinsip bahwa data bisa diakses publik dan kemampuan memberikan informasi secara *real-time* dapat meminimalkan penyalahgunaan wewenang dan potensi korupsi. Sedari awal, korupsi bisa dicegah sedini mungkin. Datakrasi bisa menjadi pemodelan pencegahan korupsi dengan kekuatan data yang *rigid* dan terkontrol oleh publik. Mochamad Hadiyana, Deputi Bidang Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan contoh bagaimana *big data analytics* dapat digunakan untuk menyisir informasi dan menemukan detail rumit yang lepas dari pengamatan manusia. Sebagai contoh, Panama Papers dapat ditulis karena jurnalis menggunakan *big data* untuk menganalisis lebih dari 11.000 dokumen. Selain itu, *big data analytics* dapat menilai beberapa sumber informasi yang berbeda untuk menemukan tren yang mudah terlewatkan oleh kita. Contoh lain, Komisi Eropa dan Transparansi Internasional menggunakan perangkat lunak *big data analytics* milik mereka



untuk membandingkan data dari lembaga swasta dan lembaga publik guna menemukan penyimpangan, konflik kepentingan, dan tanda-tanda perilaku korup lainnya. Kemampuan menganalisis dan membandingkan berbagai sumber informasi adalah salah satu keuntungan terbesar dari *big data analytics*.

Dalam aspek kebudayaan, data juga merupakan salah satu aspek penting, sebagaimana disampaikan oleh Ivanovich Agusta, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Data menunjukkan wajah desa. Sebelum adanya data, atau ketika data tidak ada, desa bagai tidak berwajah, atau setidaknya, wajah desa tersembunyi. Data desa yang timbul tenggelam tiap tahunnya membuat desa seperti berada dalam kegelapan. Ketika pandemi Covid-19 terjadi, pengambilan data untuk pemberian bantuan lebih mudah karena diambil langsung dari desa. Bantuan sosial yang dikucurkan oleh pemerintah, jika sesuai data yang di-*input*, maka dana tersebut mencakup hampir 85 persen dari jumlah keluarga di Indonesia. Maka tidak perlu ada kekhawatiran bahwa angka kemiskinan naik sekitar 4-5% karena bantuan sosial sudah siap sampai 70% untuk warga. Sistem pendataan BLT dana desa telah sesuai kesepakatan dengan indikator berbasis RT yang dilakukan oleh Relawan Desa Tanggap Covid-19.

Budiman Sujatmiko juga menyampaikan gagasannya tentang desa dan kaitannya dengan data. Ia menyatakan bahwa hari ini kita memerlukan sebuah konsep di mana masyarakat bukan hanya berdana, melainkan juga berdata dan berdaya. Kita memerlukan sebuah kerangka di mana masyarakat dapat memiliki akses untuk menuju kondisi ekonomi dan sosial yang lebih baik. Menurutnya,

ada delapan aset dalam *universal basic asset* yang bisa dimanfaatkan untuk sampai pada kondisi masyarakat berdaya, salah satunya adalah data.

Berbicara perihal *big data*, tak bisa lepas dari masalah internet. Kendala hari ini adalah bahwa ada banyak sekali desa di Indonesia yang masih belum bisa mengakses internet. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, antara lain mahalnya tarif internet dan ketersediaan jaringan. Untuk meniyasati hal tersebut, khususnya masalah mahalnya tarif, Budiman Sujatmiko menawarkan gagasan untuk lebih mengoptimalkan peran BUMDes. Sementara Onno W. Purbo, dengan segudang pengalamannya, menyampaikan hal-hal teknis dan solusi yang bagus sekali agar masyarakat yang tinggal di desa bisa mengakses internet dengan mudah dan murah.

Itu semua tentu saja bukan hal mudah, meski bukan berarti mustahil dilakukan. Dan ketika internet sudah menjangkau pelosok desa, misalnya, bukan lantas berarti semua persoalan tersebut selesai. Mukhijab dalam tulisan yang merupakan hasil dari *call for paper* untuk tema “Datakrasi” menunjukkan kepada kita kendala-kendala yang terjadi di sistem informasi kelurahan. Dengan sedikit keras, ia menyarankan untuk mendobrak *status quo* sistem informasi tersebut. Dan untuk itu, tidak bisa tidak, dibutuhkan *political will* dari pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) tentang urgensi digitalisasi pelayanan di kelurahan serta revolusi pelayanan yang memerlukan revolusi budaya birokrasi *rigid* (rumit) dan bertele-tele serta revolusi mental aparat sebagai raja yang harus disembah, dihormati, dan ditakuti oleh warga yang memerlukan pelayanan kelurahan. Begitulah.





Sekapur Sirih

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

*A*ssalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

Ada ungkapan Jawa tentang desa yang menyatakan: “Desa Mawa Cara, Negara Mawa Tata”. Dalam UU Otonomi Desa No. 6/2014, ada kewenangan desa secara luas untuk mengatur cara dan mengurus rumah tangga sendiri, tetapi tidak berarti keluar dari tata ketatanegaraan NKRI. Sebelumnya, khusus untuk desa-desa

di Yogyakarta, sudah ada landasan UU Keistimewaan DIY No. 13/2012 sehingga UU Desa menjadi lebih spesifik dalam arti ada perubahan mendasar dari *Pangreh Projo* menjadi *Pamong Praja*. Termasuk penyesuaian nomenklatur Jabatan Camat pada level bawah maupun nama beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di provinsi dan kabupaten/kota. Bukan hanya perubahan nama, tetapi pelayanannya pun menjadi lebih berbudaya Jogja. Oleh karena itu, semua perangkat wajib mengikuti *short course* di Pawiyatan Pamong sehingga sesanti *desa mowo coro negara mawa tata* lebih tampak nuansanya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara tematik, membaca desa adalah sebuah introspeksi atas eksistensinya selama ini. Mengeja Indonesia dengan melafalkan per huruf membentuk kata I-n-d-o-n-e-s-i-a, merupakan bentuk evaluasi perannya sebagai wadah keragaman desa se-Nusantara. Semuanya itu harus ditempatkan pada era “normal baru” daripada aspek kebudayaan.

“*New normal*” adalah *back to normal* karena kehidupan kemarin justru *abnormal*, menandai sebuah *hiper realita*, seperti ketika kita harus membeli *image* sebuah produk air yang—seolah—meningkat statusnya setelah menjadi produk kemasan. Sebuah kondisi mental yang membuat sesuatu tidak substansif, menjadi melebihi kebutuhan dasar kita sendiri. “*New normal*” adalah sebuah terapi psikis dan kultural *healing*, berefek kejut untuk merefeksi dan mengintrospeksi betapa rapuhnya kehidupan kita kemarin, untuk itu kembalilah ke jati diri dan fungsi diri kita yang nyata. Dunia kemarin sudah mati. Dunia hari ini ibarat sebagai sebuah rumah sakit besar, kita tergeletak di dalamnya dan hanya berpikir sehat dan agar tetap bisa hidup.



Di situlah kini desa berada, yang berimbas pada tata pergaulan dan tata pemerintahan desa. Akhirnya kita menjadi bagian dari generasi yang dipertemukan oleh situasi terbaru dengan perubahan relasi sosial, dinamika organisasi kerja, dan berbagai hal yang selama ini telah kita lalui. Konsekuensinya, Kongres Kebudayaan Desa harus membahas pergeseran budaya desa yang tentu tidak mudah.

Menurut pakar kebudayaan August Compte, Disanayake, maupun Alvin Tofler, setiap pergeseran peradaban ditandai oleh tahapan yang selalu mengedepankan rasionalitas. Bahwa iptek merupakan komponen utama majunya peradaban. Semakin baik penguasaan akan beragam iptek, masyarakat akan semakin mendekati tahap adaptif terhadap kemajuan dan perkembangan zaman. Cara berpikir fungsional inilah yang harus kita hidupkan dan kembangkan di setiap desa agar sejalan dengan konsep *townbie*, membangun kelompok kreatif berbasis kebudayaan seperti contoh *Jogja gumregah*.

Pada masa awal, tentu canggung dan getir, bahkan sakit untuk *melakoninya*. Sebagaimana watak perubahan, harus melewati proses bertahap, terasa ada ketidaknyamanan yang mau tidak mau kita harus hadir menjadi bagian dalam proses tersebut. Potret perubahan dan ketidaknyamanan tersebut, tampak jelas dalam proses Kongres Kebudayaan Desa yang salah satunya menghasilkan 21 buku rumusan Indonesia Menuju Tatanan Baru dari Desa.

Dampak Covid-19 berkelindan dengan disrupsi teknologi menuju era Industri 4.0 yang belum mapan. Itu pun sudah



dibayang-bayangi era Sosial 5.0 yang segera menyusul. Perubahan total ini juga berkejaran dengan pergeseran budaya desa yang belum teridentifikasi secara cermat. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah, termasuk desa, harus bersinergi memastikan pemeriksaan kesehatan masyarakat: tersedianya sarana medis, tersedianya jaring pengaman sosial untuk melindungi—mereka—yang paling rentan, dan tersedianya perlindungan kesehatan. Sebaliknya, berhentilah menjadi provokator dan menyebarkan energi negatif yang tidak bermanfaat bagi siapa pun dan berpotensi menimbulkan kecemasan publik.

Gambaran strategis lingkungan desa yang telah berubah harus diikuti perubahan tata masyarakat, antara lain dengan relokasi dan *refocusing* Dana Desa. Dampak ekonomi membawa dampak sosial yang positif dalam meningkatkan peradaban empati, diikuti kesediaan saling belajar, menghargai, dan berbagi sebagai penguat modal sosial dan partisipasi publik. Penguatan ini berdampak positif pada peningkatan daya tahan ekonomi warga karena terbangunnya jaringan kerja sama, kolaborasi, dan kemitraan. Kebijakan “normal baru” atau adaptif menghadapi realitas perubahan, tidak lain dimaksudkan untuk menyatukan kehendak membangun hidup *guyub* di tengah keragaman perbedaan yang didasari oleh *mutual trust* untuk memperoleh *mutual benefit*. Untuk itu kita harus siap mengubah *mindset* budaya dalam mengelola kehidupan bersama.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa, lurah atau kepala desa, harus memiliki wawasan adaptasi dan kapasitas daya tahan. Bekal kompetensi dalam dunia yang kompleks dan penuh kejutan serta perubahan yang tidak terduga merupakan syarat utama. Harus



mampu melakukan lompatan *non-linier* bahkan *out of the box*. Dari *Terra Firma*, daratan yang dikenal dengan baik, ke *Terra Incognita* atau dunia masa depan. Demikianlah, semoga buku rumusan hasil Kongres Kebudayaan Desa ini bermanfaat bagi desa, bangsa, dan negara Indonesia. Akhir kata, saya ucapkan selamat dan semoga sukses. Sekian, terima kasih. *Wassalam*.

Yogyakarta, 5 Agustus 2020

Hamengku Buwono X
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta





Sekapur Sirih

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

*A*ssalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo budhaya, salam keabajikan.

Melawan korupsi dari desa.

Pergeseran nilai-nilai kejujuran dan kesederhanaan menjadi “pekerjaan rumah” kita bersama. Semakin banyak anak-anak muda kota yang meski tumbuh di desa, tetapi terjangkit penyakit materialisme. Tercerabutnya suasana dan pikiran desa membuat banyak orang berpikir: apa yang ada dalam pikiran mereka hingga tercerabut dari budaya desanya, padahal berasal dari desa?

Kira-kira apa masalahnya di Indonesia? Keteladanan kepala desa dan orang tua menjadi sangat penting. Guru agama pun tak kalah penting. Di kota semakin hilang keteladanan dan sikap apresiasi sehingga muncul materialisme di masyarakat kota. Tentu butuh obat dengan sikap keteladanan dan orang yang sudah harus selesai dengan dirinya. Sikap spiritual ini banyak ditemukan di desa, harmonisasi alam dan manusia di desa baiknya tidak sekadar jadi inspirasi, tetapi harus dipraktikkan.

Materialisme yang menghantui pikiran orang kota bukan pepohonan dan sawah, melainkan mengumpulkan logam-logam. Bentley, Lamborghini, dan mobil-mobil mewah lainnya semua ada di parkir Komisi Pemberantasan Korupsi, sitaan dari kasus korupsi. Kumpulan mobil itu menjadi tidak penting. Namun, mengapa masih ada orang-orang yang ingin memilikinya dengan cara salah: korupsi? Apakah ada yang salah dengan pikiran orang kota? Kita perlu rekonstruksi bagaimana pikiran orang desa yang simpel: naik angkot, truk, dan moda transpor publik lainnya yang lebih fungsional.

Mari kita tengok pemikiran ekonom peraih Nobel: *When enough is not enough, a hedonist is born*. Ketika cukup sudah dianggap tidak cukup maka penyakit cinta dunia materialistis akan tumbuh. Pemenang Nobel ini sangat spiritual, seperti ajakan kembali ke desa dan mendalami pemikiran sederhana orang-orang desa. Namun pada prinsipnya, urusan menimbun kekayaan adalah penyakit semua orang, baik orang kota maupun orang desa.

Tantangan yang tidak kalah besar di desa, salah satunya *money politic*. Ternyata sistem politik yang kita pilih kemudian menular.



Pemilihan bupati, gubernur, sampai tingkat pusat penuh syarat *money politic*. Berharap untuk pilkades tidak ada *money politic*. Namun, harapan itu membentur kenyataan. Bahkan saling menularkan, baik dari desa ke kota maupun sebaliknya. Jadi, apakah desa menjadi inspirator korupsi karena *money politic* pilkades?

Sebenarnya sumber permasalahan ada pada politik yang tidak rasional. Kenapa tidak rasional? Kepala desa tidak ada gaji, tetapi dibayar dengan bengkok. Bengkok untuk pembangunan desa kemudian diasosiasikan menjadi milik kepala desa. Kalau panen padi tiga kali dalam setahun, dihitung paling tidak pendapatan 200 juta. Kemudian dikalikan berapa ton pemimpin ketemu angka, kalau dikeluarkan 1 miliar maka untung sedikit. Itu dari bengkok. Sementara dari dana desa maupun beberapa bantuan pembangunan infrastruktur dari pusat bisa menjadi bumerang dan jebakan pikiran koruptif. Ini harus kita pecahkan bersama karena tantangan di desa hari ini berbeda dengan dahulu.

Sistem politik yang kita pilih mahal, sistem terbuka. Sementara pendanaan negara untuk partai politik rendah. Konversi suara ternyata sering kali tidak berbanding lurus dengan pendanaan secara rasional kepada partai politik. Contohnya, gaji bupati 6,5 juta, gubernur 8,5 juta, dan wakil presiden 40 juta yang dinilai tidak laik dengan proses ketika mereka terpilih. Negara harus sudah mulai memikirkan kepala desa digaji yang cukup. Di Surabaya contohnya: lurah digaji 30 juta, camat bisa 50 juta, tetapi di desa-desa lain bagaimana? Sehingga yang terjadi, tidak sedikit kasus kepala desa hasil pemilihan secara *money politic*, kemudian melakukan upaya-upaya yang merusak perilaku masyarakat desa itu sendiri.



Mengapa 36 persen pelaku korupsi yang ditahan KPK adalah kader politik, anggota DPR, dan kepala daerah? Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Angka politik sangat memengaruhi angka persepsi indeks korupsi Indonesia, jadi varietas demokrasi proyek angkanya 28, sementara dari lulusan ekonomi ratingnya 59. Jadi angka-angka ini merupakan perbandingan korupsi yang diperbandingkan setiap negara. Untuk kasus Indonesia cukup menarik karena terus menanjak, ini jarang terjadi di negara lain.

Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain, terbaik di dunia untuk pergerakannya. Dari 17 ke 40, naik 23 poin. Cina memberantas korupsi dengan hukuman mati naik 7 poin. Kemudian Malaysia di bawah kepemimpinan Mahathir bisa *reborn* setelah di zaman Najib turun 47. Itu pun hanya menaikkan Malaysia di angka 2 poin saja. Jadi, Indonesia sudah benar dalam pemberantasan korupsi, tetapi terlalu kaya dengan isu kota sehingga di desa juga perlu dilibatkan pemberantasan korupsi. Untuk itu, ada tiga strategi yang dilakukan KPK: Penindakan agar koruptor jera, pencegahan agar orang tidak melakukan korupsi, pendidikan agar orang tidak ingin korupsi. Demikian sekapur sirih dari kami untuk 21 judul buku hasil rumusan Kongres Kebudayaan Desa. Terima kasih.

Jakarta, 5 Agustus 2020

Giri Suprardiono

Direktur Dikyanmas KPK





Sekapur Sirih

Menteri Desa, PDTT

*A*ssalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

Pertama-tama, mari kita bersama-sama bersyukur kehadiran Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan Kongres Kebudayaan Desa tahun 2020. Ini adalah satu momentum yang sangat luar biasa, titik pijak atau titik tolak dari kebangkitan desa-desa yang memiliki akar budaya, di mana perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan desa

jangan sekali-kali lepas dari tumpuan akar budaya desa setempat. Mudah-mudahan kongres ini merupakan awal untuk kongres kebudayaan desa tahun-tahun berikutnya. Kedua, selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang memberi cetak tebal kebudayaan manusia di muka bumi.

Melalui kongres desa, kita semua sudah diberikan pandangan dan paradigma baru dalam melihat dunia, termasuk kebudayaan. Kita tentunya semakin sadar bahwa di balik pandemi Covid-19 terdapat ujian sekaligus hikmah. Kita belum tahu kapan tuntasnya, tetapi kita harus mengambil langkah konkret dan strategis, salah satunya dengan merumuskan tatanan baru. Dan tentu saja kita berharap pandemi segera berlalu.

Sebagaimana dijelaskan selama kongres, pandemi Covid-19 sudah sampai pada level mendekonstruksi tataran budaya manusia. Tidak hanya kebudayaan semata, tetapi ekososial politik juga terdekonstruksi. Untuk itu, ada beberapa hal terkait rumusan kongres agar bisa berkontribusi terhadap paradigma baru Indonesia pascapandemi.

Pertama, melalui kongres kita berharap bisa mengidentifikasi nalar tebal kebudayaan masyarakat desa, seperti gotong royong atau *hopolis kuntul baris*, saling peduli antarsesama masyarakat desa, sekaligus membaiknya ekosistem politik di mana masyarakat desa mampu berpartisipasi terhadap pembangunan bangsa dan negara.

Kedua, kongres diharapkan mampu berkontribusi untuk pemikiran nalar kebudayaan baru yang otentik, unik, dan inovatif yang hari-harinya dijalankan masyarakat desa. Dengan kata lain,



di balik keriuhan negara mengurus problem bangsa, masyarakat desa punya model dan modul pendekatan khas yang berasal dari cara mereka menghadapi persoalan. Ini *problem solving* yang spesifik khas desa, contoh ketika ada masalah tidak terlalu berat, cukup selesai di desa. Hukum positif tidak selalu menjadi rujukan. Misalnya, ada pencuri ayam, tidak serta-merta diurus ke kantor polisi, dimasukkan sel. Melainkan diselesaikan di desa dengan sanksi sosial yang diputuskan oleh kepala desa, yang karena kemampuan dan kewibawaan yang dimilikinya sehingga keputusan diterima oleh masyarakat.

Ketiga, forum Kongres Kebudayaan Desa yang melibatkan beragam unsur keterwakilan: akademisi, praktisi, seniman, budayawan, pemangku adat, dan elemen pemerintahan dari pusat sampai desa. Untuk itu, saya berharap agar semua unsur saling berkolaborasi. Para praktisi menceritakan bagaimana desa melaksanakan kenormalan baru di desa. Akademisi bisa mereformulasi dan meredesain bagaimana kebijakan yang adaptif bagi desa. Sebagai keterwakilan pemerintah, kami berharap ada perhatian khusus pascakongres agar lebih serius dan terelaborasi dengan kebijakan untuk kesejahteraan desa di Indonesia.

Terakhir, kami dari Kemendesa PDTT terus mencari dan mengidentifikasi narasi tentang desa, masyarakat desa, dan dinamikanya mengikuti perkembangan zaman yang bisa kita formulasikan menjadi kebijakan. *Tagline* “Desa untuk Semua Warga atau Desa Surga” merupakan inti sari pemajuan kebudayaan desa, pemajuan masyarakat desa dengan memperhatikan kearifan lokal. Dana desa jangan hanya dirasakan elite desa, tetapi dirasakan



kehadirannya oleh seluruh masyarakat desa, itu inti dari surga, desa untuk semua warga desa.

Terima kasih kepada Sanggar Inovasi Desa, pemerintah Desa Panggunharjo, dan Jaringan Kerja Kongres Kebudayaan Desa 2020 yang telah mempersiapkan dan melaksanakan kongres dengan segala risiko dan konsekuensinya. Semoga kongres dengan hasil rumusannya yang terbingkai dalam 21 judul buku ini menjadi momentum berarti bagi perubahan dan penguatan budaya desa di masa yang akan datang. Demikian sekapur sirih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, salam budaya desa.

Jakarta, 5 Agustus 2020

Abdul Halim Iskandar

Menteri Desa, PDTT





Pidato Kebudayaan

Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud

*A*ssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastyastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Revolusi perdesaan sejatinya adalah revolusi kebudayaan.

Bapak, ibu, dan peserta kongres yang saya hormati. Terima kasih telah mengundang saya dan memberi kesempatan bicara di depan Kongres Kebudayaan Desa. Saya baca kerangka acuan dengan saksama, saya melihat kebudayaan tidak dipahami semata kesenian atau warisan budaya. Namun, juga sebagai keseluruhan

cara hidup, cara berpikir menyangkut kebiasaan kita, ritual, dan praktek yang terkait kebudayaan. Jadi kebudayaan dalam pengertian luas, sama seperti semangat dari UU No. 5/2017, tentang pemajuan kebudayaan Indonesia.

Pertama, kita paham bagaimana Pandemi Covid-19 mengubah cara hidup kita secara drastis. Kita membatasi pertemuan dengan orang lain, bersentuhan dengan orang lain, menjaga jarak, dan kita juga punya beberapa keseragaman. *Physical distancing, lockdown*, dan seterusnya, semua masih dalam bahas Inggris, bahasa asing. Ini menunjukkan respons kita pada situasi pandemi masih cenderung datang dari luar, belum sepenuhnya menjadi sesuatu yang berakar pada masyarakat kita, dari dalam. Padahal kita mempunyai khazanah pengetahuan luar biasa menghadapi situasi pandemi. Tidak sedikit orang mengatakan, situasi yang kita hadapi tidak ada bandingannya.

Kedua, pada situasi luar biasa, kita perlu langkah-langkah luar biasa juga. Pemikir Inggris mengatakan, untuk mengatasi situasi Covid-19, kita perlu sebuah revolusi perdesaan. Revolusi ini landasan kita untuk tatanan masa depan. Karena revolusi bukan sesuatu luar biasa. Dalam sejarah Indonesia, kita sering mendengar seruan revolusi, terakhir revolusi mental. Jadi, tidak ada yang luar biasa dengan gagasan revolusi. Yang luar biasa adalah ketika gagasannya diutarakan oleh seorang bankir. Orang terkaya kedua di desa.

Gagasan mengenai revolusi perdesaan bisa kita tengok dalam sebuah tulisan yang dimuat di situs *World Economic Forum*. Ini keluar dari kebiasaan lain, forum ekonomi dunia dikenal oleh kepala pemerintahan dunia sebagai kumpulan para pebisnis, ekonom, yang

membentuk sistem untuk mendominasi, jelas bukan forum untuk revolusi. Kita tidak mungkin kembali ke masa sebelum Covid-19, ke masa yang sebelum normal lama, dan kita perlu sebuah tantangan baru, tantangan yang lebih manusiawi, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Karena kata kunci tatanan baru adalah keselamatan.

Bisa dibayangkan, ketika semua orang mendapat kesempatan mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidup. Kita akan mudah sekali bersepakat untuk hal tersebut. Namun, bagaimana caranya? Jawaban paling jujur kita berikan pada pertanyaan mendasar yang kita belum ketahui bersama. Belum ada yang mengetahui bagaimana caranya untuk bisa sampai ke sana, karena tidak ada atau tepatnya belum ada cetak biru siap pakai. Namun, coba kita pastikan titik tolaknya ada pada desa. Perjalanan kita sebagai masyarakat, sebagai bangsa, dimulai dari desa. Sekitar 1550 tahun lalu, asal mula pengelompokan masyarakat dalam jumlah besar yang kemudian membentuk bangsa Indonesia. Periode selanjutnya ketika kita ingin membangun negeri modern, tetapi desa dilupakan, diabaikan. Seluruh sumber daya kita keluarkan untuk membangun sektor modern yang oleh Covid-19, diingatkan untuk kembali ke asal usul, kembali ke dasar, kembali ke akar, kembali ke desa, itu alasan utama.

Alasan berikutnya, desa telah menyiapkan kebutuhan dasar untuk normal baru, terutama pangan dan kesehatan. Dua hal pokok ini tidak boleh diserahkan semua pada pasar. Ketika pembatasan sosial diberlakukan, kemudian ada orang panik memborong bahan pangan dan obat-obatan, termasuk yang tidak diperlukan. Sementara yang memerlukan tidak bisa membeli. Penyelesaian masalah seperti



ini tidak sesederhana menangani penyelewengan, tapi ada kelemahan dalam sistem yang harus diperbaiki. Ini semata bukan soal mafia impor beras maupun gas—yang memang harus disingkirkan. Namun, ada yang lebih penting, yaitu menata ulang sistem yang berpihak, yang bisa menegakkan kedaulatan di atas sistem itu sendiri sehingga mengembalikan kemampuan kita mengelola sumber daya yang ada. Fokus utamanya untuk pemenuhan kebutuhan kita semua, terutama kebutuhan di dalam negeri. Selebihnya, bolehlah berbagi dengan negara tetangga, negara sahabat.

Dan saya kira, yang berkumpul sekarang di kongres, adalah para pejuang akar rumput yang sudah lama menekuni masalah ketimpangan dan penyelewengan, yang bergerak mengurus memuliakan kembali benih-benih lokal. Ada yang terlibat praktik agro ekonomi, ada yang mengurus pasar lokal dan nasional untuk melayani kebutuhan masyarakat, penggerak koperasi usaha kecil, BUMDes, semua elemen yang diperlukan dalam tatanan mendatang. Saatnya, kita belajar kembali dari kearifan lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi baik lisan maupun tulisan. Hemat saya, ini kerja-kerja kebudayaan.

Pengetahuan tradisional di masa pandemi terlihat memiliki keunggulan. Kasus Covid-19 banyak sembuh karena obat tradisional. Balitbang pertanian sudah identifikasi 50 tanaman herbal untuk penangkal virus. Beberapa perusahaan jamu sudah memproduksi ramuan daya tahan tubuh untuk menghadapi Covid-19. Semua bukan sekadar romantisme, tapi pikiran rasional. Kita tidak mungkin diam menunggu vaksin datang. Sekarang, di banyak tempat, orang-orang mulai menggali pengetahuan dari naskah-naskah,

tradisi lisan, dan berbagai praktik lainnya untuk memperkuat daya tahan terhadap virus. Dan dalam prosesnya, kita menyadari betapa pengetahuan lokal yang selama ini diabaikan ternyata memiliki potensi pengembangan yang luar biasa.

Covid-19 telah memaksa kita melihat kembali jejak dan perjalanan kita. Covid-19 sudah mendesak kita memanfaatkan kekayaan budaya dan intelektual yang kita miliki. Memanfaatkan teknologi mutakhir, bermacam teknologi terbaru, temuan di berbagai bidang, kesehatan, pangan, energi terbarukan, dan pada akhirnya seluruhnya diharapkan bisa menghasilkan pengetahuan sebagai landasan untuk tatanan baru.

Kalau kita tengok lebih jauh, seluruh praktik baik tatanan baru, mempunyai nilai ekonomi yang sangat besar. Sebagai contoh, pengobatan berbasis pengetahuan lokal sekarang disebut pengobatan integratif dengan nilai total di dunia mencapai 360 Miliar Dolar. Padahal pengetahuan integratif hanya bagian kecil saja dari industri yang disebut *wellness industry* yang mencakup banyak hal: ada perawatan diri, makanan sehat, pariwisata, dan total nilainya diperkirakan sudah 4,2 Triliun Dolar. Itu data sebelum Covid-19. Dan menurut hemat saya, di masa Covid-19 justru industri berbasis pengetahuan lokal di bidang kesehatan, bidang keselamatan akan semakin berkembang. Seiring dengan meningkatnya kesadaran publik mengenai kesehatan.

Dalam sebuah studi dan riset, telah memperlihatkan bahwa 40% dari nilai total 4,2 Triliun Dolar atau 1,7 Triliun Dolar Amerika, sama besarnya dengan 25 Ribu Triliun Rupiah. Dan pada tahun



2023 kelak, nilai tersebut akan berada di Asia Pasifik. Jadi, kue yang cukup besar dari industri *Wellness* tersebut akan ada di Asia Pasifik. Pertanyaannya kemudian, Indonesia sebagai sektor perekonomian terbesar keenam di Asia Pasifik apa rencananya? Padahal, relatif kita punya semua. Keanekaragaman hayati luar biasa, salah satu yang paling besar dan lengkap di dunia. Pengetahuan lokal mengelola alam juga luar biasa. Dan jangan lupa, banyak penemuan di bidang kesehatan modern pun dilakukan di Indonesia. Para peneliti dari berbagai belahan dunia datang ke Indonesia, berinteraksi dengan orang desa, mencatat kebiasaan mereka, kemudian menghasilkan temuan yang sampai sekarang masih punya pengaruh besar dalam kedokteran modern.

Itu semua kita punya, tapi pertanyaannya, apa rencana kita? Saya percaya bahwa fokus para pengembang *Wellness* di Indonesia akan membawa angka pertumbuhan kembali bergerak naik, tapi hendaknya harapan besar ini jangan sampai mengalihkan fokus kita. Kita membangun tatanan baru bukan untuk menjadi yang paling besar. Presiden Jokowi dalam sidang IMF mengingatkan dengan sebuah pertanyaan retoris, untuk apa menjadi yang paling besar di tengah dunia yang tenggelam?

Bapak, ibu, dan peserta kongres yang saya hormati. Tatanan baru yang kita rumuskan memang seharusnya mengutamakan keselamatan dan kebahagiaan, itu kata kuncinya. Bukan angka pertumbuhan, bukan uang. Covid-19 mengingatkan kita semua bahwa uang bukan segalanya. Punya uang tapi tidak ada yang bisa dibeli, itu pelajaran berharga di masa krisis pandemi. Semua tidak mudah. Kita terbiasa dengan peralatan modern, termasuk uang.

Mengubah cara pandang dan kebiasaan memerlukan perubahan mendasar, perubahan kebudayaan. Karena itu revolusi perdesaan sejatinya adalah revolusi kebudayaan.

Benih-benih kebiasaan baru, kebudayaan baru sudah mulai bertumbuhan. Di tengah pembatasan sosial, kita mulai melihat orang kembali ke alam, bercocok tanam. Kita menangkap ada kerinduan untuk kembali belajar sejarah, kembali belajar kebudayaan, tradisi spiritual dan praktik dalam bermasyarakat. Gerakan sosial juga bertumbuhan di mana-mana. Di Yogyakarta contohnya, ada gerakan Solidaritas Pangan Jogja: membangun dapur umum untuk membantu masyarakat kesusahan. Kita mencatat para seniman memproduksi alat kesehatan seperti Alat Pelindung Diri (APD) dan *face shield* yang terjangkau.

Revolusi perdesaan sudah dimulai. Tugas kita dan tugas kongres kita ini, untuk merajut inisiatif menjadi gerakan efektif. Merajut *science* mutakhir dengan pengetahuan tradisional. Kita merajut teknologi digital dengan pranata lokal. Gerakan ini adalah gerakan interdisipliner, karena tidak ada bidang ilmu atau sektor masyarakat yang bisa menjalankan tugas besar sendirian. Di sinilah semangat gotong royong akan mendapatkan wujud nyata.

Terakhir sebagai penutup, saya memohon bantuan para pegiat desa, para aktivis kepala desa, kepala daerah yang hadir dalam kesempatan kongres ini, untuk memperhatikan balai kebudayaan di desa. Sebagian dari kita punya padepokan, sanggar, dan seterusnya. Saya sangat memohon bantuan kita semua agar seluruh institusi ini bisa bertahan di masa sulit. Bagi yang belum punya padepokan,



sanggar, mohon bantuan agar kantor desa juga bisa berfungsi sebagai balai kebudayaan pusat pemajuan kebudayaan, bukan soal gedung fisik, tapi program dan kegiatannya. Di sinilah harapan saya kita bisa mulai melancarkan revolusi kebudayaan melalui musyawarah, lumbung pengetahuan. Di sinilah saya berharap kreativitas dan energi pembaruan bisa berkonsolidasi. Perangkat desa bisa menjadi agen pemajuan kebudayaan di wilayah setempat, kami siap kerja sama dengan seluruh unsur. Semoga setelah kongres, kita bisa menghasilkan agenda aksi konkret di tatanan baru. Terima kasih. Wassalam.

Jakarta, 1 Juli, 2020

Dr. Hilmar Farid

Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud





Daftar Isi

Pengantar Editor..... v

Sekapur Sirih

1. **Gubernur DIY xii**

Hamengku Buwono X

2. **Direktur Dikyanmas KPK..... xvii**

Giri Suprpdiono

3. **Menteri Desa, PDTT xxi**

Abdul Halim Iskandar

Pidato Kebudayaan Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud	xxv
Dr. Hilmar Farid	
Daftar Isi	xxxiii
Data dan Kekuasaan: Tantangan Hukum di Era Data Eksplorasi yang Berlebihan.....	1
Margiyono Darsasumarja	
Data Kependudukan: Antara Kesenjangan dan Lompatan..	12
Sukamdi	
Transformasi Data untuk Memerangi Korupsi	24
Mochamad Hadiyana	
Reformasi Manajemen Data Desa.....	36
Dr. Ivanovich Agusta	
Mewujudkan Desa Berdana, Berdata, dan Berdaya.....	45
Budiman Sudjatmiko	
Internet untuk Desa.....	54
Onno W. Purbo	
Mendobrak <i>Status Quo</i> Sistem Informasi Kelurahan.....	64
Mukhijab	
Epilog	82
Ketua Panitia Kongres Kebudayaan Desa 2020	
Deklarasi Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa.....	110
Kerabat Kerja Kongres Kebudayaan Desa 2020.....	113





Data dan Kekuasaan: Tantangan Hukum di Era Data Eksploitasi yang Berlebihan¹

Margiyono Darsasumarja

Data tidak hanya soal politik, tetapi juga terkait erat dengan penguasaan ekonomi. Memasuki era digital, data menjadi komoditas penting yang membuat seseorang atau sebuah kelompok menguasai orang lain dalam skala besar.

Seperti yang kita tahu, era digital adalah era *big data*. *Big data* merupakan sebuah sistem data yang menyatakan volume data yang besar. Dalam sistem *big data*, bukan seberapa banyak data

1 Disarikan oleh Suhairi Ahmad.

yang dinyatakan dalam volume tersebut, melainkan untuk tujuan apa data itu digunakan. Seperti aplikasi-aplikasi berbasis Android mutakhir yang memakai sistem *big data* untuk mengumpulkan data penggunaannya dan kemudian mengelolanya. *Big data* adalah teknologi yang memiliki kapasitas yang cukup besar dengan kumpulan data-data yang kompleks.

Oleh karena itu, jelas bahwa kekuasaan dan data merupakan satu jalinan yang tidak terpisah saat membicarakan dunia digital. Ada lima poin yang akan saya paparkan berkaitan dengan data dan hubungannya dengan kekuasaan.

Data Overload

Pertama, soal *data overload* atau banjir data. Selain ditandai dengan beragam inovasi teknologi informasi, era digital juga ditandai melimpahnya data-data. Data tersebut berlimpah dan kemudian meluap sehingga banyak orang tenggelam dengan data-data yang terus-menerus diperbarui setiap hari. Berkat internet, banyak orang mengakses dunia digital. Setiap hari data-data itu terus bertambah. Mulai dari *terabyte* hingga *hexabyte*. Dan pada dasarnya internet merupakan transportasi data dari detik ke detik. Selain itu, data digital mudah terkopi, mudah tersebar sekaligus berpotensi viral di jagat media sosial.

Di dunia internet, sadar atau tidak, semua orang yang menggunakannya dengan rela menyerahkan data diri mereka. Semua itu dilakukan melalui media sosial dan aplikasi Android yang digunakan hampir setiap hari. Baik untuk berselancar di dunia maya maupun untuk mempermudah aktivitas sehari-hari. Media

sosial dan aplikasi-aplikasi tersebut mengambil dan mengolah data pribadi yang digunakan untuk kepentingan perusahaan ataupun kepentingan pihak pengiklan. Hampir semua perusahaan berbasis aplikasi tersebut merupakan bisnis dengan model bisnis data.

Bisnis berbasis data merupakan bisnis mutakhir yang cukup menjanjikan. Walaupun tidak menampilkan pengiklan di aplikasinya, media sosial seperti WhatsApp pun merupakan bisnis data. Data-data pengguna WhatsApp tersebut lalu digunakan oleh perusahaan yang menaunginya, yakni Facebook yang merupakan induk dari WhatsApp dan Instagram.

Selain itu, data-data yang kita miliki tidak hanya bisa tersimpan di perangkat keras seperti *hard disk*, melainkan juga bisa tersimpan di *cloud* bersama aplikasinya. Dalam *cloud*, pengguna tidak tahu data pribadinya tersimpan dengan baik atau tidak. Data-data yang ada di dalam *cloud* tersebut berserak dan rawan disalahgunakan.

Datanomics

Berlimpahnya data-data digital merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi. Apalagi bisnis di era digital merupakan bisnis yang mengandalkan data sebagai basis utama. Data-data itu digunakan untuk proses pengembangan bisnis yang bisa ditawarkan kepada pengiklan sekaligus layanan konsumen. Perusahaan digital melalui medium aplikasinya dapat mendeteksi dan mem-*profiling* data konsumen yang ditujunya. Oleh karena itu, dalam bisnis digital data merupakan sumber daya ekonomi penting atau kemudian dikenal dengan istilah *datanomic*.



Melalui data-data yang diserahkan pengguna media sosial atau aplikasi, perusahaan dapat melacak target bisnisnya berdasarkan letak geografis, demografi seperti apa, pendapatan berapa, hobinya apa, sampai kebiasaan konsumen pun ditelisik untuk mendapatkan target bisnis yang akurat.

Hal semacam itulah yang menumbuhkan keyakinan di antara para pelaku ekonomi digital bahwa data adalah *the next currency* atau mata uang baru selanjutnya. Data adalah sesuatu yang dapat mendatangkan uang dan kekayaan. Kalau sudah ada keyakinan semacam itu, data punya nilai yang cukup besar dan tinggi di masa depan dengan model bisnis industri digital. Hal inilah yang kemudian membuat industri *big data* meledak luar biasa dan hampir semua perusahaan teknologi informasi memberikan tempat yang cukup penting untuk *big data*.

Data Overexploitation

Karena data digunakan sebagai basis utama sumber daya ekonomi dan bahkan menjadi mata uang baru, hal tersebut akhirnya menimbulkan eksploitasi data besar-besaran terhadap data pribadi. Data-data tersebut digunakan untuk kepentingan politik dan berujung pada pemenangan kekuasaan politik.

Kasus Cambridge Analytica berawal pada 2014, saat Aleksandr Kogan—seorang peneliti dari Cambridge University—membuat kuis kepribadian “This is Your Digital Life”. Aplikasi tersebut disebarluaskan melalui Facebook dan berhasil menggaet 300.000 orang untuk mengikuti kuis tersebut serta bersedia membagikan data pribadi

mereka dengan beberapa data teman-teman yang mengikuti mereka di Facebook.

Akan tetapi, setahun kemudian pihak Facebook mendapatkan informasi bahwa data tersebut dibagikan kepada Cambridge Analytica. Tidak menunggu lama setelah informasi tersebut, pada 2016, data pengguna Facebook itu digunakan oleh tim pemenang Donald Trump saat pemilu di Amerika Serikat dalam rangka memengaruhi opini publik menjelang pemilu berlangsung. Kasus tersebut mencuat dan menuai kecaman dari berbagai pihak, terutama dari pengguna Facebook sendiri.

Data Governance

Berkaca pada kasus Cambridge Analytica, kita perlu menghadirkan *data governance* atau dapat diartikan sebagai manajemen data. *Data governance* lahir sebagai pengelolaan data yang baik, akurat, dan bertanggung jawab sehingga mengupayakan perlindungan data dari hal-hal yang tidak bertanggung jawab.

Walaupun cukup tertinggal dari segi kualitas maupun kuantitas teknologi informasi, Indonesia perlu *data governance*. Beberapa tahun belakangan, muncul usulan publik untuk merevisi UU ITE mengenai perlindungan data pribadi. Namun, sampai saat ini perbincangan ini belum mendapat ketetapan UU di DPR. Hal ini disebabkan munculnya poin-poin pasal yang kontroversial dan menuai perdebatan. Salah satunya adalah pasal untuk perlindungan data pribadi itu sendiri yang menjadi hak pemilik data. Poin semacam itu sangat mirip dengan sistem perlindungan data di Uni Eropa yang melindungi dengan ketat soal data pribadi. Namun,



dalam sistem di Amerika Serikat, hal tersebut justru ditolak karena akan merugikan perusahaan besar yang tidak dapat mengakses data publik sesuai kepentingannya.

Dalam RUU Perlindungan Data Pribadi, sedikit banyak mengacu pada standar *general data protection regulation* (GDPR) Uni Eropa. GDPR disahkan pada 2016 oleh Uni Eropa dan mulai berlaku pada 25 Mei 2018 di 28 negara anggota UE. Melalui peraturan ini, tidak ada yang secara semena-mena menggunakan data pribadi, baik untuk kepentingan individu maupun kepentingan lembaga atau perusahaan. Kebijakan tersebut tidak lepas dari latar belakang negara-negara Eropa sebagai negara *unitarian* yang menghormati hak-hak privasi.

Bahkan, beberapa tahun lalu, pada 2015 Pengadilan Kehakiman Uni Eropa memutuskan bahwa *safe harbor agreement* dinyatakan tidak sah dengan alasan bahwa AS tidak menyediakan tingkat perlindungan yang sama memadai dengan data-data yang dipindahkan. Imbas dari perjanjian dagang tersebut membuat perusahaan AS bisa bebas dari tuntutan hukum saat melanggar prinsip perlindungan data. Sesuai keputusan itu, perusahaan AS dinilai melanggar prinsip tersebut dan akhirnya perjanjian itu dibatalkan. Implikasi dari keputusan pengadilan tersebut, banyak perusahaan AS, seperti Google, Facebook, dan Twitter mendapatkan denda puluhan triliun.

Walaupun sistem perlindungan data pribadi AS dinilai tidak ketat seperti di Uni Eropa, negara tersebut masih mempertimbangkan kebutuhan data untuk perusahaan. Hal ini tentu saja disebabkan karena sistem negara AS yang liberal. Perusahaan besar multinasional

sangat dimanjakan oleh sistem perundang-undangan negara. Namun, walau terlihat sangat bisa melakukan kegiatan mengumpulkan, mengelola, dan pemanfaatan data, negara tersebut masih berupaya untuk melakukan perlindungan data pribadi, terutama saat ada penyalahgunaan data untuk kepentingan politik, misalnya saat pemilihan presiden.

Keadilan Data

Tujuan akhir dari *data governance* yang dijelaskan di atas adalah keadilan data di era *big data*. Data-data formal struktural yang dimiliki oleh lembaga-lembaga negara sudah diatur cukup detail. Namun, untuk *big data* atau data-data digital belum diatur secara serius dalam perundang-undangan. Apalagi *big data* merupakan data yang tidak terstruktur yang sering kali digunakan oleh lembaga-lembaga yang tidak berwenang sama sekali yang umumnya merupakan lembaga privat, *start up*, atau perusahaan teknologi *big text*.

Mengapa perlu membicarakan keadilan data? Hal ini disebabkan karena ditemukan ketidakadilan data. Ketidakadilan tersebut disebabkan oleh eksploitasi terhadap data-data yang tidak terstruktur dan sering kali digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau demi kepentingan dari pihak tertentu. Publik yang mempunyai data hanya dianggap sebagai objek yang tidak perlu tahu dengan data miliknya sendiri. Apalagi pengambilan data-data tersebut sering dilakukan tanpa persetujuan saat memakai aplikasi. Hal ini menyebabkan pemilik data tidak tahu untuk kepentingan apa data miliknya digunakan. Salah satu contohnya adalah WhatsApp sebagai



komunikasi antarpribadi yang privat, tetapi di balik itu ada bisnis *big data* yang bersifat anonim. Data-data tersebut nantinya akan digunakan untuk kepentingan perusahaan yang lebih besar. Baik untuk pengembangan aplikasi maupun untuk ditawarkan kepada pengiklan.

Oleh karena itu, kehadiran keadilan data untuk menjelaskan siapa sebenarnya empunya dan siapa yang pengempunya data. Jika hal ini terang benderang, keadilan data akan berpihak pada publik sebagai sang empunya data. Jika datanya akan digunakan oleh pihak lain yang disebut pengempunya, lembaga tersebut jelas—siapa yang mempunyai kepentingan untuk mengambil dan mengumpulkan data. Salah satu contoh lembaga pengempunya yang berwenang tersebut adalah Dinas Kependudukan. Selain berwenang mengambil dan mengumpulkan data, serta memanfaatkan data untuk kepentingan publik, lembaga tersebut juga berkewajiban untuk menjaga data pribadi tersebut. Negara tidak semata hadir untuk memanfaatkan data publik, tetapi juga melindunginya. Negara sebagai pengempunya bertanggung jawab terhadap nasib data yang dikumpulkannya. Kasus seperti bocornya data e-KTP merupakan kasus yang semestinya tidak terjadi.

Saat empunya dan pengempunya jelas maka keduanya tahu dengan konsekuensi yang akan terjadi. Selain itu, ada jaminan dari pengempunya data bahwa data yang dikumpulkannya dimanfaatkan untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi atau perusahaan yang kemudian akan mengeksploitasi data pribadi.

Jika mekanisme tersebut berjalan dengan baik, pemilik data tidak perlu khawatir dengan pengelolaan data pribadinya. Namun,

saat data e-KTP bocor dan tersebar, wajar bila ada kekhawatiran berlebihan. Apalagi, data-data tersebut sudah tersebar saat kita membuat akun di aplikasi media sosial seperti Facebook atau sejenisnya. Yang mengkhawatirkan jika terjadi tindak kriminal, seperti pembobolan data yang dapat menembus nomor rekening bank, serta mengetahui nama ibu kandung dari empu data yang kemudian dapat merugikan secara materi.

Di tengah kekhawatiran itu maka penting untuk hadirnya *data governance* atau regulasi yang mengatur penggunaan data pribadi, seperti RUU Perlindungan Data Pribadi. Dilihat dari isi rancangannya, Indonesia lebih cocok dengan mazhab Eropa. Namun, di sisi lain, ada pula kepentingan mendorong industri digital yang memanfaatkan data. Hal ini kemudian menciptakan saling tarik-menarik antara mazhab Eropa dan mazhab AS. Atau kelak ada kemungkinan untuk memadukan kedua mazhab tersebut yang mengatur mana yang tidak boleh diotak-atik untuk kepentingan komersial dan mana yang boleh atas izin pemiliknya. Sebab, bagaimanapun data tidak bisa ditransfer atau dialihkan kepemilikannya. Data melekat pada diri individu. Walaupun begitu, data masih punya kemungkinan untuk dikelola oleh pihak lain dengan ketentuan tertentu dan regulasi yang jelas. Penjelasan penguatan *data governance* cukup singkat, tetapi cukup rumit.

Penutup

Saya pikir, kita tidak bisa membendung kemajuan teknologi informasi, termasuk teknologi data sains, seperti *big data*. Anggaplah *big data* seperti hujan dan kita tidak perlu pawang untuk



menghentikannya. Kita hanya perlu payung agar tidak basah kuyup dan masuk angin. Dengan apa kita memayungi diri di tengah hujan *big data*? Payung tersebut adalah *data governance* atau regulasi yang mengatur data-data yang tersebar.

Di dalam *data governance*, diatur bahwa empu data sebagai pemilik data dilindungi datanya dari penyalahgunaan atau pemakaian untuk hal-hal yang tidak baik atau mengarah pada kejahatan. Selain itu, di dalamnya juga mengatur kewajiban pengampu data sebagai pihak yang mengelola, meng-*upgrade*, mengumpulkan, serta melindungi dan menjaga data agar tidak menyebar dan jatuh ke tangan yang disebut sebagai kuasa jahat. Pengampu data juga wajib mencegah pemanfaatan data yang dapat merugikan pemilik data itu sendiri maupun masyarakat.

Teknologi tidak bisa dibendung, tetapi hukum dan peraturan selalu berjalan di belakangnya, walaupun selalu tertinggal. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tetapi kita bisa menyediakan payung. Demikian.

Profil Narasumber

Kiprahnya di telekomunikasi sudah cukup matang, terutama di ranah hukum siber. Ia menekuninya sejak lulus dari Fakultas Hukum, Universitas Indonesia (UI). Lalu lanjut program master di University of Leeds, Inggris, dengan konsentrasi LLM in Cyber Law: IT, Law and Societ. Sekembalinya di Indonesia, ia aktif terlibat di beragam penelitian. Salah satunya yang sedang berjalan adalah riset tentang rancangan regulasi hoaks dan ujaran kebencian.



Perjalanan studi dan beragam risetnya mengantarkan Margiyono Darsasumarja menjadi Koordinator Indonesia Online Advocacy. Dan portofolio tersebut kemudian dilengkapi dengan posisinya sebagai Komisaris Independen PT. Telkom Indonesia, dari 2015 hingga 2020. Pengalaman panjangnya itulah yang melahirkan pemikiran, “Kita tidak bisa menghentikan hujan, tetapi kita bisa memakai payung untuk melindungi diri. Kita tidak bisa membendung kemajuan teknologi, tetapi kita bisa memayungi diri kita dengan *data governance*.”





Data Kependudukan: Antara Kesenjangan dan Lompatan

Sukamdi

Pengantar

Istilah datakrasi barangkali masih baru untuk sebagian besar orang, meskipun telah sering dibahas. Salah satu rujukan pengertian datakrasi adalah sebagai berikut: *“It’s the constant monitoring of the online population through our mobile phones and various social media sites, where stats are gathered on our activity”*². Dalam

2 <https://www.lifestylesmagazine.ca/what-is-datacracy-and-is-it-a-threat-to-democracy/>

konteks pengertian tersebut, maka kecerdasan buatan (AI) akan menjadi paradigma baru dalam mengarahkan gerak dan dinamika sosial politik dan ekonomi masyarakat. Hal ini mengakibatkan algoritma menjadi alat penting dalam memutuskan ke arah mana pembangunan akan dijalankan. Dalam istilah de Kerckhove (2017)³, hal ini disebut sebagai *government by algorithms*.

Berkaitan dengan hal tersebut, akan muncul lebih banyak pertanyaan dibandingkan dengan jawaban. Sebagai contoh adalah pertanyaan yang terkait dengan keuntungan dan kerugian, atau peran dan fungsi pemerintah, intervensi pihak eksternal, atau pertanyaan lain yang lebih teknis menyangkut *know how*-nya. Dalam skala tertentu pertanyaan juga muncul terhadap kesiapan kita, khususnya pemerintah untuk merespons perkembangan datakrasi.

Tulisan pendek ini mencoba untuk membahas tentang kebutuhan dan pemanfaatan data kependudukan di Indonesia. Lebih khusus lagi membahas pada level desa dengan segala dinamika dan implikasinya.

Antara Ketersediaan, Akses, dan Privasi

Isu terkait dengan data yang pertama kali perlu diperhatikan adalah ketersediaan (*availability*). Data kependudukan pada saat ini tersedia relatif lengkap, berasal dari berbagai sumber, misalnya data administrasi kependudukan, data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik, dan dari berbagai instansi teknis. Data yang berasal dari administrasi kependudukan yang dikelola oleh Kemendagri,

3 de Kerckhove, Derrick. 2017. "Mobile Culture in Singapore, from Democrature to Datacracy" dalam Ana Serrano Telleria "Between the Public and Private in Mobile Communication". New York: Routledge pp :25-33.



melalui Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, telah tersedia sampai dengan unit administrasi terkecil. Jika diperlukan, data pada unit administrasi terkecil, yaitu desa/kelurahan, dapat diturunkan lagi pada unit RW atau RT. Kelebihan data ini adalah selain tersedia pada unit administrasi terkecil juga bersifat dinamis. Perubahan setiap waktu tercakup dalam pendataan.

Dirjen Dukcapil mengatakan bahwa mereka juga akan membangun *big data* kependudukan⁴. Meskipun yang dimaksud *big data* dalam hal ini adalah data terkait dengan data kepemilikan penduduk, seperti NPWP, pajak, aset, nomor kendaraan, dan lain sebagainya. Hal ini adalah wujud dari integrasi-integrasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) dengan sistem lain yang tersedia di lembaga terkait lainnya.

Pada dasarnya jika SIAK diintegrasikan dengan sistem informasi data lain yang berasal dari berbagai lembaga teknis lainnya, akan terbentuk sistem yang sangat *powerfull* dan akan membantu pemerintah dalam menjalankan kebijakannya dengan lebih baik. Sebagai contoh, integrasi sistem informasi yang ada di imigrasi dengan SIAK akan memudahkan pemerintah melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap kebijakan tentang migrasi internasional.

Langkah maju dalam rangka integrasi data kependudukan adalah dengan keluarnya Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Regulasi ini membuka peluang untuk mengintegrasikan data kependudukan di Indonesia menjadi sangat besar. Terdapat empat tujuan dalam pengaturan Satu Data Indonesia, sebagaimana

4 <https://www.kominfo.go.id/content/detail/16527/dukcapil-terus-kembangkan-big-data-kependudukan-dan-jaga-kerahasiaan/0/berita>.

tercantum dalam Pasal 2 Ayat 2, yaitu untuk memberikan acuan, mewujudkan ketersediaan data, mendorong keterbukaan dan transparansi, serta mendukung sistem statistik nasional. Secara normatif keempat tujuan tersebut merupakan gambaran ideal tentang pengembangan data kependudukan di Indonesia. Selain itu, pengaturan tentang bagaimana data dikumpulkan dan diakses telah dijelaskan sejak level nasional sampai dengan daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Hal yang menarik dari regulasi ini adalah Pasal 38 yang menyebutkan bahwa data yang telah dikumpulkan *harus dapat diakses melalui portal Satu Data Indonesia*.

Salah satu implementasi dari perpres tersebut adalah integrasi pelaksanaan sensus penduduk tahun 2020 secara *online* oleh BPS dengan data administrasi kependudukan. Harapannya integrasi antara dua sumber data tersebut akan menghasilkan data kependudukan yang lebih lengkap dan terintegrasi. Meskipun demikian, tampaknya belum semua yang diatur di dalam perpres tersebut dapat dilaksanakan. Alasan yang paling sederhana adalah karena perpres baru keluar kurang lebih satu tahun.

Berkaitan dengan akses terhadap data kependudukan, muncul pertanyaan penting, siapa yang memiliki hak untuk mengakses data kependudukan dan pada level apa data tersebut dapat diakses. Pertanyaan pertama penting karena hal ini menyangkut pemanfaatan data, baik untuk kepentingan akademik maupun praktis. Sejauh ini, data yang tersedia sulit untuk diakses, apalagi jika akses diperlukan sampai dengan tingkat desa. Mungkin perlu ditanyakan, apakah desa selama ini telah memanfaatkan sepenuhnya data yang disediakan oleh administrasi kependudukan untuk keperluan pembangunan



di pedesaan? Lebih jauh lagi adalah seberapa besar pemerintah desa memiliki akses terhadap data tersebut?

Data yang mudah diakses adalah data yang telah diolah dan dipublikasikan dalam bentuk agregat. Data individual atau data keluarga, misalnya, masih sangat jarang dimanfaatkan. Padahal, jika data tersebut diintegrasikan dengan data geospasial melalui GIS (*geographic information system*) akan memberikan basis yang kuat dalam penyusunan perencanaan pembangunan di seluruh unit administrasi.

Terdapat paradoks dalam pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan yang sering menimbulkan kesulitan. Pertama, kerahasiaan keterangan yang diberikan oleh penduduk/responden harus dijamin. Hal ini secara eksplisit dicantumkan di dalam UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Pasal 21. Kedua, dalam konteks tertentu, untuk menyusun program atau kegiatan, diperlukan data *by name* dan *by address*. Hal ini menyangkut privasi. Oleh karenanya pemanfaatan data kependudukan perlu mempertimbangkan data apa saja yang dapat digunakan dan oleh siapa.

Isu tentang privasi ini menjadi masalah serius ketika berhubungan dengan data yang berasal dari media sosial. Data pribadi saat ini sangat terbuka dan mudah diakses oleh siapa pun dan untuk kepentingan apa pun. Karakteristik dan kegiatan individu telah menjadi domain publik dan tidak ada regulasi yang dapat atau mampu mencegah. Bahkan mungkin perlu dipertanyakan apakah (memang) diperlukan peraturan untuk mencegahnya?

Orang sering mengatakan bahwa privasi adalah penting. Namun, perkembangan selama ini menunjukkan bahwa orang tidak mampu menjaga privasinya. Eksistensi seseorang menjadi minimal (atau bahkan tidak ada) ketika semakin banyak data personal terbuka di ranah publik. Barangkali pada satu titik hal ini tidak lagi dipersoalkan, atau orang tidak peduli lagi dengan privasi.

Hal menarik yang perlu didiskusikan adalah bagaimana kita dapat memanfaatkan data yang berasal dari media sosial tersebut untuk kepentingan publik. Selama 2 tahun terakhir BPS mulai mengumpulkan dan mengolah data yang berasal dari media sosial untuk melakukan analisis beberapa parameter kependudukan, analisis mobilitas penduduk dengan memanfaatkan data penggunaan *handphone*. Bukan hanya BPS, melainkan juga banyak lembaga pemerintah yang mulai *konsen* terhadap pemanfaatan *big data*. Bahkan ada kecenderungan selama masa pandemik Covid-19 ini pemanfaatan *big data* semakin meluas dan intensif.

Salah satu contoh memanfaatkan *big data* untuk analisis perubahan pola mobilitas penduduk semasa pandemi Covid-19 dilakukan oleh Google. Berikut ini gambar yang diperoleh dari hasil analisis perubahan pola mobilitas penduduk selama periode 22 Mei sampai dengan 7 Juli 2020. Gambar tersebut menunjukkan bahwa penurunan terbesar selama periode tersebut terjadi pada mobilitas penduduk ke transportasi umum dan disusul ke tempat kerja. Data seperti ini sangat sulit diperoleh dari data konvensional yang dikumpulkan dari registrasi penduduk, sensus penduduk, maupun



survei. Bahkan data tersebut dapat di-*breakdown* sampai dengan tingkat provinsi (dan unit administrasi di bawahnya)⁵.

Retail & recreation

-18%

compared to baseline

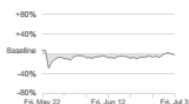


Mobility trends for places like restaurants, cafes, shopping centers, theme parks, museums, libraries, and movie theaters.

Grocery & pharmacy

-2%

compared to baseline



Mobility trends for places like grocery markets, food warehouses, farmers markets, specialty food shops, drug stores, and pharmacies.

Parks

-19%

compared to baseline



Mobility trends for places like national parks, public beaches, marinas, dog parks, plazas, and public gardens.

Transit stations

-37%

compared to baseline



Mobility trends for places like public transport hubs such as subway, bus, and train stations.

Workplaces

-23%

compared to baseline



Mobility trends for places of work.

Residential

+12%

compared to baseline



Mobility trends for places of residence.

Sumber: <https://www.google.com/covid19/mobility/>.

5 Data yang disajikan oleh Google sampai dengan tingkat provinsi yang dari sisi ketersediaan data dapat di-*breakdown* sampai ke unit administrasi di bawahnya.

Mengapa analisis sebagaimana dilakukan oleh Google tidak pernah muncul dari dalam negeri? Alasan yang paling jelas adalah karena kontrol terhadap data tidak berada di tangan kita. Atau alasan lain yang paling elementer adalah tidak ada yang paham tentang keberadaan data tersebut, sekaligus bagaimana mengolah dan menganalisis serta juga alasan-alasan yang lain.

Dari keseluruhan data kependudukan yang sudah dikumpulkan oleh pemerintah sampai dengan saat ini, data mobilitas penduduk nonpermanen sangat kurang. Jika tersedia maka salah satu sumbernya adalah Survei Penduduk Antar-Sensus (SUPAS) 2015 dan survei khusus oleh BPS tentang mobilitas nonpermanen pada daerah tertentu. Padahal data mengenai mobilitas permanen sangat urgen untuk memahami dinamika penduduk di suatu wilayah. Apalagi jika dikaitkan dengan kebijakan PSBB semasa Covid-19 ini.

Data Kependudukan: Konvensional vs *Big Data*

Data kependudukan konvensional yang dimaksud adalah data yang dihasilkan dari tiga sumber data pokok, yaitu registrasi penduduk, survei, dan sensus penduduk. Terlepas dari kelemahan yang ada, data tersebut merupakan data pokok yang tersedia saat ini. Bahkan untuk sampai pada level desa/kelurahan. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, sensus penduduk dan administrasi kependudukan (registrasi penduduk) menyediakan data yang cukup lengkap. Jika berhubungan dengan data agregat di tingkat desa maka tersedia di podes (potensi desa), meskipun tidak dilakukan setiap tahun.



Menurut saya kebutuhan data tersebut untuk tingkat desa/kelurahan sangat mendesak. Jika data tersebut diolah dan disajikan menggunakan sistem informasi geografi maka akan bermanfaat dalam pengembangan DSS (*decision support system*) untuk mendukung *evidence based policy*. Untuk mengimplementasikannya, muncul pertanyaan akses terhadap *raw data*. Ke depan pemerintah harus memfasilitasi pemerintah daerah (termasuk desa/kelurahan) agar dapat memperoleh akses terhadap *raw data* dan mengolah serta menganalisis untuk menyusun DSS. Dalam waktu satu hingga dua tahun ke depan, ketika sensus penduduk 2020 telah selesai dan sesuai dengan mandat Perpres No. 39 tentang Satu Data, maka akan muncul data yang sangat kuat dan komprehensif yang dapat dimanfaatkan untuk menyusun berbagai program dan kegiatan.

Untuk melengkapi data tersebut diperlukan pengumpulan data mobilitas penduduk nonpermanen. Dalam masa pandemi ini kebutuhan data tersebut sangat terasa agar data tersebut dapat digunakan untuk mencegah penyebaran penyakit. Namun, bukan hanya dalam masa pandemi, pada masa normal pun kebutuhan data mobilitas penduduk nonpermanen sangat penting.

Secara operasional, data dapat dikumpulkan di tingkat RT/RW kemudian digabungkan di tingkat desa. Hal ini diperlukan agar permasalahan dan potensi yang ada dapat diidentifikasi sejak di unit terkecil. Untuk mengumpulkan data tersebut tidak membutuhkan kapasitas tertentu karena dapat dilakukan dengan *form* yang sangat sederhana.

Akan tetapi, tidak dapat dilepaskan juga bahwa kapasitas untuk mengolah, menganalisis, dan menyajikan data tersebut masih terkendala, khususnya di tingkat desa/kelurahan. Maka diperlukan *capacity building* untuk sumber daya manusia yang akan menangani data tersebut dan tanggung jawab utamanya ada di tangan pemerintah.

Bagaimana dengan kebutuhan *big data*? Perlahan tetapi pasti, kebutuhan *big data* untuk berbagai keperluan menjadi semakin penting. Idzalika, et.al. (2019)⁶ menyebutkan bahwa *big data* penting dalam kebijakan sosial, khususnya ketika berhadapan dengan krisis dan bencana. Hal yang harus diingat adalah bagaimana *big data* dapat dijadikan bukti dalam penyusunan kebijakan.

Akan tetapi, seberapa penting hal itu, khususnya jika berhubungan dengan aktivitas di tingkat desa/kelurahan? Bagi saya prioritas utama saat ini adalah optimalisasi pemanfaatan data yang telah tersedia saat ini, terutama yang dikumpulkan oleh lembaga yang memang memiliki tugas mengumpulkan data kependudukan, yaitu Kementerian Dalam Negeri dan BPS, serta lembaga lain yang terkait.

Saat ini Indonesia seperti berpijak pada dua sisi ekstrem. Di satu pihak masih harus berkutat dengan ketersediaan, kualitas, dan aksesibilitas data, tetapi di pihak lain telah dituntut untuk mengakselerasi pemanfaatan *big data* yang bersumber dari media sosial. Maka diperlukan prioritas dengan tidak meninggalkan kepentingan yang lain, yaitu memanfaatkan *big data*.

6 Idzalika, Rajius; Zakiya Pramestri; Imaduddin Amin; Yulistina Riyadi and George Hodge. 2019. *Big Data for Population and Social Policy*. Diunduh pada tanggal 8 Juli 2020 dari <https://pulseselabjakarta.org/assets/uploadworks/2019-01-24-08-58-31.pdf>.



Penutup

Terdapat lima elemen penting dalam diskusi mengenai data kependudukan, yaitu ketersediaan, kelengkapan, kualitas, akses, dan pemanfaatan. Data telah tersedia, tetapi untuk jenis tertentu belum mencakup sampai di level administrasi yang paling rendah. Pada saat yang sama kualitas data masih belum optimal dan butuh untuk segera diperbaiki. Dari sisi akses, data masih sangat sulit untuk diakses, khususnya dikaitkan dengan kebutuhan data di tingkat desa/kelurahan. Mengenai pemanfaatan, data masih kurang dimanfaatkan. Meskipun demikian dengan segala kekurangan yang ada, data kependudukan yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk membangun DSS, bahkan sampai di tingkat desa/kelurahan. Tampaknya hal ini yang perlu untuk dijadikan prioritas.

Di sisi yang lain, kepentingan untuk menggunakan *big data* menjadi kebutuhan untuk merespons dinamika masyarakat. Implementasi pemanfaatan *big data* terkendala oleh kapasitas yang masih timpang antarwilayah. Untuk itu sangat penting program *capacity building* bagi pemangku kepentingan, khususnya di tingkat desa/kelurahan. Dalam hal perolehan data, diperlukan *public private partnership*, dengan memperhatikan bahwa yang memproduksi *big data* adalah sektor swasta.

Profil Penulis

Meski dikenal sebagai pakar migrasi dan kependudukan, tetapi ia juga *konsen* pada pentingnya pengelolaan data. Baginya, data kependudukan berperan penting dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah, mulai tingkat pemerintah desa hingga pemerintah pusat. *Konsen* tersebut tentu tidak lepas dari pengalamannya memimpin Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM).

Dr. Sukamdi, M.Sc. dipercaya menjadi kepala PSKK UGM dalam dua periode di rentang 2002 hingga 2006. Selama periode tersebut, salah satu prestasinya adalah saat mendapat kepercayaan dari Bank Dunia untuk mengelola beberapa program berskala besar, kerja sama yang makin memperkaya pengalamannya di bidang kependudukan dan pembangunan. Bidang yang telah ia tekuni sejak masih kuliah. Menempuh sarjana di Fakultas Geografi UGM, ia lalu melanjutkan studi master di Population Studies, Florida State University, Amerika Serikat. Gelar doktor, Sukamdi kenakan sejak 2013, setelah lulus dari Radboud University, Nijmegen, Belanda, untuk bidang migrasi dan kependudukan. Sepulang dari Belanda, ia kembali aktif mengajar sebagai dosen di almahaternya, profesi yang telah ia jalani sejak 1986.





Transformasi Data untuk Memerangi Korupsi

Mochamad Hadiyana

Transformasi Digital

Teknologi digital adalah salah satu pilar utama pembangunan peradaban manusia saat ini. Tidak ada satu pun sektor pembangunan nasional yang tidak memerlukan penggunaan teknologi digital. Saat ini kita berada pada era digitalisasi atau era transformasi digital, yaitu era ketika kita menggunakan teknologi-teknologi digital baru yang muncul dengan cepat untuk membantu

kita memecahkan berbagai permasalahan. Ini adalah proses transformasi dari proses manual ke proses digital. Salah satu contoh transformasi digital adalah *cloud computing*. *Cloud computing* adalah teknologi baru untuk mengurangi ketergantungan pada *hardware* yang dimiliki pengguna dan meningkatkan ketergantungan pada layanan *cloud* berbasis langganan.

Transformasi digital ini harus mampu memberi nilai tambah bagi masyarakat luas sehingga bisa menjadi sarana penting dalam proses transformasi Indonesia menjadi bangsa yang maju. Transformasi yang dapat menghasilkan masyarakat cerdas yang akan bergerak bersama membangun gerakan siswa cerdas, gerakan guru cerdas, gerakan pesantren cerdas, gerakan petani cerdas, gerakan aparat cerdas, gerakan nelayan cerdas, dan lain-lain untuk membentuk *smart village*, *smart city*, dan *smart nation*.

Contoh transformasi digital:

1. penggunaan sensor inframerah yang terkoneksi dengan *internet of things* yang hidup 24 jam yang dapat menangkap kedatangan tamu tak diundang (binatang buas atau pencuri), tanda-tanda bencana alam, kerusakan irigasi, dan lain-lain;
2. penggunaan papan informasi elektronik di depan kantor kepala desa yang menayangkan berbagai informasi elektronik tentang profil utama desa, seperti peta desa, jumlah dan komposisi penduduk, jumlah pendaftar menginap, berbagai kegiatan, peraturan desa yang baru, laporan panen harian dan lumbung desa, berita kelahiran atau kemalangan, penerimaan dan penggunaan dana desa, dan lain-lain;



3. sarana digital, seperti peralatan *internet of things* yang ditanam dalam sistem pertanian, pertambakan dan pertambangan, misalnya sistem pemberian pakan ikan kolam besar.

Adapun manfaat transformasi digital di desa:

1. dapat menyetarakan pola kehidupan berbasis digital masyarakat desa dan masyarakat kota;
2. dapat menghapus dikotomi orang desa dan orang kota, menghapus kesenjangan gaya hidup tradisional dan modern;
3. dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa;
4. dapat meningkatkan produktivitas, kesehatan, dan kebahagiaan penduduk desa;
5. dapat menciptakan perkembangan ekonomi desa untuk menghapus keinginan urbanisasi;
6. berpartisipasi dalam menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
7. dan lain-lain.

Saat ini kita berada pada masa pandemi Covid-19. Pada masa pandemi ini masyarakat Indonesia dipaksa untuk mempercepat transformasi digitalnya karena banyak orang saat ini terjebak di rumah akibat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan membutuhkan internet yang lebih cepat untuk bekerja dan belajar.

Sebelum wabah terjadi, sebagian besar koneksi internet digunakan oleh dunia usaha dan pemerintahan di kantor-kantor. Ini juga digunakan di dunia pendidikan mulai dari sekolah sampai

universitas. Sejak wabah Covid-19 dimulai di Indonesia pada awal Maret, lebih banyak permintaan akses internet dari rumah tangga, termasuk yang dari daerah pedesaan.

Dalam menghadapi masa pandemi Covid-19 ini sejumlah daerah sudah melaksanakan PSBB. Kebijakan PSBB membatasi aktivitas masyarakat termasuk di sektor ekonomi karena hanya bidang tertentu yang boleh beroperasi selama PSBB. Pandemi Covid-19 melahirkan kebiasaan baru bagi masyarakat, yakni meminimalkan kontak langsung. Karena itu peran teknologi digital sangat membantu masyarakat melakukan kebiasaan ini. Masa pandemi ini merupakan momentum untuk mendorong percepatan transformasi digital. Selama PSBB, infrastruktur dan layanan digital menjadi tulang punggung berbagai kegiatan produktif, seperti bekerja dan belajar dari rumah. Bahkan perdagangan elektronik mampu menjadi penggerak ekonomi di tengah pandemi.

Transformasi Data

Transformasi digital ini menghasilkan data. Ada banyak satelit di luar angkasa yang mengelilingi bumi. Satelit-satelit tersebut melihat dan memantau data bumi selama 24 jam sehari. Data dihasilkan dalam jumlah sangat besar dari sistem ini. Bank juga mengakumulasi sangat banyak data tentang aktivitas pengeluaran dan aktivitas kartu kredit. Catatan medis yang terdiri dari rekam medis digital atau obat-obatan di pelosok negeri juga menghasilkan data dalam jumlah besar. Begitu pula penggunaan ponsel yang menghasilkan banyak data dalam bentuk teks, suara, video, dan data lainnya. Ini semua adalah contoh-contoh bagaimana teknologi digital menghasilkan data yang sangat besar.



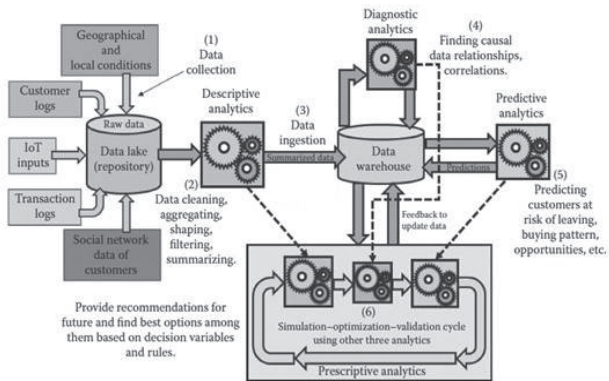
Pada tahun 2017, ketika belum terjadi pandemi Covid-19, setiap hari penggunaan internet menciptakan 2,5 *quintillion bytes* data—yaitu 2,5 miliar miliar *bytes* data. Data ini dihasilkan oleh sensor, perangkat bergerak seluler, transaksi, dan *social networking* setiap hari. Pada tahun 2020, saat terjadi pandemi Covid-19, jumlah data yang dihasilkan lebih besar dari itu.

Sekarang, pertanyaannya adalah apa yang akan kita lakukan dengan data yang begitu banyak? Ada begitu banyak data, tetapi banyak orang tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dengan data itu. Padahal kalau kita mengumpulkan data dan melakukan pengolahan serta analisis, kita dapat melihat pola data yang mungkin tidak disadari berupa informasi bernilai yang dibutuhkan atau diperlukan.

Data digital yang sangat banyak yang dihasilkan oleh aktivitas manusia merupakan sumber daya yang sangat berharga—setidaknya secara teoretis. Dalam praktiknya, sumber daya data yang terus berkembang ini belum dimanfaatkan secara maksimal saat ini. Terkait dengan ini, transformasi digital akan lebih berhasil jika kita melakukan transformasi data. Dalam konteks ini, transformasi data tidak hanya mencakup proses tradisional “mengekstrak, mengubah, memuat” dalam pengumpulan, pembersihan, pemformatan ulang, dan penyimpanan data. Ia juga mencakup analisis dan pemanfaatan selanjutnya dari data yang telah dikumpulkan atau sedang dikumpulkan untuk menghasilkan informasi dalam rangka pengambilan keputusan.

Transformasi Data dengan *Big Data Analytics*

Transformasi data dilakukan menggunakan alat-alat dalam *big data analytics*. Berikut adalah kerangka kerja arsitektur *big data analytics*:



Gambar 1 Kerangka Kerja Arsitektur *Big Data Analytics*

(Sumber: <https://social-media-strategy-template.blogspot.com/2018/03/big-data-analytics-architecture.html>)

Sebelum proses analisis data dimulai, data yang relevan dikumpulkan dari berbagai sumber (tahap 1). Data mentah dikumpulkan dalam repositori yang dikenal sebagai *data lake*. Data mentah kemudian diproses dengan menggunakan alat dan teknik analisis deskriptif untuk menyaring dan meringkasnya. Analitik deskriptif menjadikan data dapat digunakan oleh manusia dan alat analisis lainnya. Data yang diproses dan diringkas disimpan dalam *data warehouse* (tahap 3). Analitik diagnostik menggunakan

data yang diproses yang telah disimpan dalam *data warehouse* dan menurunkan hubungan kausal dan korelasi yang melekat dalam data (tahap 4). Temuan ini disimpan kembali dalam *data warehouse* untuk digunakan sebagai analisis prediktif dan preskriptif. Analitik prediktif menggunakan data yang diringkas dan dibersihkan yang tersimpan dalam *data warehouse* disertai dengan korelasi dan hubungan sebab akibat yang dihasilkan oleh analitik diagnostik. Ini kemudian memberikan prediksi dan estimasi masa depan yang kemudian disimpan kembali dalam *data warehouse* (tahap 5).

***Big Data Analytics* untuk Memerangi Korupsi**

Big data analytics dapat digunakan untuk menyisir informasi dan menemukan detail rumit yang lepas dari pengamatan manusia. Sebagai contoh, Panama Papers dapat ditulis karena jurnalis menggunakan *big data* untuk menganalisis lebih dari 11.000 dokumen. Selain itu, *big data analytics* dapat menilai beberapa sumber informasi yang berbeda untuk menemukan tren yang mudah terlewatkan oleh kita. Sebagai contoh, Komisi Eropa dan Transparansi Internasional menggunakan perangkat lunak *big data analytics* milik mereka untuk membandingkan data dari lembaga swasta dan lembaga publik untuk menemukan penyimpangan, konflik kepentingan, dan tanda-tanda perilaku korup lainnya. Kemampuan menganalisis dan membandingkan berbagai sumber informasi adalah salah satu keuntungan terbesar dari *big data analytics*.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga sudah mulai membangun infrastruktur *big data analytics* pada tahun 2019 untuk

mendeteksi penyimpangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Dengan data-data internal, seperti LHKPN, pengaduan masyarakat, pelaporan gratifikasi, dan data eksternal, seperti data kependudukan, administrasi hukum umum, dan lain-lain. serta dengan menggunakan *hardware*, *software*, dan aplikasi *big data* yang KPK kembangkan akan dapat diperoleh informasi yang berharga terkait tindak pidana korupsi.

Aplikasi-aplikasi *big data analytics* KPK terus dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya agar menghasilkan analisis yang semakin akurat. Hasil analisis ini nantinya dapat digunakan sebagai upaya pencegahan korupsi dan juga dapat digunakan mengembangkan kasus untuk penindakan.

Sumber data eksternal untuk *big data analytics* KPK berasal dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Administrasi Hukum Umum, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pertanahan Nasional, Dinas Pendapatan Daerah, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan lain-lain.

Ke depan, KPK juga akan mengintegrasikan data yang terkumpul melalui aplikasi JAGA. KPK meluncurkan aplikasi JAGA pada Desember 2016. JAGA adalah aplikasi pencegahan korupsi yang mendorong transparansi penyelenggaraan pelayanan publik dan pengolahan aset negara. JAGA melibatkan peran masyarakat guna memantau, mengusulkan perbaikan, dan melaporkan penyimpangan. JAGA juga mendorong dan melibatkan pemerintah untuk merespons *feedback* dari masyarakat. Aplikasi JAGA bisa



diunduh melalui PlayStore pada telepon seluler berbasis Android atau AppStore pada telepon berbasis iOS. Aplikasi atau layanan ini adalah salah satu bentuk dorongan yang juga melibatkan pemerintah untuk mendengarkan dan memberikan respons atas tanggapan dari masyarakat.

Sementara itu, KPK juga telah membuat sebuah portal informasi publik mengenai pencegahan korupsi yang diberi nama Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesia (JAGA.ID). Portal dibangun guna mendorong partisipasi, akuntabilitas, respons, dan transparansi dari pemerintah dan masyarakat. Pada 2016 hingga akhir 2018, situs resmi JAGA.ID menampilkan informasi dan diskusi terkait sejumlah sektor pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, desa, dan perizinan.

Seiring dengan pengembangan JAGA versi gawai, laman JAGA.ID kemudian dioptimalkan dengan adanya tambahan informasi seputar aplikasi pencegahan korupsi milik KPK yang dirangkum dalam menu “Jendela Daerah”. Menu ini bagaikan etalase untuk melihat daerah di seluruh Indonesia yang berisikan informasi seputar aksi pencegahan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara rinci.

Pada 29 Mei 2020, aplikasi JAGA ditambah fitur JAGA Bansos. Ini adalah suatu upaya tambahan yang dilakukan KPK dalam melakukan langkah-langka antisipatif pencegahan korupsi. KPK telah memitigasi titik-titik rawan korupsi dalam penanggulangan Covid-19.

Tantangan yang Dihadapi

Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan *big data analytics* dengan hasil analisis berkualitas baik. Tantangan-tantangan tersebut di antaranya adalah:

1. Data dengan berbagai format dari berbagai sumber. Potongan data yang berbeda format dari berbagai sumber sering kali disimpan dalam sistem yang berbeda. Menggabungkan data secara manual memakan waktu. Hal ini memerlukan upaya standarisasi format data agar tidak mengarah pada analisis yang tidak lengkap atau tidak akurat.
2. Data yang tidak dapat diakses. Memindahkan data ke dalam satu sistem terpusat akan berdampak jika data tidak mudah diakses oleh orang yang membutuhkannya. Mengakses informasi harus menjadi bagian termudah dari analitik data.
3. Kualitas data yang buruk. Tidak ada yang lebih berbahaya bagi analisis data selain data yang tidak akurat. Tanpa input yang baik, *output* tidak akan dapat diandalkan. Penyebab utama dari data yang tidak akurat adalah kesalahan manual yang dibuat selama entri data. Ini dapat menyebabkan konsekuensi negatif yang signifikan jika analisis digunakan untuk mengambil keputusan.

Data Terbuka sebagai Salah Satu Solusi

Data terbuka atau data yang tersedia secara bebas untuk diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat adalah prasyarat untuk berjalannya *big data* deteksi korupsi. Diperlukan peningkatan transparansi di setiap instansi pemerintahan. *Open data* akan memudahkan



masyarakat melihat penyimpangan dan menyampaikannya kepada KPK untuk analisis. Hasil analisis bisa digunakan untuk pencegahan dan penindakan.

Untuk menghasilkan analisis *big data* yang akurat diperlukan identifikasi kumpulan data yang relevan. Data tersebut harus mudah diakses dan dimanfaatkan. Dan ini bisa terwujud jika dilakukan pemberdayaan para pengguna data.

Aplikasi JAGA adalah contoh platform dengan data terbuka untuk memberdayakan masyarakat dalam pengumpulan data. Data dari aplikasi JAGA yang berasal dari masyarakat dianalisis untuk upaya pencegahan korupsi berupa rekomendasi kepada instansi terkait agar tidak terjadi korupsi. *Output* dari aplikasi ini juga dapat dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum, jurnalis, akademisi, komunitas IT, dan masyarakat umum. Sebagai umpan balik mereka juga dapat memberikan data tambahan atau data hasil penelitian.

Jakarta, 9 Juli 2020.

Profil Penulis

Ia turut berjasa dalam penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan persyaratan teknis untuk bidang telekomunikasi. Cakupannya meliputi pengujian, sertifikasi, dan penetapan laboratorium uji dalam negeri. Sejak 2017, Mochamad Hadiyana berhasil menumbuhkan

tujuh laboratorium. Sehingga, kini ada sembilan laboratorium uji dalam negeri. Hasil uji laboratorium itulah yang kemudian menjadi rujukan sertifikasi perangkat telekomunikasi di Indonesia.

Pengalaman tersebut juga mendapat pengakuan laboratorium uji luar negeri. Sehingga persyaratan teknis dan sertifikasi yang dirumuskannya, dapat digunakan untuk memenuhi standar internasional perangkat telekomunikasi yang diproduksi. Dan operator telekomunikasi juga dapat mengukur standar kualitas layanannya untuk dipublikasikan kepada masyarakat.

Selain itu, mulai 2018, Hadiyana berkiprah pula dalam pengembangan ekosistem *Internet of Things* bersama para pemangku kepentingan. Serta turut andil mengembangkan regulasi pengendalian perangkat seluler melalui IMEI. Kini, ia dipercaya menjadi Deputy Bidang Informasi dan Data di Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah ia jalani sejak April 2020.





Reformasi Manajemen Data Desa⁷

Dr. Ivanovich Agusta

Dalam aspek kebudayaan, data adalah hal yang penting. Data menunjukkan wajah desa. Sebelum adanya data atau ketika data tidak ada, desa bagai tidak berwajah atau—setidaknya—wajah desa tersembunyi. Data desa yang timbul tenggelam tiap tahunnya membuat desa seperti berada dalam kegelapan. Datakrasi desa adalah persoalan moral, bagaimana menjadikan desa menjadi lebih transparan, akuntabel, dan tanpa korupsi.

Meskipun memiliki peran penting, pengelolaan data di Indonesia belum dilakukan secara maksimal. Tata kelola data masih

7 Disarikan oleh Diah Rizki Fitriani.

belum terintegrasi dengan baik. Oleh karena itu, desa semestinya bisa menjadi pintu utama dalam memperbaiki sistem pemanfaatan dan pengelolaan data.

Berikut ini adalah perbandingan soal input data bantuan sosial yang ada di desa dengan yang ada di kabupaten. Kebutuhan jasa Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk pusat adalah 52,9 juta KK. Sedangkan jumlah KK yang ada di Indonesia adalah 70 juta KK. Data yang sudah tersedia adalah 26,9 juta KK. Artinya ada kebutuhan 26 juta KK untuk dimasukkan ke sistem. Jika jumlah ini dibagi dengan jumlah kabupaten atau kota di Indonesia maka tiap daerah harus memasukkan sekitar 53 ribu KK. Karena pendataan dalam bentuk aplikasi, jika dalam satu menit bisa memasukkan satu KK maka dalam sehari perlu memasukkan 420 KK. Jika dihitung dengan jumlah jam kerja maka proses *input* data ini akan memakan waktu sekitar 127 hari atau 18 minggu. Namun, yang terjadi ketika proses *input* data dilakukan dari desa maka akan ada rata-rata 347 KK yang dapat di-*input* dalam sehari. Itulah kelebihan jika proses pendataan dilakukan dari desa. Seberapa besarnya data, apabila proses *input*-nya dilakukan dari lokus terkecil, yaitu desa maka akan berwujud sebagai kerja yang ringan. Misalkan kita mengambil perkiraan alur sibuk desa terjadi sekitar bulan Juni atau Juli. Maka ada waktu kosong pada kurun waktu bulan Januari sampai Mei untuk melakukan kegiatan pendataan. Kegiatan pendataan ini juga akan menjadi lebih mudah jika melibatkan perangkat teknologi informasi. Namun, kendalanya adalah berdasarkan data BPS pada tahun 2019, ada sekitar 11 ribu desa yang belum memiliki akses terhadap internet.



Aspek penting dalam pengambilan data dari desa adalah yang pertama, data tersebut bersifat praktis, bukan salon akademik. Data yang diambil benar-benar dapat dipergunakan. Kemudian, data yang diambil dari desa bersifat valid. Data dari desa lebih cocok ketika digunakan karena faktor kedekatan personal masyarakat sehingga membuat data lebih valid dan terpercaya. Hal tersebut juga didukung dengan pengetahuan mendalam tentang aspek lokalitas dan kejujuran partisipannya. Saat ini banyak orang di desa yang paham dan berpengalaman dalam pendataan.

Aspek ketiga yang juga penting adalah data yang telah diambil dengan baik tersebut menjadi hak milik desa. Meskipun data tersebut digunakan dalam level administrasi yang lebih tinggi, tetapi hal itu hanya digunakan untuk melihat cakupan data dan tidak untuk level penyuntingan data konkret. Dari cara seperti itu maka Kementerian Desa dapat menggunakan sensus partisipatoris sebagai aspek penting keempat dalam pengambilan data desa.

Pertumbuhan Data

Seiring dengan perkembangan desa, data terus tumbuh. Indikasi yang bisa dilihat terkait dengan pertumbuhan data adalah dengan instrumen pendataan desa yang berkembang sesuai tren lapangan dan kemajuan zaman. Sebagai contoh, jika kita mengambil kuesioner tentang desa dalam kurun waktu 1970 sampai dengan sekarang maka kita akan mengetahui bahwa pada kisaran tahun 1990-2000, pertanyaan-pertanyaan yang acap dijumpai di desa adalah, “Apakah ada penjual VCD?” dan lain sebagainya. Berbeda dengan saat ini, pertanyaan-pertanyaan seperti itu sudah tidak akan kita temui

lagi bila kita berkunjung ke desa. Sebagai gantinya, pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah pertanyaan tentang PAUD, misalnya, yang tentu saja pada zaman dulu tidak ada. Selain itu, ada juga pertanyaan tentang berapa warga yang memiliki akses internet, berapa yang memiliki ponsel, dan lain sebagainya. Dari situ dapat diketahui bahwa sebenarnya data itu bertumbuh.

Dengan adanya pertumbuhan data maka muncul pula berbagai permasalahan. Masalah pertama yang muncul adalah bagaimana data lama dan data baru itu tetap ada dan terjaga. Lalu yang kedua, bagaimana komunikasi terkait dengan pertumbuhan data ini terkoneksi, baik komunikasi antara data baru dan data lama, maupun komunikasi antarlembaga yang menggunakan data tersebut. Maka dari itu, aplikasi dan instrumen harus terus berkembang seiring perkembangan desa dan perkembangan pemikiran tentang desa. Pengolahan data yang baik penting untuk diupayakan agar data-data ini saling terintegrasi.

Komunikasi Data

Dengan terus bertumbuhnya data dari desa, sistem informasi yang terintegrasi dari desa hingga kementerian perlu dikembangkan. Sehingga ke depannya, data yang dikelola akan bisa melahirkan beragam kebijakan strategis, baik di level pemerintahan desa maupun di tingkat pemerintahan pusat.

Jika kita sedikit menarik ke belakang untuk membaca sejarahnya, ada *lovelace* bahwa ada sebuah mesin yang bisa mengomunikasikan data statistik, gambar, dan tanda-tanda lainnya. Hal inilah yang kita sebut sebagai *big data*. Selain jumlahnya yang besar, bentuk dalam *big*



data juga beragam, di antaranya statistik, gambar, video, peta yang dikumpulkan, dan dianalisis dari desa. Dalam era *big data*, data yang berserak begitu banyak kemudian dikumpulkan dalam satu tempat.

Dengan adanya *big data*, komunikasi antara desa dengan lembaga lain maupun komunikasi data lama dengan data baru dapat diakses dengan lebih mudah. Desa dapat menyampaikan data-data yang dapat dikompilasi untuk memperlihatkan wajah desa dari kabupaten, provinsi, hingga ke pusat.

Sistem Informasi Desa

Kementerian Desa sedang mengembangkan ide sistem informasi desa, di mana satu aplikasi untuk semua. Di dalam sistem yang sedang disusun ulang tersebut, ada beragam fitur yang menunjukkan kebutuhan data di dalam aplikasi tersebut. Ketika masuk dalam aplikasi yang sedang dibangun ini maka kondisi desa dapat dengan mudah diketahui. Oleh karena itu, aplikasi ini akan membutuhkan banyak data. Aspek utama yang ada dalam aplikasi ini adalah fasilitas terdekat dari desa, rekap informasi desa, dan berita-berita dari desa.

Aplikasi yang serupa terdapat pada web Pusat Data Desa Indonesia (PDDI Kemendesa), yang dapat diakses melalui pddi.kemendesa.go.id. Berbeda dengan aplikasi yang sedang disusun ulang, PDDI Kemendesa berbasis web dan rencananya akan ditambahkan kemampuan komunikasi antara desa dan daerah dalam aplikasi milik Kemendesa ini.

Ketika membuka halaman utama aplikasi nanti, pengguna dapat memasukkan nomor induk kependudukan di kolom yang

sudah ada dan secara otomatis pengguna akan terhubung dengan desanya. Dari situ, pengguna dapat memanfaatkan aplikasi tersebut untuk meminta layanan publik meskipun ia berada di luar kota. Selain untuk mengakses pelayanan publik, kita juga dapat memantau kondisi keluarga kita melalui nomor NIK dan KK.

Jika NIK yang dimasukkan adalah NIK milik sekretaris desa maka pengguna tersebut akan dapat (memiliki wewenang) memperbaiki aplikasi pada level desanya. Sedangkan jika NIK yang dimasukkan adalah NIK milik anggota karang taruna atau BUMDes maka pengguna dapat meng-*update* atau masuk ke dalam menu yang berkaitan dengan karang taruna atau BUMDes.

Bagi pendamping desa, aplikasi ini bersifat *self report*. Maka dari itu, harapan untuk ke depannya, pendamping desa tidak hanya mengetahui kondisi desa dampungannya, tetapi juga dapat mendampingi lurah atau kepala desanya. Pendamping desa tidak akan lagi kerepotan dengan pelaporan karena hal tersebut akan dilakukan oleh sistem secara otomatis. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi agar laporan dari desa cukup satu atau dua lembar saja.

Aplikasi sistem informasi desa dapat dengan mudah dikembangkan karena kaitannya dengan isi yang ada dalam Undang-Undang Desa dan berbagai peraturan lain yang membuat Kemendesa lebih leluasa untuk mengembangkan sistem informasi desa secara lebih lanjut.



Reformasi Manajemen Data Desa

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 yang mengatur tentang pengukuran pencapaian target dengan menggunakan indikator dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable developments goals/SDGs*), reformasi manajemen data desa—termasuk pengembangan aplikasi sistem informasi desa—sangat perlu dilakukan. Hal ini diupayakan agar potensi yang dimiliki desa dapat dipetakan dan disusun dengan baik dan rapi. Data yang terkumpul akan dipergunakan sebagai bahan pendampingan perencanaan pembangunan desa agar dana desa yang telah digulirkan tepat sasaran.

Selanjutnya, reformasi manajemen data desa ini nantinya akan memberi dampak positif dalam usaha penurunan kemiskinan, *stunting*, dan berbagai permasalahan lain terkait sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi, seperti yang ada dalam tujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan yang dilokalkan menjadi SDGs Village atau SDGs Desa.

Tujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan itu di antaranya adalah desa tanpa kemiskinan; desa tanpa kelaparan; kehidupan desa sehat dan sejahtera; pendidikan desa berkualitas; desa berkesetaraan gender; desa layak air bersih dan sanitasi; desa berenergi bersih dan terbarukan; serta pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi desa. Selain itu ada juga industri, inovasi, dan infrastruktur desa; berkurangnya kesenjangan desa; pemukiman berkelanjutan di desa; konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan; penanganan desa dalam perubahan iklim; ekosistem lautan sekitar desa; juga ekosistem daratan sekitar desa. Dua tujuan terakhir dari tujuan

pembangunan berkelanjutan desa adalah perdamaian, keadilan dan kelembagaan desa yang kuat; serta kemitraan desa untuk mencapai tujuan pembangunan.

Tujuh belas tujuan di atas akan membantu pemerintah untuk meningkatkan kualitas dana desa dengan lebih akurat dan mutakhir, termasuk soal keluarga penerima manfaat (KPM).

Data Desa dan Pandemi Covid-19

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam penanganan pandemi Covid-19 mengambil tindakan untuk menggunakan reformasi manajemen data desa menggunakan alokasi dana desa sebagai upaya perencanaan pembangunan desa.

Ketika pandemi Covid-19 terjadi, pengambilan data untuk pemberian bantuan lebih mudah karena diambil langsung dari desa. Bantuan sosial yang dikucurkan oleh pemerintah, jika sesuai data yang di-*input* maka dana tersebut mencakup hampir 85 persen dari jumlah keluarga di Indonesia. Maka tidak perlu ada kekhawatiran bahwa angka kemiskinan naik sekitar 4-5%, karena bantuan sosial sudah siap sampai 70% untuk warga. Sistem pendataan BLT dana desa telah sesuai kesepakatan dengan indikator berbasis RT yang dilakukan oleh Relawan Desa Tanggap Covid-19.

Seluruh sistem pengelolaan data desa akan direformasi secara perlahan, dimulai dari cara desa memandang era *big data*, sampai dengan sikap dan paradigma masyarakat yang memiliki dampak *sistemik* pada perilaku bermasyarakat.



Profil Narasumber

Ikatan emosionalnya pada desa telah terjalin sejak lama. Ia menempuh pendidikan sarjana di Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan konsentrasi penyuluhan dan komunikasi pertanian. Bidang yang membuatnya mesti blusukan ke desa-desa. Dan pengalaman tersebut kemudian menjadi bekalnya meraih gelar master dan doktor di bidang sosiologi pedesaan di kampus yang sama.

Dr. Ivanovich Agusta, SP. M.Si. juga sangat peduli dengan persoalan kemiskinan di desa. Kepedulian tersebut ia tuangkan dalam buku *Diskursus, Kekuasaan, dan Praktik Kemiskinan di Pedesaan*. Menurutnya, ada peran implikasi dan komplikasi sosial, ekonomi, serta politik yang menyertai kemiskinan di desa. Baik hal itu terjadi di ranah kekuasaan, maupun pada tataran kehidupan masyarakat.

Kini, ia sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi. Salah satu kewenangannya adalah mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi dari desa hingga kementerian. Sehingga ke depan, data yang dikelola akan bisa melahirkan beragam kebijakan strategis. Baik di level pemerintahan desa, maupun di tingkat pemerintah pusat.



Mewujudkan Desa Berdana, Berdata, dan Berdaya⁸

Budiman Sudjatmiko

Manusia lahir dalam keadaan merdeka dan harus mati dalam keadaan merdeka pula. Merdekanya manusia, tentu ditandai dengan kondisinya yang berdana, berdata, maupun berdaya. Jika tiga aspek ini terpenuhi maka kita akan merdeka dalam keadaan apa pun, baik itu normal maupun abnormal.

8 Disarikan oleh Rofi Ali Majid.

Sepanjang era modern ini, kita kerap dilema dalam memandang konsentrasi kekayaan dan distribusi kekayaan. Di satu sisi, kita mengamini perlunya konsentrasi kekayaan untuk mengumpulkan modal, sehingga investasi dapat berjalan lancar agar tercipta kegiatan dan pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi lain, demokrasi dan kohesi sosial bergantung pada distribusi kekayaan yang lebih adil.

Hadirnya teknologi *artificial intelligence* dan mulai terasanya dampak pemanasan global menjadi ancaman tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Teknologi *artificial intelligence* diprediksi akan menggusur para pekerja karena dirasa lebih hemat dalam hal anggaran biaya, sementara pemanasan global membuat produktivitas pertanian menjadi tak menentu. Dampak destruktif dari dua faktor tersebut nyatanya datang lebih awal dari yang diprediksi—ditandai dengan hadirnya pandemi Covid-19, di mana berita mengenai pemutusan hubungan kerja dan berita buruk lainnya bertebaran di media massa.

Di awal, saya ingin menekankan kembali bahwa Kongres Kebudayaan Desa 2020 adalah sebuah momentum yang harus kita manfaatkan untuk membaca apa saja yang harus desa-desa lakukan dalam kondisi *new normal* ini. Akibat bencana pandemi Covid-19, banyak hal yang tak bisa lagi dikerjakan secara langsung oleh masyarakat, baik itu belajar, bekerja, berkebudayaan, beribadah, dan sebagainya.

Ada beberapa wacana yang muncul terkait dengan pengondisian ekonomi selama masa pandemi berlangsung, salah satunya adalah pemberian dana jaminan hidup kepada masyarakat yang kini kita

sebut sebagai *universal basic income*. Sayangnya pemberian dana macam ini hanyalah langkah instan untuk keadilan ekonomi dan seperti kebanyakan hal instan, tentu konsep tersebut memiliki beberapa kelemahan. Semisal, bagaimana mungkin kita memberikan dana tunai kepada masyarakat sementara itu hanya akan melonggongkan posisi masyarakat sebagai konsumen, lantas uang tadi kembali mengalir ke puncak piramida pemilik modal. Dalam hal ini jelas bahwa memberikan uang tunai kepada masyarakat adalah hal yang tak progresif. Meminjam sebuah peribahasa, “Lebih baik mengajari seorang pria bagaimana cara menangkap ikan, ketimbang memberinya ikan.”

Kita memerlukan sebuah konsep di mana masyarakat bukan hanya berdana, melainkan juga berdata dan berdaya. Kita memerlukan sebuah kerangka di mana masyarakat dapat memiliki akses untuk menuju kondisi ekonomi dan sosial yang lebih baik. Maka untuk mencapai semua itu, saya lebih bersepakat dengan memanfaatkan *universal basic asset* alih-alih *universal basic income*.

Dalam konsep *universal basic asset*, masyarakat bukan hanya diberikan dana jaminan hidup, melainkan juga aset-aset lain yang memungkinkan masyarakat untuk mengelola aset tersebut, sehingga dapat terwujud masyarakat yang berdaya dan merdeka. Dalam konsep ini, *universal basic income* hanyalah bagian kecil dari *universal basic asset*. Lantas apa saja aset yang harus diberikan kepada masyarakat selain dana?

Ada setidaknya delapan aset dalam konsep *universal basic asset* yang terdiri dari kepemilikan ruang, sumber daya alam, infrastruktur,



dana, data, pengetahuan, komunitas, dan kekuasaan. Dari beberapa aset universal ini, kalau masyarakat hendak *berdana* maka harus ada kapital; jika hendak *berdata* maka harus ada data dan ilmu pengetahuan; dan untuk bisa *berdaya* maka harus ada komunitas dan kekuasaan berserta ruang juga infrastrukturnya. Dalam delapan aset yang telah disebutkan tadi, ada tiga jenis kepemilikan dalam masyarakat, yakni kepemilikan pribadi, kepemilikan pemerintah (desa), dan kepemilikan bersama.

Sebenarnya desa-desa di Indonesia telah memiliki beberapa aset tersebut, semisal aset *power* atau kekuasaan yang sifatnya publik. Hal ini dimanifestasikan dalam Undang-Undang Desa di mana masyarakat dan pemerintahan desa memiliki kewenangan untuk mengelola desanya secara mandiri. Untuk aset dana, setiap desa juga telah dilimpahkan modal tunai dalam bentuk dana desa.

Masalahnya adalah aset-aset tadi berserakan bahkan sejak sebelum adanya pandemi. Ada banyak aset data, tetapi tidak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga data hanya menjadi data mati. Ada aset pengetahuan, tetapi tidak dijadikan sebagai referensi dalam berbisnis, tindakan pemerintahan, kekuasaan, atau referensi membangun komunitas dan aset-aset lain. Maka tugas kita hari ini adalah mengonsolidasikan semua aset yang telah dimiliki tadi untuk menuju budaya yang baru, di mana desa dapat berdana, berdata, dan berdaya.

Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Pertama, kita harus memanfaatkan dana desa sebagai aset dana yang bersifat publik. Dana desa adalah modal awal untuk membangun infrastruktur

ekonomi. BUMDes harus dikembangkan sebagai perusahaan yang dimiliki oleh orang-orang desa untuk dielaborasi dengan pengetahuan dan teknologi.

Selama ini, sebagian besar BUMDes di Indonesia masih berkecimpung dalam bidang kebutuhan dasar, seperti perdagangan sembako. Paradigma kebutuhan dasar macam inilah yang harus diubah, sebab zaman telah berubah dan kebutuhan dasar bukan lagi perkara pangan, melainkan juga pendidikan serta kesehatan. BUMDes sebagai perusahaan publik harusnya dapat menjelma menjadi *socio-technopreneur* 'kewirausahaan yang berbasis teknologi dan bersifat sosial'.

Untuk itu, penting kiranya bagi pemerintah untuk melakukan langkah strategis dalam menghidupkan BUMDes yang bersifat *socio-technopreneur*. Hal ini bisa dilakukan dengan menggandeng anak-anak muda—yang mendapatkan fasilitas beasiswa dari pemerintah untuk menempuh pendidikan tinggi, baik di dalam atau luar negeri—sebagai pendamping BUMDes yang ada di Indonesia. Anak-anak muda ini dipilih, sebab hari ini mereka sudah sangat menguasai delapan aset universal tadi.

Aset tata ruang, aset pembangunan infrastruktur, aset dana—ada ahli perbankan, ahli keuangan—ada pula aset ilmu politik yang menyangkut pemerintahan. Mereka semua seyogianya dimanfaatkan dan dipekerjakan secara profesional di desa masing-masing, semisal untuk menjabat sebagai CEO BUMDes, akuntan BUMDes, atau bahkan menjadi dokternya BUMDes, kalau ingin mengembangkan ilmu kedokteran di desa.



Langkah strategis di atas perlu dilakukan sebab kondisi bisnis hari ini begitu karut-marut dan bahkan diprediksi hanya ada tiga sektor bisnis yang masih akan bertumbuh kembang: pangan, kesehatan, dan pendidikan. Ketiganya akan menjadi bisnis yang berkembang di era *new normal* selama ditopang oleh teknologi digital. Dengan melakukan hal ini maka kebutuhan dasar di masyarakat akan dapat terpenuhi.

Langkah selanjutnya adalah memberikan bantuan paket data internet untuk pendidikan di desa. Paket internet ini dapat diambil dari usaha BUMDes, di mana masyarakat memiliki ruang yang penuh untuk mengambil keputusan apakah akan diberikan secara gratis atau dijual dengan harga murah yang mampu bersaing dengan *provider* penyedia layanan internet swasta. Hal ini dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan konten-konten pendidikan melalui internet dengan harga yang terjangkau, tetapi di sisi lain BUMDes juga mendapatkan keuntungan.

Kebijakan mengenai internet ini biasanya terhambat oleh faktor geografis sebab belum semua desa di Indonesia terjangkau oleh internet. Secara bisnis, hal tersebut memang sangat nyata sebab orientasi *provider* layanan internet swasta selama ini adalah mendapatkan keuntungan, sehingga internet hanya menysar daerah-daerah yang telah dihuni oleh banyak orang.

Masalah ini dapat diatasi dengan melakukan kolaborasi antara pihak BUMDes bersama pihak swasta. Dalam kolaborasi penyediaan layanan internet ini, hal yang harus diperhatikan adalah pembagian keuntungan. Jangan sampai BUMDes--dalam hal ini perusahaan publik—malah dikuasai oleh swasta dan justru menghambat perkembangan desa.

Opsi lain yang dapat dilakukan adalah dengan membuat *provider* internet sendiri sebab secara teknis itu sangat memungkinkan. Para akademisi muda yang mempelajari bidang ini tentu saja dapat dimanfaatkan untuk membuat jaringan internet di desa-desa yang secara geografis masih terpencil dan belum terjangkau internet.

Jika internet sudah tersedia maka tak hanya bidang pendidikan yang akan berkembang, tetapi juga tata kelola pemerintahan desa yang berbasis pada internet. Dalam hal ini, semua BUMDes di Indonesia bisa berkolaborasi dan berbagi data yang dimiliki untuk dimanfaatkan secara maksimal. Data tersebut nantinya hanya akan dapat diakses oleh BUMDes—melalui server-server yang digunakan oleh BUMDes se-Indonesia pula—sehingga data yang dimiliki tidak lari ke luar negeri dan justru menguntungkan perusahaan dari negara lain.

Seandainya setiap desa di Indonesia dibuat BUMDes bersama, di tiap kabupaten diisi dan dimiliki oleh BUMDes-BUMDes yang bekerja sama dengan koperasi—kita juga sedang menggerakkan koperasi satelit desa yang bekerja sama dengan forum BUMDes Indonesia—saya pikir apa yang saya paparkan tentang pemanfaatan *universal basic asset* tadi akan dapat dijalankan dengan baik.

Dalam era masyarakat bebas ini, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan kebebasannya untuk membangun pendapatnya sendiri dalam memanfaatkan aset dana. Hal ini tentunya harus ditopang dengan informasi yang simetris dan data yang kuat. Di atas kedaulatan data dan informasi, masyarakat akan mampu memaksimalkan aset dana yang dimiliki untuk membangun masyarakat yang berdaya.

Esensi satu paragraf di atas, beberapa minggu lalu telah dibicarakan dalam Basic Income Bootcamp yang diadakan oleh



Research Center for Climate Change, Universitas Indonesia. Acara tersebut diadakan sebelum kasus pandemi Covid-19 menjadi persoalan global. Awalnya, ia diadakan untuk mengantisipasi prospek hilangnya banyak lapangan pekerjaan gara-gara digitalisasi dan robotisasi dalam lapangan pekerjaan di era revolusi industri keempat—dan kenyataannya—pandemi Covid-19 mempercepat semua itu.

Maka kembali lagi ke pembahasan awal, kita semua harus bekerja sama dan mengonsolidasikan agar delapan *universal basic asset* yang telah dipaparkan di atas dapat berfungsi secara maksimal, agar terwujud masyarakat yang berdana, berdata, dan berdaya. Kerja sama adalah kuncinya.

Kerja sama antarmanusia ini selalu melahirkan kerumunan. Pada masa lalu kerumunan ini melahirkan tokoh-tokoh. Kerumunan memercayai tokoh itu untuk menyelesaikan masalah kerumunan orang banyak. Entah itu masalah politik, ataupun agama, kebudayaan, ekonomi, dan semacamnya.

Kerumunan yang sekarang kita butuhkan bukan jenis ini. Kerumunan yang harus kita buat adalah kerumunan yang saling memercayai satu sama lain untuk menyelesaikan masalah bersama. Kerumunan manusia berdana dan berdaya. Tentu tanpa menghilangkan kepemimpinan politik yang mampu membangun sistem yang bekerja dengan baik.

Jika kerumunan jenis kedua ini bisa lahir di masa pandemi Covid-19, ia akan jadi latihan masyarakat Indonesia untuk melahirkan kerumunan jenis ketiga. Ini adalah jenis kerumunan manusia berdana dan berdaya yang mampu mengantisipasi masalah-masalah bersama yang belum ada, tetapi pasti akan ada.

Profil Narasumber

Aktivis pro-Reformasi 1998 ini sepertinya punya ikatan spesial dengan desa. Komitmennya pada desa telah ditunjukkan sejak lama. Ia pernah menyatakan, “Siap pulang untuk ikut membangun negeri dan menularkan pengetahuan yang telah saya dapat kepada talenta-talenta lainnya di Indonesia, terutama di desa.” Karena itu, pada 2018 ia menginisiasi gerakan Inovator 4.0 Indonesia.

Gagasannya tentang desa juga dituangkan dalam beragam buku, artikel, dan tulisan untuk berbagai forum. Misalnya pada 2015, Budiman Sudjatmiko bersama Yando Zakaria menerbitkan buku *Desa Kuat Indonesia Hebat*. Lalu saat diundang oleh London School of Economics (LSI), ia juga mempresentasikan “Building Social Cities and Smart Villages”. Dan ketika berkunjung ke Rusia, Budiman mengulas isu desa dengan topik “Village Revolution: Building Food and Energy Resilience Toward Healthy and Smart Indonesia”.

Keterlibatan Budiman di birokrasi juga tak lepas dari konsentrasinya pada desa. Sepanjang tiga periode (2004-2019), ia terpilih sebagai anggota DPR Komisi II, dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah. Komisi tersebut membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria. Dan dengan kewenangan tersebut, ia sebagai Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Desa serta terlibat aktif dalam penyusunan Undang-Undang Desa pada 2009.





Internet untuk Desa⁹

Onno W. Purbo

Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk lebih dari 254,9 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2015). Jumlah ini jauh lebih besar daripada jumlah penduduk negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Sayangnya, laporan dari berbagai sumber menunjukkan tingkat penetrasi internet di Indonesia terhitung buruk dibandingkan negara Asia Tenggara lain. Misal survei yang dilakukan ITU (International Telecommunication Union) pada

9 Disarikan oleh Beryll Ilham.

2014¹⁰, tingkat penetrasi internet Indonesia hanya sebesar 17,14%. Bandingkan dengan Singapura (82%), Malaysia (67,5%), Vietnam (48,3%), Filipina (39,7%), dan Thailand (34,89%) yang jauh lebih tinggi. Penetrasi internet yang buruk ini membuat Indonesia tercatat sebagai salah satu dari dua puluh negara yang menyumbang 4,3 miliar nonpengguna internet di seluruh dunia (World Economic Forum, 2016).

Hampir 85% dari pengguna internet Indonesia menggunakan dan mendapatkan pengalaman pertama akses internet melalui perangkat *mobile*. Sayangnya, jangkauan sinyal yang ada masih terkonsentrasi di perkotaan, terutama di kota-kota di Pulau Jawa. Maka, untuk meningkatkan penetrasi internet ke lebih dari 50% populasi, penetrasi harus diarahkan ke pedesaan. Tantangannya adalah 46,7% penduduk Indonesia berada di 82.190 desa (Pusat Kajian Komunikasi UI, 2014).

Urgensi meningkatkan penetrasi internet ini bukan tanpa sebab. Akses masyarakat ke internet dapat mempersempit kesenjangan digital (*digital divide*) dan merupakan alat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Peningkatan penetrasi internet sendiri akan meningkatkan pertumbuhan *gross domestic product* (GDP) per kapita. Peningkatan 10% penetrasi *broadband* kecepatan tinggi akan memberikan kontribusi terhadap GDP per kapita sebesar 1,38% (Katz, 2012)¹¹. Sementara peningkatan 10% penetrasi internet akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan GDP per-kapita 1,12% (World Bank, 2009).

10 International Telecommunication Union. (2016). *Percentage of Individuals Using the Internet*. International Telecommunication Union.

11 Katz, R. 2012. *Impact of Broadband on the Economy: Research to Date and Policy Issues*. International Telecommunication Union.



Tantangan Penetrasi Internet ke Desa

Ada banyak tantangan yang perlu dihadapi untuk menaikkan penetrasi internet ke desa. Permasalahan pertama adalah minimnya sinyal seluler di desa-desa. Data dari BPS Indonesia pada 2014 menyatakan bahwa dari 82.190 desa, terdapat 18.603 desa dengan sinyal lemah dan 7.717 desa yang bahkan tidak mendapatkan sinyal seluler sama sekali. Dari keseluruhan desa tersebut, terdapat 16.043 desa yang berada di gunung atau kemiringan dan 3.630 berada di lembah yang dikelilingi gunung. Sebagian besar desa-desa ini terdapat di bagian timur Indonesia.

Kesulitan medan ini membuat pembangunan infrastruktur penunjang internet menjadi sangat sulit dan mahal. Sementara itu, orientasi penyedia jasa internet adalah keperluan komersial. Adapun pendapatan bulanan bersih petani di desa-desa kurang lebih sebesar Rp772.800,00. Dengan rerata pengeluaran untuk barang dan jasa hanya sekitar 10%, tak jarang orang-orang di desa hanya mampu mengeluarkan Rp10.000,00 untuk keperluan seluler (Badan Pusat Statistik, 2014). Kondisi ini membuat penyedia jasa internet semakin menyisihkan desa sebagai target pasarnya. Hal ini membuat kesenjangan digital terus melebar antara kota dan desa.

Secara umum, strategi pemerintah untuk menipiskan kesenjangan digital sangat bergantung pada dua alternatif pendanaan, yaitu investasi swasta dan dana *universal service obligation* (USO). Belakangan, pemerintah desa dapat menggunakan dana desa atau swadaya masyarakat untuk menjalankan program pengurangan kesenjangan digitalnya.

USO berasal dari pengumpulan 1,25% pendapatan kotor operator seluler oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur pedesaan dan rural. Namun, dana tersebut masih belum mencukupi untuk menipiskan jurang kesenjangan digital. Oleh karenanya, dibutuhkan pengalokasian dana lain seperti dana desa untuk mencukupi kebutuhan pembangunan infrastruktur ini. Adapun swadaya masyarakat juga bisa dilakukan apabila memungkinkan.

Dengan medan yang sulit dan dana yang minim, konsekuensi untuk permasalahan internet di desa adalah dibutuhkannya sebuah teknologi sederhana, murah, dan dapat diajarkan kepada anak muda di desa.

Kerangka Solusi untuk Pedesaan

Harus diakui bahwa bukanlah sebuah tugas yang mudah untuk mempersempit kesenjangan digital. Beberapa teknologi telah diaplikasikan di lapangan, seperti jaringan jarak jauh nirkabel, RT/RW-net, dan jaringan seluler berbasis masyarakat. Pemerintah juga telah mencoba teknologi yang cukup mirip, seperti dalam program Palapa Ring, Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK), Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK), dan Desa Punya Internet (Desa Pinter).

Palapa Ring atau Tol Langit tidak menolong penetrasi internet ke desa-desa. Proyek infrastruktur jaringan fiber optik tersebut terutama berfungsi hanya untuk menaikkan kualitas dan bukannya penetrasi/kuantitas. Sementara itu, PLIK dan MPLIK menyediakan warung internet bersubsidi yang berbasis kecamatan. Proyek ini gagal karena dari evaluasi operasionalnya menyatakan tidak efektif.



Adapun Desa Pinter menyediakan *hotspot* Wi-Fi lokal, dua komputer dan satu printer untuk digunakan di 4.700 desa. Terdapat banyak masalah pula di proyek yang satu ini. Koneksi internet yang putus-putus, desa berada di *blank-spot* atau permasalahan listrik adalah salah satu di antaranya. Proyek-proyek pembangunan infrastruktur internet untuk desa ini tidak mampu berjalan karena keberlanjutan/*sustainability*-nya kurang diperhatikan.

Pembangunan infrastruktur dan keberlanjutannya adalah dua masalah yang berbeda. Pembangunan belaka tidak menghasilkan sistem yang bisa diandalkan di masa depan. Maka, keberlanjutan infrastruktur menjadi tantangan yang lebih besar. Membuat agar biaya lebih rendah, membangun keahlian, dan memberikan manfaat bagi ekonomi lokal merupakan kunci terjadinya keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun (Hosman, 2010)¹².

Kemampuan masyarakat dalam mengoperasikan jaringan seluler atau internet adalah satu hal yang mesti diperhatikan. Pemberdayaan guru dan siswa SMK di desa adalah satu solusinya. Kebijakan yang mampu mempercepat tersebarnya fasilitas telekomunikasi atau internet adalah dengan pembekalan kompetensi internet untuk anak mudanya. Pendidikan TIK (teknologi informasi dan komunikasi) dalam kurikulum sekolah bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desanya. Hal ini mengingat kesenjangan yang begitu besar antara desa dan kota dari segi teknologi.

Teddy Mantoro et.al. telah menulis sebuah *roadmap* lengkap untuk pengembangan sumber daya manusia dalam lingkup industri

12 Hosman, L. (2010). *Policies, Partnerships, and Pragmatism: Lessons from an ICT-in-Education Project in Rural Uganda*. Information Technologies & International Development, 57-58.

TIK di Indonesia. Langkah strategis tersebut antara lain: kontrol yang ketat atas kualitas pendidikan dengan pengawasan ketat pada kurikulum informatika dan komputer serta pedagogisnya; membangun pusat sertifikasi dan keahlian nasional serta regional; dan memfasilitasi interaksi terus-menerus antara industri TIK, pemerintah, dan lembaga pendidikan untuk membangun pengetahuan serta keahlian di bidang informatika dan komputer (Mantoro, Ayu, Usino, Priantoro, & Rusadi, 2016)¹³.

Sistem *open source* di teknologi tepat guna semacam jaringan internet pun perlu menjadi bahan ajar di sekolah-sekolah. Dari sistem *open source* ini, diharapkan para siswa dan guru bisa terus melakukan *upgrade* teknologi sehingga menjadikan biaya semakin efisien.

Selain kebijakan yang menysasar ke pendidikan, diperlukan dorongan pemerintah untuk mendukung operator masuk ke desa. Ini bisa dilakukan dengan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat. Terdapat pula ribuan *wireless engineer*, kelompok penelitian jaringan, dan OpenBTS di berbagai kampus yang dapat membangun serta memperkuat kemitraan pemerintah dengan rakyat dalam kebijakan pemajuan teknologi komunikasi dan internet desa.

Pengembangan teknologi yang berasal dari masyarakat memberikan beberapa pilihan alat atau metode yang bisa digunakan. Beberapa di antaranya adalah Wi-Fi jarak jauh, warnet, RT/RW-net, telepon di atas internet, *streaming* video dengan server lokal, *mesh network*, dan OpenBTS.

13 Mantoro, T., Ayu, M. A., Usino, W., Priantoro, A. U., & Rusadi, U. 2016. *Pengembangan SDM TIK Indonesia 2016-2020*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informasi.



Pilihan metode ini tentu sangat bergantung dengan kondisi desanya. Misalkan jaringan Wi-Fi jarak jauh bisa digunakan untuk menghubungkan pulau-pulau dengan jarak sampai 350 km. Sistem ini menggunakan pemancar/*relay* dari dua tempat yang berbeda sampai mencapai *internet service provider* (ISP) di kota. Apabila ingin meningkatkan efisiensi dan ketahanan, pemancar bisa menggunakan sistem *mesh* untuk menghubungkan lebih dari satu *relay*. Biaya yang dikeluarkan untuk sistem ini sangat beragam. Transmisi jarak pendek (10-20 km) sekitar Rp800.000,00 sementara untuk jarak jauh (200-350 km) bisa mencapai 17 juta rupiah sepasangannya. Sementara untuk jaringan internet dengan jarak yang lebih dekat (sekitar 3 km) bisa menggunakan sistem RT/RW-net yang tentunya lebih murah.

Apabila kondisi jarak tidak memungkinkan untuk meraih ISP di kota, masyarakat desa bisa membuat operatornya sendiri. Teknologi ini bernama OpenBTS (Open Source Base Tranceiver Station). Meskipun membutuhkan keahlian yang lebih kompleks dalam bidang *software*, teknologi ini merupakan alternatif yang lebih murah dan masih terus berkembang. Indonesia sendiri memiliki satu proyek pengembangan OpenBTS di Wamena yang sudah berhasil beroperasi.

Mengingat medan yang sangat sulit, pembuatan infrastruktur internet bisa digunakan pula untuk mengaplikasikan teknologi listrik ramah lingkungan, seperti *solar cell*, pembangkit listrik tenaga angin, dan lain sebagainya. Aplikasi teknologi listrik ini memiliki potensi untuk menunjang aktivitas ekonomi warga di pedesaan yang masih kesulitan mendapatkan listrik.

Dengan banyaknya pilihan teknologi dan kondisi pedesaan, total biaya yang dikeluarkan sangatlah bervariasi. Tergantung pada konfigurasi yang diinginkan, biaya bisa mulai dari 20 juta rupiah/desa untuk sambungan dan server lokal di desa hingga beberapa puluh juta rupiah untuk pemasangan banyak *relay* di gunung-gunung untuk mencapai ISP di kota. Keseluruhan metode ini jauh lebih murah dibandingkan dengan pemasangan jaringan seluler komersial yang mencapai 1,5-2 miliar per unitnya.

Inovasi teknologi yang dilakukan ini perlu ditunjang dengan manajemen ekonomi yang baik pula. Hal ini dikarenakan kebutuhan dana pemeliharaan yang cukup tinggi dan tidak bisa mengandalkan dana pembangunan melulu. Diperlukan sistem koperasi atau metode lain untuk menunjang dana pemeliharaan. Agar internet dan jaringan internet tidak melulu digunakan untuk aktivitas konsumsi maka internet dapat pula digunakan untuk aktivitas produksi.

Integrasi aktivitas ekonomi pedesaan melalui internet adalah salah satu hal yang dapat mengembangkan perekonomian masyarakat. Penggunaan *e-commerce* yang terus meningkat tiap tahunnya adalah kesempatan peningkatan taraf ekonomi. Keseluruhan proses ini nantinya akan menciptakan sebuah kondisi masyarakat yang melek internet dan mampu menggunakannya dengan bijak.

Kondisi melek internet Indonesia hari ini merupakan satu hal yang mengerikan. Keamanan digital masih belum dimengerti oleh banyak orang. Kita bisa menemui banyak informasi penting yang beredar di internet begitu saja. E-KTP, kartu keluarga, dan informasi penting lainnya bisa kita dapatkan hanya dengan *searching* di situs



pencarian. Bahkan terdapat beberapa aplikasi yang dikhususkan untuk mencari detail informasi seseorang lewat e-KTP-nya. Tindak kriminal bisa dilakukan dengan melimpahnya informasi paling personal ini. Maka, edukasi mengenai literasi digital perlu digalakkan dalam menyambut zaman internet sekarang. Edukasi lebih lanjut tentang keamanan data pribadi atau literasi digital tentunya tidak bisa dilakukan apabila akses internet masyarakat masih rendah.

Keberhasilan dalam mempersempit kesenjangan digital dan memberikan keterampilan internet (*internet skill*) untuk masyarakat Indonesia akan menjadi salah satu kunci strategis untuk kemajuan Indonesia. Ke depan, Indonesia perlu lebih banyak pemikir-pemikir kebijakan telekomunikasi dan internet yang menggali lebih dalam prinsip-prinsip dasar seperti *open access*, *open internet*, *digital literacy*, dan lain sebagainya untuk dapat dituangkan secara baik dalam berbagai kebijakan telekomunikasi dan internet Indonesia. Prinsip-prinsip kebebasan ala internet ini dapat membuka jalan yang lebih lebar untuk inovasi anak bangsa.

Profil Narasumber

Siapa sangka kita bisa punya koneksi internet murah hanya bermodal wajan. Perabot dapur yang biasa untuk masak gorengan itu, di tangan Onno Widodo Purbo berubah menjadi perangkat koneksi internet murah. Teknologi merakyat ini kemudian dikenal dengan sebutan *Wajanbolic*. Inilah salah satu kontribusinya selain RT/RW-net dan OpenBTS. Meski sering mengaku sebagai “orang biasa”,

tetapi perjuangannya untuk akses internet murah bagi masyarakat, jelas luar biasa.

Onno sudah intens dengan teknologi informasi sejak 1980-an. Lulus dari Jurusan Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1987, ia langsung berkecimpung di bidang yang membesarkan namanya hingga kini. Berbagai gagasan dibagikannya secara terbuka melalui beragam media, baik berupa tulisan, audio, maupun video. Itu karena ia mendukung gerakan *copyleft* sebagai perlawanan atas konsep *copyright* atau hak paten.

Berkat kiprahnya, berderet penghargaan ia raih. Pada 1992, namanya masuk dalam buku *American Men and Women of Science* terbitan R.R.Bowker, New York, Amerika Serikat. Selang lima tahun kemudian, ia menerima ASEAN Outstanding Engineering Achievement Award oleh ASEAN Federation of Engineering Organization (AFEO). Dan atas dedikasinya pada pemanfaatan *open source* di Indonesia, tahun 2008 Onno menerima IGOS Summit 2 Award dari Menteri Komunikasi dan Informasi.





Mendobrak *Status Quo* Sistem Informasi Kelurahan¹⁴

Mukhijab

Sistem informasi kelurahan (SIK) tidak masuk dalam perbendaharaan konstitusi secara spesifik, sebagaimana sistem informasi desa (SID). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, tidak disinggung satu kata pun mengenai SIK. Berbeda halnya dengan SID, Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur secara khusus tentang sistem informasi pembangunan desa (SIPD). SIPD (selanjutnya ditulis

14 *Call for Papers.*

SID) dibentuk oleh pemerintah kabupaten/kota, pengelolaannya oleh pemerintah desa, dan berfungsi sebagai basis data desa, data pembangunan desa, kawasan pedesaan, serta informasi pembangunan desa/kawasan.

SIK dan SID dalam pemahaman artikel ini dimaknai sebagai bagian dari produk digitalisasi informasi atau informasi berbasis jejaring internet (*online information*), menggunakan platform media daring (*website*), maupun media sosial personal yang berfungsi mendistribusikan pesan, seperti WhatsApp, Telegram, pesan pendek (*short message service/SMS*), alamat surel, dan bentuk sejenis lainnya. Bentuk SIK dan SID paling populer berbentuk laman atau *website*. Sebagian *website* terintegrasi dengan media sosial, sebagian besar lainnya merupakan medium tunggal informasi utama model SIK dan SID.

SIK dan SID tersebut memiliki peran dan fungsi yang selaras, hanya berbeda dari jangkauan operasionalnya (kewilayahannya) saja. SIK merupakan kerangka sistem pemerintahan kelurahan, sementara SID berperan dalam distribusi informasi di pedesaan. Idealnya, SIK dan SID terintegrasi dalam *rural-urban information system*. Dalam konteks Indonesia, pemisahan SIK dan SID menunjukkan *political will* berdasarkan asumsi tentang disparitas atau kesenjangan jejaring informasi kota dan desa. Kota memiliki infrastruktur dan jaringan kabel serta nirkabel informasi yang memadai, sementara desa minus dukungan tersebut. Karena asumsi tersebut, SID dibingkai dalam kebijakan yang didukung konstitusi yang bersifat *lex specialis* oleh pemerintah pusat, dengan kata lain *diarus-utamakan*. Sementara, SIK diposisikan tidak perlu sentuhan dan intervensi kebijakan khusus,



cukup oleh pemerintah kabupaten. Bahkan, dikelola secara mandiri oleh kelurahan.

Pembedaan intervensi kebijakan SIK dan SID tersebut mendorong SID lebih viral, populer, dan eksis. Dalam sistem politik paternalistik, sarana dan prasarana serta kebijakan yang mendapat perhatian ekstra pemerintah cenderung lebih populer dan eksis, dan bisa jadi lebih maju karena terdapat kepentingan politik kekuasaan yang dikaitkan dengan kinerja pejabat publik dan pemerintahannya.

Tulisan ini diilhami oleh hasil observasi tentang laman atau *website* kelurahan di Kota Yogyakarta. Seluruh kelurahan di kota tersebut yang berjumlah 45 kelurahan telah memiliki *website* masing-masing yang dibingkai dalam terminologi SIK. Terdapat problem tentang fungsi dan peran SIK. Apakah sebagai pelayanan publik atau warga secara daring, ataukah sebagai laman informasi publik? Dua pilihan tersebut mengundang konsekuensi yang berbeda dan sejauh ini terdapat kerancuan. Tulisan singkat ini mencoba untuk memotret sisi fungsi laman kelurahan tersebut di balik viral dan majunya laman SID.

Memahami Problem Informasi Kota-Desa: Tinjauan Literatur

SIK dan SID telah menjadi perhatian oleh pemerintah di berbagai negara sejalan dengan perkembangan digitalisasi informasi di level global. Maka program tersebut menjadi bahan kajian yang menarik. Dalam mengembangkan kerangka berpikir tentang masa depan SIK dan SID, sejumlah kajian perlu menjadi bahan pertimbangan.

1. Kajian Informasi Metropolitan oleh Luis M. A. Bettencourt¹⁵

Masyarakat di kawasan perkotaan menuntut informasi interaktif dan *partisipatif*. Karakter informasi yang dituntut bisa mendorong partisipasi sekaligus pemberdayaan warga. Peran pemerintah regional (provinsi) dan lokal (kabupaten), serta institusi di bawah koordinasi mereka, mengelola dan memfasilitasi infrastruktur informasi dalam memanfaatkan potensi teknologi informasi digital. Mereka harus memberi kesempatan setiap warga untuk mengakses infrastruktur informasi dan mendapat informasi dari otoritas pemerintah atau otoritas pengelola informasi agar warga berperan aktif untuk meningkatkan kepentingan dan ruang lingkup informasi yang mereka perlukan, berpartisipasi dalam memberdayakan struktur demokrasi, mendapat perhatian dalam menguasai kapasitas teknis informasi, dan memahami visi strategis sosial dari informasi yang mereka akses.

Sistem informasi perkotaan menuntut karakter yang mencerminkan integrasi (kebutuhan) sosial ekonomi perkotaan, menghadirkan lompatan solusi dari perubahan yang cepat, baik solusi masalah jangka pendek maupun jangka panjang. Substansi dari informasi perkotaan adalah infrastruktur teknologi dan konten informasi harus mendorong penciptaan ekosistem pemecah masalah yang kontekstual, yang mempromosikan solusi baru dalam kurun waktu singkat maupun panjang.

Beberapa rekomendasi digital informasi yang perlu menjadi perhatian otoritas pengelola sistem informasi

15 Bettencourt, Luis M.A. 2019. The Digital Transformation of Metropolises. *Metropolis Observatory* 11(8): 1–14.



perkotaan antara lain: i) Mengelola data dari dua sisi, yaitu data untuk kepentingan (basis data) internal pemerintah dan data publik untuk mendorong pemerintah responsif dan transparan. Apabila tidak mampu dikelola mandiri, bisa bekerja sama dengan universitas dan lembaga masyarakat sipil (LSM). ii) Mengelola data sebagai basis untuk menetapkan kebijakan kolaboratif yang lebih baik, mendorong dan menata kemajuan warga dalam menghadapi masalah yang kompleks untuk kepentingan kesetaraan warga dan solusi masalah, pemberdayaan warga dalam mengelola lingkungan, bisnis, dan kepentingan lainnya. iii) Mengelola data sebagai barang publik untuk mendorong informasi interaktif, menumbuhkan motivasi, dan mendapatkan pengalaman serta peluang tertentu (seperti pekerjaan), kesetaraan perlakuan gender di kalangan perempuan dan anak-anak.

2. Kajian tentang Sistem Informasi Pedesaan oleh Salemink, dkk.¹⁶

Infrastruktur informasi digital pedesaan (rural) memiliki pengaruh signifikan dalam mendorong percepatan pembangunan pedesaan. Terdapat problem teknik dan biaya pengembangan infrastruktur informasi desa yang tidak ditemukan dalam informasi perkotaan. Di satu sisi, warga desa harus terhubung ke internet kecepatan tinggi. Fasilitas ini tidak selalu tersedia. Andai kata tersedia, warga memerlukan pelatihan pemberdayaan untuk mengakses informasi dengan iming-iming

16 Salemink, Koen, Dirk Strijker, and Gary Bosworth. 2017. Rural Development in the Digital Age: A Systematic Literature Review on Unequal ICT Availability, Adoption, and Use in Rural Areas. *Journal of Rural Studies*. 54 (August): 360–71.

bahwa informasi yang mereka akses mendatangkan keuntungan ekonomi atau meningkatkan kualitas hidup mereka. Di sisi lain, fasilitas akses ke internet tidak gratis, bahkan berbiaya tinggi. Perusahaan telekomunikasi tidak mau menggratiskan akses internet mereka, artinya setiap rumah tangga atau anggota keluarga harus merogoh kocek dari kantong sendiri untuk mendapatkan akses internet atau akses informasi pedesaan.

Kesenjangan teknik tidak terdapat dalam penyelenggaraan jejaring informasi perkotaan. Infrastruktur koneksi internet dengan dukungan fasilitas terbaru dan canggih tersedia di perkotaan. Karena operator bisnis informasi dikelola untuk pasar publik, biaya akses informasi perkotaan bisa lebih murah.

3. Kajian Kesenjangan Teknologi oleh Aulia Hadi¹⁷

Otoritas penyelenggara pemerintah maupun warga perkotaan sangat dimanjakan oleh fasilitas infrastruktur informasi dibanding pemerintah dan warga pedesaan. Indikator teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 2016 menunjukkan jumlah rumah tangga pedesaan pengakses internet hanya separuh dari rumah tangga perkotaan dengan perbandingan 26,3 persen berbanding 48,5 persen. Terdapat kesenjangan kesetaraan sosial akses internet antara warga desa dan kota. Pemerintah mengatasi kesenjangan digital internet dan akses informasi secara bertahap dari tahun ke tahun. Masyarakat pedesaan telah menyesuaikan kekurangan infrastruktur informasi dengan mengadakan perangkat informasi secara

17 Hadi, Aulia. 2018. Bridging Indonesia's Digital Divide: Rural-Urban Linkages?. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 22 (1): 17.



mandiri dan mengandalkan akses internet yang dikelola oleh penyedia swasta. Warga memiliki lebih dari satu perangkat dan kartu nomor telepon untuk akses internet dan mereka cerdas dalam memilih harga koneksi yang lebih rendah dan kualitas sinyalnya baik. Dengan demikian, kesenjangan digital pada warga pedesaan tidak terbatas soal infrastruktur dan akses, tetapi juga keterampilan digital dan literasi.

Analisis Problem Informasi Kota-Desa

Kajian literatur di atas menunjukkan tentang keunggulan infrastruktur informasi dan kesempatan rumah tangga mengakses informasi digital di perkotaan. Fasilitas perangkat informasi perkotaan lebih memadai dan merata dari fasilitas sejenis di pedesaan. Demikian juga dalam hal kesempatan rumah tangga atau warga perkotaan mengakses informasi yang lebih banyak dari warga pedesaan.



Kemajuan infrastruktur informasi berbasis internet dikaitkan dengan ketersediaan *website* pemerintah daerah. Keunggulan infrastruktur informasi di Indonesia didominasi oleh kawasan Jawa. Survei data oleh Budi Hermana (Hermana dan Silfianti, 2011)¹⁸ pada 26 Maret 2010 tentang 181 situs web pemerintah daerah menunjukkan bahwa sebanyak 99 web (54,75%) berada di luar Pulau Jawa, sedang sisanya web pemerintah di Pulau Jawa (46,25%). Dari segi perangkat teknologi dan infrastrukturnya, teknologi informasi

18 Hermana, Budi, and Widya Silfianti. 2011. Evaluating E-Government Implementation by Local Government: Digital Divide in Internet Based Public Services in Indonesia. *International Journal of Business and Social ...* 2 (3): 156–64. [http://ijbssnet.com/journals/Vol_2_No_3_\[Special_Issue_-_January_2011\]/18.pdf](http://ijbssnet.com/journals/Vol_2_No_3_[Special_Issue_-_January_2011]/18.pdf).

di Pulau Jawa lebih maju. Masalahnya, keberadaan web pemerintah daerah belum maksimum pemanfaatannya. Ini bisa dilihat dari segi akses. Sebanyak 150 web pemerintah daerah (82,9%) dapat diakses, sisanya tidak. Web yang eksis dan dapat diakses sebagian besar di kota yang lebih maju dan sebagian besar berada di Pulau Jawa.

Kesenjangan infrastruktur dan kesempatan warga ini idealnya harus menjadi keunggulan dalam pengembangan SIK di perkotaan. Berdasarkan observasi beberapa laman atau *website* kelurahan di perkotaan, keunggulan infrastruktur dan kuantitas warga mengakses internet atau perangkat informasi belum dialokasikan sebagai potensi mengembangkan informasi perkotaan berbasis warga yang mendorong komunikasi interaktif, bervisi pada kesetaraan gender atau lebih umum lagi kesetaraan warga mendapat informasi dan pelayanan dari pemerintah kelurahan.

Tabel 1 Website Kelurahan dan Desa, Serupa tetapi Tak Sama

<i>Website</i> Kelurahan	<i>Website</i> Desa
	



Berdasarkan observasi di *website* kelurahan di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul (seperti tampak dalam tabel di atas), ketiga web ini masih cenderung sebatas memenuhi persyaratan normatif untuk pengadaan perangkat informasi berbasis internet. Dari segi konten, produksi informasi sangat terbatas secara kuantitatif, jenis informasinya sangat homogen tentang kegiatan perangkat kelurahan dan elemen kelurahan, pembaruan informasi (*update*) sangat terbatas, dan estetika laman cenderung minim. Informasi mendasar tentang kependudukan, peta wilayah kelurahan, sistem pelayanan dalam SIK, tidak memadai. Bahkan, laman tertentu tidak mencantumkan hal tersebut.

Dalam hal tertentu, laman SID lebih “bergairah” dari segi estetika halaman, konten, dan pembaruan informasi. Sejumlah informasi mendasar tentang perencanaan pembangunan dan laporan keuangan yang menjadi basis kontrol warga terhadap pemerintah desa terdapat di dalamnya. *Website* desa tertentu sangat variatif informasinya dan atraktif penampilan antara informasi pemerintah dan pengembangan potensi desa seperti sektor pariwisata dan sektor perekonomian lainnya.

Analisis itu dikaitkan dengan studi tentang web pemerintah daerah oleh Budi Hermana (Hermana dan Silfianti, 2011)¹⁹ yang menunjukkan keterkaitan logis. Dari 150 web pemerintah daerah, di dalamnya terdapat informasi tertentu (98,7 persen), berita (97,3 persen), profil organisasi (73,3 persen), peta wilayah (74,7 persen), dan informasi promosi (64,1 persen).

Kelemahan mendasar mayoritas web pemerintah tidak mempunyai elemen *frequently answer and question* (FAQ), yakni

19 Ibid.

sebanyak 94,7 %. Data terakhir itu menunjukkan bahwa pembaruan konten informasi menjadi masalah. Artinya, informasi pada level provinsi dan kota/kabupaten tidak diperbarui dan tidak terdapat kanal untuk diskusi aparatus dan warga secara interaktif, apabila dilihat dari segi FAQ. Maka ini bisa menjadi indikator yang sejenis soal *update* konten web di level pemerintah lebih bawah (kecamatan dan kelurahan) yang kelemahannya juga bisa diperlakukan senada karena pengelolaan FAQ memerlukan operator khusus yang bisa menjembatani otoritas dan warga (audiens), serta aparat pelayan yang memiliki kapasitas dan kualifikasi bisa merespons kebutuhan warga yang mengajukan pertanyaan, saran, komplain, dan lainnya.

Dari analisis itu, tulisan ini ingin menyampaikan perspektif tentang masa depan SIK untuk menjawab pertanyaan, “Bagaimana SIK masa depan yang berbasis warga dan memenuhi kebutuhan warga?”

Informasi Kelurahan Masa Depan: SIK Berbasis Warga

1. Portal Berita atau Portal Pelayanan?

Membaca beberapa laman web kelurahan, penulis menaruh kesan bahwa pengelola e-kelurahan belum memutuskan jenis portalnya atau sudah memutuskan secara alami, apakah kualifikasi portal mereka kategori laman informasi berita atautkah kegiatan di wilayah kelurahan atau portal pelayanan warga. Contohnya, kasus web Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, yang terdiri dari tujuh rubrik yang dilengkapi sekitar 22 subrubrik untuk menjelaskan detail dari rubrik. Dari seluruh rubrik beserta



subrubrik kelengkapan, penulis mengidentifikasi rubrik “Berita” bisa dikategorikan paling dominan (30 item berita kegiatan pengurus kelurahan dan elemen-elemen pendukung pemerintah kelurahan). Terdapat rubrik “Direktori” yang relatif banyak dan lengkap. Data dicantolkan dalam bentuk tautan *website* organisasi pemerintah daerah (OPD) Kota Yogyakarta.

Rubrik “Berita” menjadi indikator penting bahwa pengelola web kelurahan memperhatikan kegiatan rutin atau dinamika gerak mereka dengan asumsi publikasi kegiatan itu mencerminkan dinamika kegiatan kelurahan. Hal demikian bisa dijadikan jawaban bahwa kelurahan tersebut menempatkan *website*-nya pada level laman informasi kegiatan (berita) kelurahan. Mereka mengabaikan elemen lebih penting tentang kanal-kanal pelayanan warga, seperti rubrik “Informasi Publik dan Hubungi Kami” sebagai representasi FAQ. Dengan kondisi ini, bisa ditarik kesimpulan sementara bahwa para pengelola web cenderung menekankan keberadaan web sebagai laman berita, bukan pelayanan warga (publik). Aspek ini bisa saja terkait dengan eksistensi lembaga pelayanan satu atap di Kota Yogyakarta. Di dalam lembaga ini semua layanan dilaksanakan dan di bawah manajemen OPD di Balai Kota. Jadi, otoritas kelurahan perlu menegaskan visi web sebagai apa dan fungsinya bagaimana di luar kategori web pelayanan warga.

Tabel 2 Tampilan Web Kelurahan Patangpuluhan

Konten Web			
Rubrik	Subrubrik	Konten	Keterangan
Profil	-	Kosong	
Profil Kelurahan	Profil Lurah	Foto dan nama lurah	
	Potensi SDM	Statistik jumlah pria-wanita	
	Tempat Penting	Kosong	
	Ruang Terbuka HP	<i>Screenshot</i> portal pemkot	Tak bisa Diakses
	<i>Freehotspot</i>	Idem	Idem
	Pengamanan Warga	Kosong	
	Prasarana Kesehatan	Statistik 2019	Keterangan Minim
	Sarana Kesehatan	Idem	Idem
	Penyakit	Idem	Idem
	Demam Berdarah	Idem	Idem
	Gizi Balita	Idem	Idem
	Gizi Baduta	Idem	Idem
Berita	-	30 item	
Informasi Publik	Layanan	Kosong	
	Standar Operasional	Idem	



	Regulasi	Idem	
	Pengumuman	Idem	
	Publikasi	Destinasi wisata Grojogan Winongo	Tanpa deskripsi, foto lurah
	Download	Destinasi wisata Grojogan Winongo	Idem
		Musrenbang	Foto pejabat kecamatan, Kelurahan
	Pengurus Lembaga Masyarakat	Ketua RT, RW, PKK, Foto aksesori, bukan personel asli	
Agenda		Kosong	
Hubungi Kami		Telepon kelurahan	
Direktori		Data OPD	Bisa diakses

2. Manualisasi versus Digitalisasi Pelayanan

Warga Kota Yogyakarta yang memerlukan pelayanan pembuatan atau perpanjangan identitas kependudukan, seperti kartu keluarga dan kartu tanda penduduk (KTP), harus mengikuti proses manual. Warga yang berkepentingan mengikuti proses administrasi manual dari tingkat RT, RW, kelurahan, dan terakhir balai kota. Demikian halnya mengurus perizinan usaha dan lainnya, prosedur sejenis harus ditempuh. Alih-alih warga bisa mengakses web untuk mendapat pelayanan, seperti era sebelum digitalisasi informasi dan pelayanan

publik, akses pelayanan publik di tengah era digitalisasi pelayanan (e-pelayanan) tetap manual. Maknanya, paradigma pelayanan publik manual tetap dominan dan menjadi pilihan utama dari pemerintah kelurahan sampai level pemangku kebijakan di atasnya. Pilihan strategi pelayanan konvensional tersebut mengabaikan potensi pelayanan digital. Terjadi kesenjangan antara strategi digitalisasi informasi dan digitalisasi pelayanan publik. Konteks demikian mengindikasikan perlunya menyelaraskan antara cita-cita ideal digitalisasi informasi dan digitalisasi pelayanan. Apabila pilihannya digitalisasi informasi—sementara digitalisasi pelayanan publik ditinggalkan—maka e-kelurahan sebatas angan-angan dan selamanya pelayanan warga tetap manual.

3. *Website* Berbasis Warga

Terlepas dari bentuk pilihan web kelurahan—model konten informasi berita atau model pelayanan atau gabungan keduanya—pemerintah level kelurahan dan di atasnya idealnya membangun web berorientasi untuk pelayanan warga (publik). Pengamatan terhadap web kelurahan cenderung membangun web yang berorientasi ke dalam atau dari kelurahan untuk kelurahan, bukan sebaliknya, dari kelurahan untuk publik.

Hasil observasi berikut bisa dijadikan pertimbangan dalam memahami e-kelurahan. Kasus e-kelurahan Kelurahan Silaing Bawah, Kota Padang Panjang, web pelayanan publiknya eksis, tetapi warga kurang antusias mengakses. Hal ini terjadi karena



masih terbatasnya pemahaman mengenai apa itu e-kelurahan dan perannya. Tidak ada perbedaan efisiensi waktu dan biaya pelayanan manual dan digital sehingga warga memilih mengurus pelayanan manual. Sebaliknya penyelenggaraan pelayanan berbasis web atau e-kelurahan di sejumlah kelurahan di Kota Bandung, seperti Kelurahan Manjahlega sukses karena pengelola bisa mengatasi kesenjangan antara hasil yang diharapkan dengan yang dicapai, seperti adaptasi warga dengan pelayanan digital dan pencapaian tujuan organisasi semakin besar efektivitasnya meskipun terdapat kelemahan pada SDM operator. Dalam web kelurahan di Kota Bandung tersebut terdapat kanal yang membuka pelayanan digitalisasi, yang berarti paradigma digitalisasi pelayanan warga masuk dalam kebijakan mereka. Ini indikator penting untuk memahami web kelurahan sebagai kanalisasi pelayanan publik, bukan medium mejeng dan memajang foto aparatus kelurahan dan elemen-elemen mitra kerja kelurahan (Ramdani, 2018²⁰; Tami dan Putri, 2019²¹).

Dua kasus tersebut memberi pelajaran tentang orientasi web yang sesuai kebutuhan warga. Digitalisasi informasi dan pelayanan digital sukses apabila kehadiran teknologi digital tersebut sesuai dengan kebutuhan warga dan didukung oleh kesadaran warga tentang perubahan pelayanan dari manual ke digital serta adanya tolok ukur efisiensi pelayanan terhadap warga. Pengembangan kanal kelurahan yang sukses

20 Ramdani, Endah Mustika. 2018. Analisis Efektivitas Pelaksanaan E-Government di Tingkat Kelurahan. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*. 6 (1): 31.

21 Tami, F, and N Putri. 2019. Efektivitas Penerapan Program E-Kelurahan Silaiang Bawah, Kota Padang Panjang. *Administrasi Publik*. 14 (1): 56–68. <https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/34004/22376>.

harus berorientasi ke warga. Apabila sebaliknya yang terjadi maka itu sama halnya kelurahan (khususnya kelurahan yang menjadi fokus kajian di Kota Yogyakarta) mengabaikan potensi keunggulan sumber daya warga dan akses yang didukung teknologi memadai milik warga.

Mendobrak *Status Quo* Web Kelurahan: Penutup

Substansi laman kelurahan umumnya mengarah pada medium informasi kegiatan aparatus kelurahan dan mitra kerjanya. Studi Bettencourt (Bettencourt, 2019) mendorong laman pemerintah di perkotaan untuk—idealnya—bukan sebatas informasi kegiatan aparatus kelurahan. Web idealnya menjadi kepanjangan tangan pelayanan warga, forum transparansi, demokratisasi, dan medium penyelesaian masalah secara instan dan cepat dalam mengatasi dinamika dan problem sosial yang mendera di tengah masyarakat. Substansi dari informasi perkotaan bahwa infrastruktur teknologi dan konten informasi harus mendorong penciptaan ekosistem pemecah masalah yang kontekstual, yang mempromosikan solusi baru dalam kurun waktu singkat maupun panjang. Jadi, web SIK harus memenuhi kriteria sebagai basis data warga untuk kepentingan internal pemerintah dan data publik untuk mendorong pemerintah yang responsif dan transparan.

Digitalisasi pelayanan warga tersebut memerlukan sejumlah syarat, antara lain: 1) *Political will* dari pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) tentang urgensi digitalisasi pelayanan di kelurahan kawasan urban. Pendekatan keamanan terhadap warga yang menjadi prinsip dan alasan pelayanan manual oleh pemerintah level bawah



penting dalam memberdayakan partisipasi warga di kampung-kampung, tetapi pelayanan digital sebagai kebutuhan pada masa depan, apalagi di tengah tragedi pandemik Covid-19, membawa ke arah tata kelola pemerintahan yang mengutamakan prinsip protokol kesehatan, di antaranya interaksi langsung antara aparat dan warga harus dibatasi untuk mengantisipasi penularan dan penyebaran virus. Dalam sistem interaksi yang menuntut jarak antarwarga dan aparat (*social distancing*) maka pelayanan digital pada tingkat kelurahan dan level atasnya menjadi kebutuhan mendesak. 2) Revolusi pelayanan memerlukan revolusi budaya birokrasi *rigid* (rumit) dan bertele-tele serta revolusi mental aparat sebagai raja yang harus disembah, dihormati, dan ditakuti oleh warga yang memerlukan pelayanan kelurahan. Mental aparat di era digital harus mengutamakan efisiensi dan efektivitas pelayanan warga. Apabila “mental aparat digital” tidak berkembang maka kelurahan dan instansi di atasnya menjadi sarang birokratisasi yang seharusnya sudah lenyap pada era pelayanan dan informasi digital. Apabila birokratisasi dan pelayanan manual di kelurahan dan instansi di atasnya dipertahankan maka desa bisa lebih manusiawi dalam menjawab tantangan pelayanan digital dalam era digitalisasi pelayanan warganya karena web mereka berfungsi ganda, sebagai informasi aparat dan warga, serta medium pelayanan aparat ke warga yang bersifat interaktif.

Profil Penulis

Penulis merupakan Mahasiswa Doktoral Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, jurnalis (1992-2020), dan pernah mengajar sebagai dosen tamu di sejumlah perguruan tinggi (Ilmu Komunikasi UII, program *double degree* Prodi Peradaban Islam Unisula, tim *teaching* dengan Dr. Moh. Nurul Yamin untuk Ilmu Komunikasi FAI UMY, Prodi Manarita MMTTC Yogyakarta). Selain itu, ia juga merupakan mentor pelatihan jurnalistik. Publikasi jurnal internasional dan lokal, antara lain “The Political Games of Media Investor and the Effects of Democracy Health”, “Pekerja Pers Menjelang Senja Kala Media Cetak”, “Problem Politik Media terhadap Korupsi”, serta “Foto Media dan Hegemoni dalam Pilkada Bantul”. Ia juga adalah narasumber *in house training* jurnalistik Smile Group Yogyakarta.





Epilog

Kongres Kebudayaan Desa

Membaca Desa, Mengeja Ulang I-N-D-O-N-E-S-I-A:

Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa

Ryan Sugiarto

(Ketua Penyelenggara Kongres Kebudayaan Desa,

Ketua Yayasan Sanggar Inovasi Desa)

Pengantar: Cerita dari Ruang Kendali dan Operasi

Tepat dua hari sebelum Idulfitri (24 Mei 2020), ruang Pusdalop (Pusat Data dan Operasi) Balai Desa Panggunharjo masih tampak riuh. Sejumlah anak muda mengoperasikan komputer, mengelola sistem informasi, dan menulis modul mitigasi Covid-19.

Ruangan ini merupakan tempat konsolidasi dan mitigasi Covid-19 Desa Panggungharjo. Dari ruangan ini pula beberapa langkah mitigasi klinis dan nonklinis (sosial, ekonomi, keamanan) Desa Panggungharjo disusun untuk memandu seluruh *stakeholder* desa bersama-sama melawan Covid-19.

Desa Panggungharjo melalui Panggung Tanggap Covid-19 (PTC-19) mengajarkan bagaimana desa tidak harus melakukan *lockdown* total, tetapi justru menjadi pemecah masalah Covid-19. Desa Panggungharjo dalam situasi darurat telah melakukan serangkaian pencegahan dengan aksi tanggap melalui identifikasi kondisi klinis harian warganya, baik secara fisik maupun psikologis. Desa Panggungharjo berinisiatif menghadirkan pelayanan dari negara untuk penanganan Covid-19 dengan mengedepankan penggunaan teknologi melalui dua platform utama yakni Platform Laport dan Platform Dukung.

Selain mitigasi klinis, ekonomi, dan sosial, desa juga mentransformasikan dirinya sebagai representasi negara yang paling depan untuk mengorganisir segala sumber daya. Pemerintah desa aktif menggerakkan kemampuan kerelawanan warga mulai dari logistik hingga bantuan nonfisik. Warga juga didorong menjadi warga negara aktif untuk saling membantu sesama dengan prinsip *tanggung renteng*. Semua dilakukan berbasis data desa.

Dari sisi mitigasi ekonomi, *pasar.desa.id* menjadi platform penting pengelolaan ekonomi di tengah pandemi dan sesudahnya. Pasar desa menjadi *market place*—toko barang-barang warga desa—agar ekonomi terus berputar di desa, alih-alih lari ke luar desa. *Tagline* berbagi belanja menjadi napas lini ini.



Bagaimana dari sisi tata pemerintahan dan pengaturan hidup bersama warga? Kongres Kebudayaan Desa disusun sebagai panduan merevisi rencana pembangunan jangka menengah desa. Tepat dua hari sebelum lebaran, gagasan ini dilahirkan sebagai respons terhadap pandemi dan bagaimana hidup serta kehidupan warga desa kemudian dirumuskan. Selama 2 minggu awal, konsep dirumuskan, kerangka acuan kerja dituliskan, 18 tema sekaligus *term of reference* disusun, ide digelindingkan. Dan kita tahu gagasan ini menjadi gerakan bersama. Cukup banyak jejaring kemudian turut mengungus gagasan ini, membantu dalam implementasi, pewacanaan gagasan, hingga perumusan-perumusan hasil Kongres Kebudayaan Desa. Pertanyaannya, kenapa Kongres Kebudayaan Desa?

Memahami Situasi di Tengah Pandemi

Bangunan kebudayaan Indonesia bukanlah sesuatu yang terberi (*given*) begitu saja. Kebudayaan Indonesia adalah hasil interaksi historis pelbagai kebudayaan nusantara, mulai dari Melayu, Jawa, Bugis, Papua, Aceh, dan suku bangsa lain yang hidup dalam ruang kultural dan sosial kepulauan nusantara. Interaksi historis kebudayaan Indonesia itu adalah bukti sejarah kebudayaan kita yang dinamis. Interaksi jalin menjalin antarkebudayaan-kebudayaan nusantara menghasilkan rona kebudayaan yang plural sebagai kekayaan negara bangsa kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau di Indonesia yang terhubung melalui media laut, pelayaran, perdagangan, dan pertukaran-pertemuan antarkebudayaan sejak berabad-abad lalu. Jadi, generalisasi bahwa kebudayaan Indonesia adalah umum dan abadi perlu kita kaji ulang.



Perubahan kebudayaan menempatkan manusia menjadi ekosistem hidup yang sangat berkuasa dengan teknologi yang ia miliki: mengeksploitasi alam habis-habisan dengan kecenderungan besar merusaknya, alih-alih hidup berdampingan dengan alam dan memeliharanya. Dengan teknologi, manusia memproduksi barang yang tak diperlukan. Nilai barang pun ditentukan oleh kemasan. Sebagai contoh, air yang seharusnya dimiliki oleh publik berubah kepemilikannya di tangan korporasi yang memproduksi dan mengemasnya dalam botol-botol plastik. Pertambahan nilai inilah yang menyebabkan harga air menjadi jauh lebih mahal ketimbang nilai aslinya.

Rantai produksi-konsumsi manusia pun semakin panjang. Pola ini mengingatkan kita bahwa dunia telah bergeser dari paradigma *kosmosentris* ke paradigma antroposentris. *Kosmosentris* memandang alam sebagai sesuatu yang sakral. Kosmos yang sakral membuat hidup manusia tidak terpisah dari alam. Dengan demikian, pada paradigma ini, manusia tidak melakukan perusakan terhadap lingkungan karena alam merupakan bagian tidak terpisahkan dari dirinya dan berada dalam pola relasi yang sederajat. Dalam paradigma antroposentrisme, manusia menjadi pusat segala sesuatu. Manusia sangat mengandalkan rasionalitas dan subjektivitas yang individualis. Hal ini berdampak pada pola relasi manusia dan alam. Pola relasinya menjadi *subordinatif* dan *dominatif*. Alam tidak lagi dipandang sakral dan tidak menjadi bagian dari dirinya sendiri. Alam dianggap sebagai benda mati yang bisa diatur. Akibatnya, manusia seenaknya melakukan eksploitasi terhadap alam untuk kepentingan diri sendiri. Ujungnya, sistem ekonomi pun menjadi terbalik. Semula orang memproduksi untuk



memenuhi kebutuhan, sementara sekarang sistem ekonomi berfokus menciptakan kebutuhan konsumsi (yang perlu atau tidak perlu) dan produksi pun mengikutinya. Akibat dorongan konsumsi yang selalu diciptakan dan produksi yang terus digenjot maka bumi kita pun menjadi korban. Bumi dieksploitasi habis-habisan. Kapitalisme neoliberal diamini meski bencana ekologis mengintip dan perlahan pasti datang.

Hari-hari ini manusia tengah menuai bencana itu. Sejak Desember 2019, pelan tapi pasti, dunia memasuki *retreat* yang panjang. Aktivitas berhenti, pemerintahan di seluruh dunia menghadapi virus Covid-19 yang belum ditemukan vaksinnnya. Alam menunjukkan taringnya, mengurung manusia untuk tidak serakah. Manusia kemudian menjadi resah: ekonomi, agama, teknologi, birokrasi terkendala luar biasa. Negara-negara yang sebelum Covid-19 memberi jarak pada pengaturan ekonomi dan memberikan tempat seluas-luasnya kepada peran swasta melalui kapitalisme neoliberal kini kembali memainkan kendali penuh meski akhirnya tampak keteteran dan merapuh. Birokrasi yang menjadi kaki tangan negara macet. Semua orang frustrasi dan kecewa dengan gerak negara yang cenderung lamban berhadapan dengan Covid-19²².

Di Indonesia, sejak pertengahan Maret 2020, seluruh pekerja kantor mengubah ritme kerjanya menjadi *work from home* (WFH). Kondisi ini menjadi pukulan telak di berbagai sektor kehidupan. Kelas menengah yang biasanya sibuk beraktivitas di berbagai tempat kini berdiam di rumah. Sektor informal bubar karena

22 Wibowo, A. Setyo. 2020. "Covid 19: Meditasi Heideggerian". Dalam Majalah Basis, Nomor 05-06, Tahun ke 69 2020, hlm. 11.

sepinya aktivitas akibat pembatasan sosial berskala besar. Pekerja warteg, buruh bangunan, pedagang kecil, tukang parkir serabutan, pengemudi ojol dan taksi, sampai mal, kafe, gedung bioskop, hotel dan ruang-ruang diskusi serta seminar mengalami hibernasi. Saat roda ekonomi berhenti, risiko yang dihadapi ke depan semakin menyheramkan. Sebanyak 1,2-2 juta pekerja terkena PHK²³.

Angka kemiskinan yang sejak reformasi bergulir coba dikurangi, dalam sekejap naik berkali-kali lipat. Mereka yang sempat terangkat dari kemiskinan, akibat Covid-19 akhirnya kembali ke jurang kemiskinan. Bantalan dan jaring pengaman sosial diturunkan. Dana 110 triliun direlokasi menjadi bantuan sosial bagi masyarakat. Hingga 8 Mei 2020, 479 daerah telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD. Dari laporan ini, komposisi belanja daerah mengalami perubahan, yaitu adanya penurunan belanja barang/jasa dari 24,87% menjadi 20,86% dan modal dari 18,16% menjadi 12,89%. Di sisi lain, ada kenaikan belanja lainnya, yaitu dari 24,63% menjadi 30,33% yang ditujukan untuk bansos dan belanja tidak terduga. Total belanja yang direlokasi dan *refocusing* sebesar Rp51,09 triliun, yang ditujukan untuk bidang kesehatan (Covid-19) sebesar Rp22,34 triliun, jaring pengaman sosial sebesar Rp18,88 triliun, dan penanganan dampak ekonomi sebesar Rp9,88 triliun²⁴.

Selain dampak ekonomi, Covid-19 juga membawa dampak lain dalam kehidupan sosial masyarakat. Timbul rasa curiga dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang di seputar kita, juga

23 Wibowo, A. Setyo. 2020. Ibid. Lihat pula <http://www/cnbcindonesia.com/news/20200408213040-4-150737/bikin-merinding-12-juta-pekerja-kena-phk-dirumahkan>.

24 <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-perkembangan-ekonomi-dan-refocusing-anggaran-untuk-penanganan-covid-19-di-indonesia/>.



pada orang yang kita belum kenal. Sebagai contoh, saat membeli makanan, baik di rumah makan maupun warung kaki lima, ada kecurigaan yang muncul. Apakah pelayan bersentuhan dengan orang yang terjangkit virus atau tidak, apakah pekerja warung mencuci tangan pada saat mengolah makanan yang dipesan atau tidak, dan seterusnya. Keraguan pun muncul. Prasangka dan diskriminasi terus terjadi, bukan hanya karena apakah seseorang menderita Covid-19, melainkan juga karena identitas yang sudah melekat padanya. Mereka diberikan label, stereotip, didiskriminasi, diperlakukan berbeda, dan/atau mengalami pelecehan status karena terasosiasi dengan sebuah penyakit. Relasi berubah, perilaku pun demikian.

Di sektor pendidikan, sekolah dan kampus lumpuh. Seluruh proses pendidikan dilakukan dari rumah. Covid-19 menyadarkan kita bahwa pendidikan yang selama ini sepenuhnya ditanggungkan pada sekolah telah berubah dan dikembalikan pada intinya, yaitu pendidikan keluarga. Orang tua diajak kembali memperhatikan pendidikan anak. Anggapan bahwa sekolah sebagai penanggung jawab tunggal atas pengajaran kini direvisi total. Kondisi ini membuat seluruh tatanan keluarga berbenah. Mau tidak mau, keluarga diharapkan menjadi tangguh karena ia satu-satunya ruang yang dianggap aman secara fisik maupun secara psikologis dari Covid-19.

Wabah ini telah merenggut ribuan nyawa manusia dan membuat dunia panik, takut, dan cemas. Orang tak lagi mampu menguasai serta mengendalikan diri dengan menciptakan situasi yang kondusif. Orang cenderung responsif terhadap penyebaran wabah ini sampai-sampai melupakan orang di sekitarnya. Bahkan

berita-berita hoaks oleh berbagai media pun akan dibenarkan karena setiap pribadi dihalusinasi oleh keadaan.

Pada bagian lain, tata kelola dan perlakuan kita terhadap alam harus direfleksikan ulang. Proyek modernitas yang menurut Immanuel Kant merupakan proses “pendewasaan manusia” harus dikritik agar proyek ini tidak terus-menerus merusak alam yang artinya merusak dirinya sendiri (manusia). Salah satu pendapat kritis muncul dari filsuf Fritjof Capra yang mengungkapkan keberadaan dan makna kehidupan manusia dalam segala tingkatan, baik pada level biologis sampai ke level ekonomis dan spiritual, tidak bisa dilepaskan dari keberadaan alam semesta dan seluruh isinya. Berdasarkan pandangan Capra, pandemi Corona adalah bentuk pembalasan alam terhadap manusia yang telah mengingkari dirinya sendiri. Dalam terminologi Jawa, kita mengenal *sapa nandur bakal ngunduh* ‘siapa yang menanam akan menuai’.

Covid-19 telah membuat peradaban manusia modern dikoyak-koyak menjadi tak berharga. Kehidupan manusia modern yang dibangun berdasarkan pada kecepatan gerak, *linearitas* berpikir, ketajaman rasio, kemenangan cara pandang individualis, dan perang teknologi kini lumpuh total di hadapan virus yang tak kasat mata. Kita baru sadar bahwa manusia modern adalah manusia-manusia rapuh. Peradaban politik, ekonomi, sosial di bawah bendera modernisme kini berada di titik nadir dan layak untuk kembali dipertanyakan ulang. Mau dibawa ke manakah kehidupan manusia dan bumi ini? Apakah kita sudah berada di arah membangun yang benar? Mungkin inilah waktu yang diberikan kepada manusia



untuk mempertanyakan apa yang telah mereka jalani selama ini. Mungkinkah manusia sedang berada pada ujung kepunahannya?

Pandemi yang Mendekonstruksi dan Upaya Merumuskan Tatanan Baru

Fakta dan data virus Corona membuka sudut pandang bahwa ketidakpastian kognitif berhubungan dengan tingkat ketidakpastian yang terkait dengan kepercayaan dan sikap. Dalam situasi ini, satu sama lain tidak mampu diatasi oleh perusahaan industri kesehatan. Setidaknya sejauh ini positivisme juga fenomenologi belum mampu menjawabnya.

Covid-19 menyadarkan kita bahwa manusia dan sistem pemikirannya sangat rapuh dan rentan. Kapitalisme sebagai buah gagasan manusia telah menghancurkan dirinya sendiri. Konsepsi neoliberalisme luluh lantak oleh Covid-19. Ideologi sistem ekonomi pasar kapitalisme dan sistem demokrasi dunia mengindikasikan kegagalan dalam membangun industri kesehatan untuk menghormati martabat manusia yang dibuktikan dengan langkanya alat-alat kesehatan. Di beberapa negara, industri tradisional mulai dilibatkan untuk menanggulangi kondisi tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas basis ideologi pembangunan ekonomi tidak dapat menjamin martabat manusia dan keadilan sosial. Sementara sosialisme juga tak mampu menawarkan apa pun dalam kondisi semacam ini.

Kesimpulannya, ideologi ekonomi dan paradigma pembangunan kesehatan manusia dengan fakta empiris data wabah virus Corona sama dengan apa yang dikatakan oleh Daniel Bell dalam buku

The End of Ideology (1960). Ia menuturkan bahwa ideologi *grand-humanistik* yang lebih tua, yang berasal dari abad ke-19 dan awal abad ke-20 telah habis, dan ideologi baru yang lebih baik akan segera muncul. Daniel Bell berpendapat bahwa ideologi ekonomi, demokrasi, dan sistem politik telah menjadi tidak relevan di antara orang-orang yang “masuk akal”, dan pemerintahan masa depan akan didorong oleh penyesuaian dekonstruksi tatanan baru.

Maka perlu upaya dekonstruksi atas isme-isme dan instrumen pelaksananya. Tatanan baru pun mesti dirumuskan. Meminjam konsep filsafat analitik pascamodern yang dipopulerkan oleh Jacques Derrida (1930-2004), *dekonstruksi* ditujukan kepada upaya pembongkaran terhadap kemapanan pemaknaan simbol dan bahasa (analitik) yang melekat kesadaran manusia. Dekonstruksi istilah gerak sosial dalam konteks bencana wabah justru membatasi gerak persinggungan fisik yang bermuara pada jalinan sosial dan bertentangan dengan pemaknaan yang selama ini melekat kesadaran masyarakat umum sebagaimana aktivitas jabat tangan, berpelukan, atau aktivitas fisik lain. Gerak sosial tersebut kemudian dapat diarahkan kepada aktivitas akal budi yang melibatkan segenap instrumen *ruhiah* meliputi rasa, karsa, dan cipta, untuk memproduksi konsep gerak sosial baru.

Selama ini, Covid-19 sering kali dinilai dari sisi negatif sebagai sebuah ancaman, tetapi satu hal yang luput dari kesadaran kita adalah bahwa wabah ini mendekonstruksi semua tatanan. Berangkat dari kenyataan bahwa pemerintah tidak membangun perencanaan yang baik dan selalu bergerak lambat, tata ruang itu kemudian



diambil alih oleh swasta dan kekuatan modal. Tebersit di pikiran, “Apakah Covid-19 diciptakan bukan bebas nilai? Apakah ada sebuah gelombang baru pasca-Covid-19? Apakah ada sebuah upaya dekonstruksi dan konstruksi lain yang sudah disiapkan?”

Hipotesis

Dalam kondisi ini penting untuk setidaknya membangun gagasan alternatif dan konstruksi baru dalam relasi-relasi sosial kebudayaan. Selama 3-4 bulan bercengkerama dengan Covid-19 telah menyadarkan banyak hal. *Pertama*, kita tidak bisa hidup sendiri. Institusi sekolah dan agama tidak lagi penting dan keluarga menjadi sandaran akhir sekaligus juga awal dari segalanya. Nilai utama relasi sosial berasal dari keluarga hingga melahirkan etik baru dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, budaya, dan seterusnya.

Covid-19 mendekonstruksi semua tatanan tanpa teriakan revolusi. Maka hipotesis yang perlu dibuktikan adalah apakah puncak dari relasi sosial adalah gotong royong? Apakah puncak dari relasi ekonomi adalah kerja sama? Apakah puncak dari relasi politik adalah musyawarah? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang ingin diuji dan dibuktikan dari serangkaian agenda Kongres Kebudayaan Desa. Dan kesemuanya itu tentu saja membutuhkan kesetaraan yang oleh Habermas dinamai sebagai *demokrasi deliberatif*. Rebut kesempatan untuk membangun tatanan yang lebih bermartabat, lebih berkeadilan, dan lebih *berkesetaraan*. Dan hal ini tidak lepas dari nilai-nilai luhur nusantara, sehingga gagasan alternatif ini bercorak khas nusantara. Kita tidak lagi mengadopsi gagasan dari luar yang

berjarak dengan konteks kita. Kita punya gagasan gotong royong, selain sosialisme dan kapitalisme.

Kongres Kebudayaan Desa

Kita telah mencermati, mengalami, dan berjibaku dengan Covid-19 dan kenyataannya hingga hari ini kita belum bisa keluar darinya. Namun, tidak ada kata menyerah di dalamnya. Perjuangan harus berumur panjang. Maka siasat-siasat kebudayaan perlu dirumuskan untuk mengelak dari kehancuran dan kehilangan nyawa yang lebih banyak lagi, mengelak dari kepunahan manusia. Pandemi memberikan sisi positif bahwa manusia dengan segala daya, akal budi, dan kreativitasnya harus mencari ruang “perlawanan” yang lebih baik. Menyerah berarti mengantarkan kematian dan hancurnya kemanusiaan. Maka tidak ada kata lain selain terus berjuang. Dan perjuangan itu harus dimulai dari desa, sebuah entitas negara yang paling dekat denganarganya. Tidak ada jenjang pemerintahan yang lebih dekat dengan warga selain desa.

Karena itulah perlu disusun serangkaian upaya untuk merumuskan tata nilai dan tata kehidupan baru bernegara dan bermasyarakat di era pandemi dan sesudahnya. Sekali lagi, dimulai dari desa. Apa dan bagaimana tatanan baru itu? Kongres Kebudayaan Desa (KKD) yang akan menjawabnya.

Kongres Kebudayaan Desa adalah pertemuan antara para pemangku desa (pemerintah desa, lembaga, komunitas, dan warga desa), para pemikir, akademisi yang memiliki ketertarikan terhadap isu desa ataupun bisa jadi lahir dan tumbuh dalam ekosistem desa, para praktisi, birokrat, pelaku bisnis, dan pekerja media yang



berupaya merumuskan kembali arah tatanan Indonesia baru dari desa.

Kongres ini melibatkan beberapa *stakeholder* yang meliputi ABCGFM: akademisi, birokrasi, *community, government, finance*, dan media. Kesemuanya akan berkontribusi untuk bersama-sama dengan warga desa merumuskan tatanan Indonesia baru dari desa. Kongres ini bergerak pada dua ranah sekaligus. *Pertama*, tataran konseptual dengan menggali pemikiran-pemikiran dari para akademisi, pemikir, peneliti, praktisi, birokrat, pelaku bisnis, dan media yang menghasilkan dokumen-dokumen konseptual hasil olah pikir dan nalar budi. *Kedua*, tatanan praksis dengan menghasilkan dokumen panduan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) yang memberi pola tata kelola pemerintahan dan tata hidup baru warga desa untuk desa-desa di Indonesia.

Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara

Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara adalah bagian dari pelaksanaan Kongres Kebudayaan Desa. Dua bagian ini menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Kongres Kebudayaan Desa sebagai bagian dari upaya serius untuk merumuskan kembali tatanan Indonesia baru dari desa, sedangkan Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara adalah bagian dari perayaan kebudayaan, perayaan gagasan, rekognisi desa-masyarakat adat di Indonesia. Perayaan nusantara. Kongres adalah perayaan kebudayaan itu sendiri.

Maka tepat di sini jalinan dan upaya saling melengkapi antara bentuk kongres dan festival mewujudkan. Istilah *kongres* yang selama ini lekat dengan kesan serius dan penuh khidmat diubah menjadi

sebuah perayaan. Pengertian *kongres* yang biasa dipahami sebagai bentuk pertemuan tertinggi, eksklusif, dan terpusat dari organisasi-organisasi sosial dan politik, kini dikembangkan menjadi semacam perhelatan dari ruang-ruang partisipasi masyarakat.

Maka festival kebudayaan ini didorong untuk merayakan dua hal sekaligus. *Pertama, culture experience*. Pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam sebuah pengalaman kultural. Dengan demikian kebudayaan lokal selalu dapat lestari. *Kedua, culture knowledge* yang merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk. Tujuannya adalah untuk edukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri.

Membaca Desa, Mengeja Ulang I-N-D-O-N-E-S-I-A: Arah Tatahan Indonesia Baru dari Desa

Desa adalah tempat di mana sebagian besar kita berasal. Karenanya kita lebih fasih membaca desa *tinimbang* Indonesia. Faktanya, desa lebih dulu ada dibandingkan Indonesia. Bahkan hingga hari ini kita masih selalu saja terbata-bata membaca Indonesia. Artinya kita perlu mengeja ulang Indonesia. *Reason d'etre* agenda ini adalah desa maka yang harus dieja ulang adalah Indonesia yang sudah sengkarut. Apakah Indo-nesia, Indon-esia, Ind-one-sia, In-do-nesia ataukah akan kita sebutkan dalam satu tarikan napas: Indonesia? Artinya, tanpa (huruf) D-E-S-A, kata Indonesia tak akan sempurna.

Bagaimana cara kita mengeja ulang sangat tergantung dari kemampuan kita membaca desa sebagai ibu bumi. Desa menjadi



sosok ibu yang *nuturing*, *ngopeni*, *ngrumat*, *ngemonah*, *nggulowentah*, *murakabi* semua anggota keluarga.

Lihatlah di masa pandemik seperti ini. Orang-orang desa yang merantau ke kota mengalami kecemasan. Ia yang papa tak diterima di lingkungan kota dan terusir darinya. Kota menjadi tidak ramah. Lihatlah bagaimana orang mencuri-curi cara agar tetap pulang kampung ketika kota tak lagi menyediakan kerja dan orang-orang kelas menengahnya mengurung diri di rumah. Mereka pulang ke desa.

Selayaknya ibu, desa adalah ibu bumi tempat kembalinya para petarung kehidupan yang harus rela meninggalkan desa untuk bekerja di ibu kota dan karena kondisi saat ini harus kembali pulang. Kembalilah ke pangkuan ibu bumi, selayaknya ibu. Desa akan menerima kehadiran kembali, apa pun adanya kita saat ini. Selayaknya ibu, desa adalah ibu bumi, tempat kembali dan berbagi.

Tema ini ingin menguatkan Indonesia dari desa. Dan tampaknya ungkapan “masa depan Indonesia adalah desa” semakin relevan. *Merdesa* berasal dari kata *desa* dalam bahasa Jawa Kuno, artinya ‘tempat hidup yang layak, sejahtera, dan patut’. Dalam pengertian ini juga tersirat makna desa, suatu kawasan yang merdeka dan berdaulat. Dalam rumus *otak-atik gathuk*, ada persamaan antara *paradise* (surga) dengan *paradesa*, *para* (tertinggi), maka kedudukan desa diletakkan dalam *maqam*, derajat, dan martabat di puncak paling atas. Desa merupakan visi, cita-cita tertinggi, pencapaian pembangunan surga di dunia nyata, yakni ‘tempat hidup yang layak, sejahtera, dan patut’. Layak secara ekonomi, layak secara sosial budaya,

layak secara politik. Itulah sejahtera. Sedangkan patut (kepatutan) memiliki dimensi yang holistik: adanya pola hidup yang bersahaja, rukun, penuh kesederhanaan, tak ada individualisme karena sistem kehidupan dilandasi oleh pertimbangan kebersamaan, *komunalitas*, berjemaah, tidak mudah mengumbar keserakahan dan eksploitasi, tak ada yang dominan pada kepentingan diri pribadi karena orang yang mementingkan diri pribadi justru diyakini sedang membangun neraka dan dianggap durhaka, *dur-angkara*. Semua ada takarannya. Gandhi pun pernah berkata: “Bumi ini cukup untuk kesejahteraan seluruh umat manusia, tetapi tidak cukup untuk keserakahan satu manusia.”²⁵

Karenanya, upaya menuju kemandirian desa menjadi bagian penting dari Kongres Kebudayaan Desa. Terwujudnya kedaulatan politik dan pemerintahan desa, kedaulatan perekonomian desa, kedaulatan data desa, adalah syarat desa sebagai “*paradise*”. Tata kelola pemerintahan dan warga desa dalam tatanan baru Indonesia dengan sendirinya harus memastikan tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial warga yang bersih dan antikorupsi, sejahtera lahir dan batin, pendidikan yang merdeka, dan seterusnya.

Penekanan kongres ini selain mengkaji tata kelola pemerintahan dan aspek-aspek kehidupan warga desa juga mengarusutamakan isu-isu antikorupsi. Membangun pemerintahan yang bersih dan politik yang bermartabat sangat mungkin didorong dari ruang negara yang lebih kecil, yaitu desa. Dan desa jauh lebih memungkinkan untuk menerapkan praktik tata kelola dan implementasi negara yang bebas dari korupsi.

25 Raharjo, T. 2013. “Menyambut Buku Indonesia Bagian dari Saya”. <https://www.caknun.com/2013/menyambut-buku-indonesia-bagian-dari-desa-saya/>.



Langkah yang lebih jauh, kongres ini berupaya memberikan tawaran alternatif untuk membangun kembali tatanan yang lebih setara, lebih adil, bermartabat, dan antikorupsi, serta model kehidupan yang lebih harmonis antara manusia dan alam. Tawaran alternatif tentang “*new normal*” akan mengisi ruang-ruang kosong tentang reproduksi pengetahuan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat yang selama ini seolah direduksi hanya pada tataran tata cara teknis kehidupan (cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak). Tawaran ini juga menyediakan seperangkat panduan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa yang bisa diadopsi oleh sebanyak mungkin desa di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah desa-desa adat beserta masyarakat adat di seluruh nusantara.

Kongres Kebudayaan Desa dalam Angka

Dua setengah bulan persiapan dan pelaksanaan Kongres Kebudayaan Desa (Juni-Agustus), memberikan gambaran-gambaran angka partisipasi berbagai *stakeholder* dalam KKD. Pertama, riset kondisi dan imajinasi masyarakat desa tentang arah tatanan Indonesia baru dari desa. Riset ini merespons pandemi dan harapan warga desa. Sebanyak 1.231 responden telah terlibat dan memberikan pandangannya. Rentang responden bergerak dari berbagai provinsi dari Aceh hingga Papua. Pengambilan data yang menggunakan Google Form cukup mampu menjangkau jumlah responden, warga, dan pemangku pemerintahan desa. Dilihat dari komposisi gender, responden cukup seimbang.

Kedua, *call for papers* Kongres Kebudayaan Desa. Menyadari bahwa tidak semua gagasan dan keterwakilan bisa diringkus

dalam 20 seri webinar, KKD membuka seluas-luasnya ruang bagi masyarakat desa, akademisi, peneliti, warga desa, birokrat, aktivis sosial, mahasiswa, dan siapa pun yang memiliki ikatan serta pemikiran tentang desa untuk *urun rembuk* tentang tatanan Indonesia baru. Sebanyak 57 naskah masuk melalui *call for papers* KKD. Jumlah tersebut tentu saja diseleksi secara ketat untuk bisa masuk dalam buku yang diterbitkan sebagai bagian dari *output* KKD. Hasilnya, sebanyak 31 naskah lolos kurasi dan berhak masuk dalam buku yang diterbitkan.

Ketiga, seri webinar KKD yang dilaksanakan dalam rentang 10 hari berturut-turut (1-10 Juli 2020), 100 jam webinar dengan 20 tema dan 20 *term of reference*, melibatkan 20 moderator di berbagai tempat di Indonesia serta 100 narasumber dari berbagai perspektif keilmuan dan keahlian.

Dua puluh tema webinar tersebut adalah: Seri 1. Arah Tatanan Baru Indonesia: “New Normal” Apa dan Bagaimana Hidup di Era Pandemi dan Sesudahnya; Seri 2. Ekonomi Berkeadilan: Perekonomian Desa dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 3. Pendidikan yang Membebaskan: Membalik Paradigma Pendidikan Urban; Seri 4. Kesehatan Semesta: Menghadirkan Kembali Kesehatan yang Setara untuk Semua dari Desa; Seri 5. Keamanan dan Ketertiban: Menghadirkan Rasa Aman dan Pelindungan dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Perempuan untuk Masa Depan Desa dan Arah Tatanan Indonesia Baru yang Inklusif; Seri 7. Kedaulatan Pangan dan Lingkungan Hidup: Merdeka Sandang, Pangan, dan Papan dari Desa untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 8. Pemuda Desa:

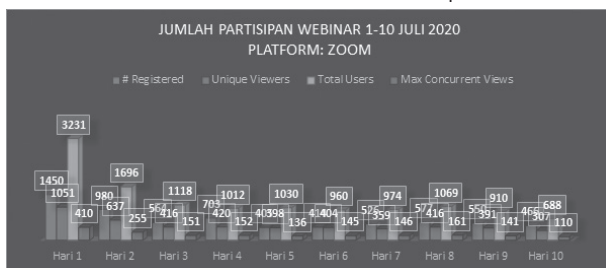


Merekonstruksi Ulang Formasi Strategis Pemuda Desa di dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 9. Agama: Dari Ritus ke Substansi (Transformasi Peran Agama dalam Mengawal Tatanan Nilai Indonesia Baru); Seri 10. Kebudayaan: Mengonstruksi Ulang Alam Pikiran Nusantara sebagai Basis Peradaban dan Tata Nilai Indonesia Baru; Seri 11. Tata Ruang Desa dan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman: Menegosiasikan Ulang Peta Ruang dan Lingkungan Pemukiman Desa; Seri 12. Reformasi Birokrasi: Merumuskan Tata Birokrasi Desa yang *Compatible* untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 13. Hukum dan Politik Desa: Membangun Habitus Politik dan Regulasi yang Memuliakan Martabat Manusia dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 14. Prinsip Antikorupsi, Akuntabilitas, dan Transparansi: Membangun Sistem dan Habitus Antikorupsi dari Desa untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 15. Datakrasi: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa Berbasis Data Menuju Tatanan Indonesia Baru; Seri 16. Keluarga: Reformulasi Peran Strategis Keluarga dalam Pemuliaan Martabat Manusia untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 17. Kewarganegaraan: Merumuskan Pola Relasi Baru Warga Desa dan Negara untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 18. Komunikasi, Media, dan *Influencer*: Merumuskan Kebijakan Komunikasi Publik dalam Tata Pemerintahan Desa Menuju Indonesia Baru; Seri Khusus Inklusi Sosial: Mewujudkan Masyarakat Inklusif dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri Khusus Revitalisasi Desa: Merajut Desa Membangun sebagai Bagian Gerakan Global.

Dari sisi partisipan seri webinar KKD menunjukkan angka partisipasi yang cukup besar. Dilihat dari data yang ditarik langsung dari aplikasi Zoom dan merupakan gambaran partisipan webinar

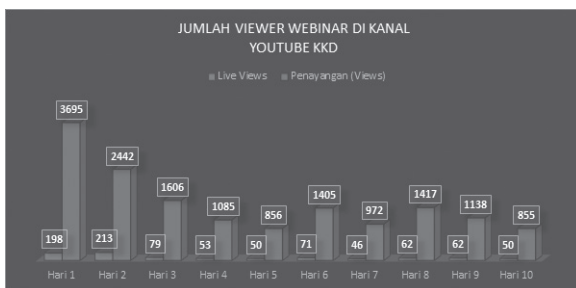
dalam satu hari, tabel berikut menggambarkan jumlah partisipasi webinar melalui kanal Zoom.

Tabel 1 Jumlah Peserta Webinar Melalui Aplikasi Zoom



Selain melalui kanal Zoom, peserta juga bisa mengikuti keseluruhan seri webinar melalui kanal YouTube Kongres Kebudayaan Desa, baik secara *live* atau tayang ulang. Sampai tanggal 18 Juli 2020, berikut data penayangan video webinar Kongres Kebudayaan Desa:

Tabel 2 Jumlah Peserta Webinar KKD Melalui YouTube



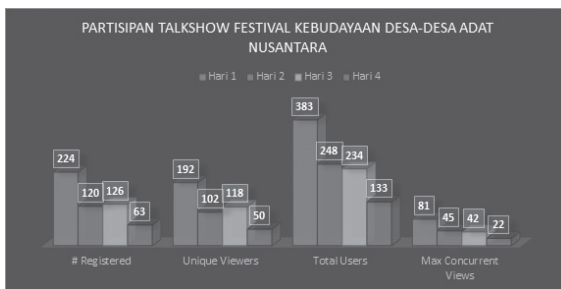
Selain ditayangkan melalui kanal resmi Kongres Kebudayaan Desa, serial webinar juga ditayangkan melalui kanal YouTube suara.



com, *live* Facebook kata desa, bumdes.tv, Gatra.tv, kanal YouTube wiradesa dengan perkiraan *audience* lebih dari 10 ribu.

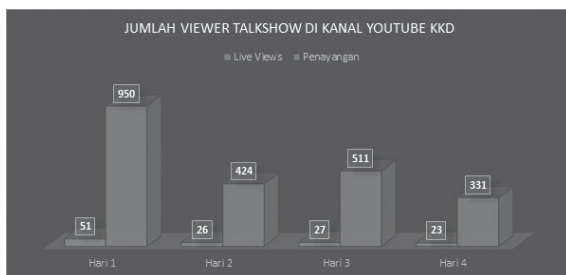
Keempat, Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara. Festival ini membicarakan secara khusus gagasan dan pemikiran tentang arah tatanan Indonesia baru dari perspektif desa-masyarakat adat di Indonesia. Ada 13 desa-masyarakat adat yang ambil bagian dalam seri *talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara, yaitu: Desa Adat Boti, NTT; Desa Adat Papua; Desa Adat Sigi, Sulawesi Tengah; Desa Adat Baduy, Banten; Desa Adat Aceh; Desa Adat Minang; Desa Adat Melayu; Desa Adat Batak; Desa Adat Tidore; Desa Adat Dayak; Desa Adat Bajo; dan Desa Adat Sasak. Desa adat menyampaikan gagasan, pemikiran, serta praktik-praktik hidup dan penghidupan dalam konteks sehari-hari, misalnya tentang bagaimana membangun desanya masing-masing untuk memberi perspektif yang lebih besar bagi tatanan Indonesia baru. Ada 34 narasumber yang berasal dari 13 desa-masyarakat adat di Indonesia dan 8 moderator serta 8 video yang diproduksi untuk tiap-tiap *talkshow*.

Tabel 3 Peserta *Talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara (13-16 Juli 2020) via Zoom



Sama halnya dengan serial webinar Kongres Kebudayaan Desa, *talkshow* Festival Kebudayaan Desa juga ditayangkan langsung melalui kanal YouTube resmi Kongres Kebudayaan Desa selama *talkshow* berlangsung. Selain itu, video *talkshow* juga diunggah ke kanal YouTube tersebut untuk memfasilitasi peserta yang tidak dapat mengikuti *talkshow* secara langsung. Berikut gambaran dari penayangan video *talkshow* Festival Kebudayaan Desa di kanal YouTube Kongres Kebudayaan Desa sampai tanggal 18 Juli 2020.

Tabel 4 Peserta *Talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara (13-16 Juli 2020) via YouTube



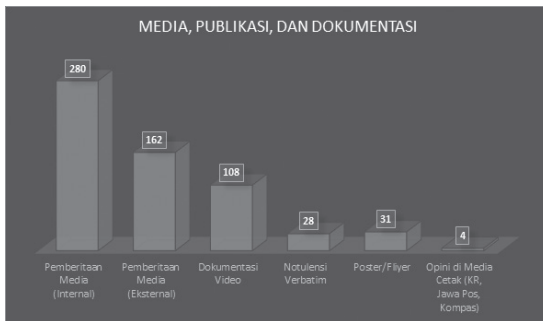
Kelima, penerbitan buku. Rangkaian KKD ini menghasilkan 21 buku, terdiri dari 19 buku dari seri webinar, 1 buku bunga rampai strategi pemajuan kebudayaan nusantara, dan 1 buku putih (berisi hasil riset KKD dan panduan penyusunan RPJMDesa). Desain buku ini menggambarkan keseluruhan hasil-hasil Kongres Kebudayaan Desa. Sampul tiap-tiap buku adalah bagian dari peta Indonesia mulai Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, yang menggambarkan kekayaan endemik satwa dan tetumbuhannya. Salah satunya seperti yang tengah Anda baca sekarang ini.



Keenam, buku putih Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa: Panduan Penyusunan RPJMDesa. Buku ini secara khusus merangkai hasil-hasil Kongres Kebudayaan Desa dan rekomendasi-rekomendasi yang selama pelaksanaan kongres terekam dengan baik. Selain itu buku ini juga merumuskan gagasan dan rekomendasi yang dihasilkan dari pembacaan atas diskusi/tanya jawab selama webinar, *call for papers*, maupun hasil riset.

Ketujuh, publikasi dan media. Ada 280 berita yang diproduksi oleh tim media KKD di laman www.kongreskebudayaandesas.id; 162 berita yang tayang di media nasional, baik *online* maupun cetak; 108 video dokumentasi yang diproduksi dan terunggah di kanal YouTube Kongres Kebudayaan Desa; 35 poster untuk tiap-tiap agenda kongres; dan ada 4 opini yang dimuat di koran *Kedaulatan Rakyat*, *Jawa Pos*, dan *Kompas*. Keseluruhan agenda webinar kongres dan *talkshow* festival juga didokumentasikan dalam *notulensi* verbatim sejumlah dua puluh delapan. Dan sebanyak 35 poster publikasi mengantarai semua agenda kongres.

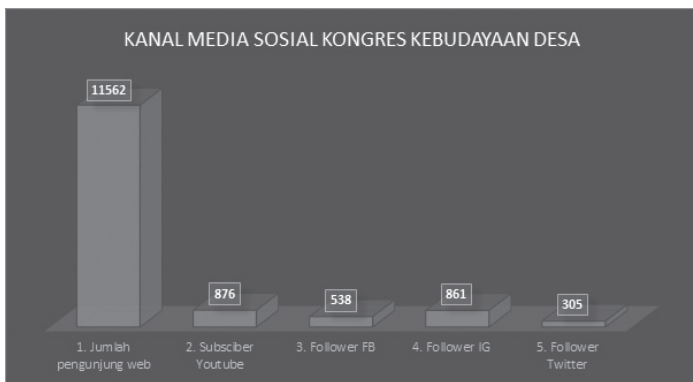
Tabel 5 Jumlah Pemberitaan, Publikasi, dan Dokumentasi KKD



Seluruh aktivitas pemberitaan dimulai dari 22 Juni hingga 27 Juli (ketika naskah ini dituliskan), artinya rerata dalam 1 hari ada sedikitnya 12 berita, baik yang diproduksi oleh tim internal KKD maupun media-media nasional, baik cetak maupun *online*.

Hampir keseluruhan rangkaian Kongres Kebudayaan Desa menggunakan platform *online*. Karena itu kanal-kanal informasi juga berbasis *online*. KKD menggunakan *landing page* utama web, diseminasi juga didesain menggunakan media sosial. Berikut jumlah jangkauan dari web utama dan media sosial yang digunakan selama pelaksanaan kongres. Catatan ini diambil tepat ketika epilog ini ditulis.

Tabel 6 Gambaran Jangkauan Melalui Kanal Media Sosial KKD



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung www.kongreskebudayaan.desa.id sejumlah 11.562 kunjungan, jumlah *subscriber* kanal YouTube 876, *follower* FB 538, *follower* IG 861, dan *follower* Twitter sebanyak 305. Angka itu dibukukan sejak 20 Juni 2020.

Kedelapan, dua kali “syukuran”. Di sela-sela pelaksanaan rangkaian kongres, penyelenggara menggelar dua *event offline*, yaitu Andrawina Budaya dan Suluk Kebudayaan. Andrawina Budaya dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beserta sekjen; Kiai Jadul Maula; serta berbagai jaringan pendukung kongres. Kedua, Suluk Kebudayaan yang digelar untuk memungksi agenda Festival Desa-Desa Nusantara dan menghadirkan budayawan Wani Dharmawan, Irfan Afifi, Nanang Garuda, dan lain-lain. Seluruh pelaksanaan agenda *offline* ini tetap menjalankan protokol kesehatan.

Kesembilan, jaringan kerja dan kepanitiaan. Kerja-kerja Kongres Kebudayaan Desa ini melibatkan 90 orang panitia penyelenggara yang terbagi dalam bagian-bagian kerja, mulai dari *steering committee*, tim LO, tim IT, tim festival, tim riset, tim *call for papers*, tim media, tim dokumentasi, tim buku, tim acara, tim perumus, tim administrasi dan keuangan, tim desain visual, tim medsos, tim konsumsi, tim *runner*, dan lain-lain. Selain itu pelaksanaan kongres juga didukung oleh 51 jaringan dan lembaga, dengan pendukung utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan GIZ. Secara umum kolaborasi

dari berbagai *stakeholder* ini dirumuskan ABCGFM: akademisi, birokrasi, *community*, *government*, *finance*, dan media.

Kesepuluh, deklarasi arah tatanan Indonesia baru dari desa. Agenda deklarasi dibacakan Presiden Joko Widodo dua hari menjelang peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan melibatkan para kepala desa dan seluruh rakyat Indonesia.

Mengintip Hasil Kongres

Hingga epilog ini ditulis, tim perumus hasil-hasil kongres masih bekerja. Tim mencermati seluruh proses webinar, *notulensi*, makalah narasumber, naskah-naskah *call for papers*, hasil penelitian, hingga melihat ulang tayangan yang tersimpan di YouTube KKD. Semua itu akan menjadi bagian dari buku putih arah tatanan Indonesia baru dari desa yang disusun dalam panduan penyusunan RPJMDesa. Buku ini terdiri dari analisis kebijakan terkait desa, *review* RPJMN, *probematika*, dan isu-isu strategis kemandirian desa; visi Indonesia baru, asas, arah kebijakan, tujuan dan sasaran, serta indikator-indikator arah tatanan Indonesia baru dari desa.

Dari sekian banyak rekomendasi yang dihasilkan dari Kongres Kebudayaan Desa, klaster utama rekomendasi adalah mewujudkan kemandirian desa melalui tiga pilar: *pertama*, kedaulatan politik dan pemerintahan desa; *kedua*, kedaulatan perekonomian desa; *ketiga*, kedaulatan data desa. Tiga pilar kemandirian desa inilah yang akan diintrodusir untuk bersama-sama membangun gerakan kemandirian desa. Jika 75 ribu desa bergerak untuk membangun kemandiriannya maka gelombang ini akan dengan sendirinya mampu memperbaiki kondisi negara. Masa depan Indonesia adalah desa. Detail hasil-hasil



kongres bisa Anda simak di buku *Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa* (Panduan Penyusunan RPJMDesa).

Pada bagian akhir epilog panjang ini, kami hendak *menghaturkan* terima kasih *kagem* Bapak Dr. (H.C). Drs. H Abdul Halim Iskandar, M.Pd., Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beserta jajaran Kemendesa yang telah memberikan dukungan penuh terhadap Kongres Kebudayaan Desa. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sujanarko, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJ KAKI) KPK, untuk dukungan yang luar biasa. Rasa terima kasih kami sampaikan pula kepada Bapak Dr. Hilmar Farid, Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Mbak Meta Yanti mewakili GIZ untuk semua diskusi dan dukungannya. Juga kepada segenap jaringan kerja Kongres Kebudayaan Desa dengan segenap dukungan dan bentuknya. *Matur nuwun*.

Ucapan terima kasih sungguh-sungguh pula kami sampaikan kepada seluruh moderator, narasumber, dan tentu saja sobat Kongres Kebudayaan Desa yang selama pelaksanaan kongres terus terlibat secara aktif, baik sebagai responden riset, *call for papers*, maupun sobat kongres yang mengikuti webinar dan *talkshow* festival.

Rasa bangga disertai ucapan syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Wahyudi Anggoro Hadi, inisiator Kongres Kebudayaan Desa, Lurah Desa Panggungharjo, beserta jajaran pemerintah desa yang terus

ngesubi dan *ngemong* seluruh tim penyelenggara. Dan tentu saja kepada seluruh panitia penyelenggara Kongres Kebudayaan Desa yang telah bekerja keras dan bekerja cerdas untuk bersama-sama menyelenggarakan KKD serta mengemas gagasan arah tatanan Indonesia baru dari desa. Sungguh sebuah kerja yang menyejarah. Untuk itu *matur nuwun*, terima kasih.

Akhirnya, semoga Kongres Kebudayaan Desa yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia ini memberi sumbangan yang besar kepada sebanyak mungkin desa juga kepada Indonesia. Sekali lagi kami sampaikan *sakalangkong, matur nuwun, hatur nuhun, matur suksme, amanai, muliate, tampiaseh, tarimo kasi, kurusumang'epanngawang*, terima kasih. Salam budaya desa. Panjang umur perjuangan!

Senin, 28 Juli 2020

Desa Panggunharjo, Bantul, Yogyakarta





Deklarasi

ARAH TATANAN INDONESIA BARU DARI DESA

Mengingat kekuatan tatanan kehidupan masyarakat desa merupakan hasil pergulatan nenek moyang dalam menggeluti pengalaman kosmologis, *epistemologis*, dan ontologis sehingga filosofi desa adalah filosofi yang mewujud dalam budi pekerti, perilaku, dan tindakan; serta mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 maka kekuatan desa harus dijadikan modal sosial, budaya, ekonomi, dan politik bagi arah tatanan baru masyarakat.

Pandemi membuat manusia harus terus berjuang mencari ruang kehidupan yang lebih baik. Dan perjuangan itu telah dimulai melalui Kongres Kebudayaan Desa yang mengajak desa-desa Indonesia bergerak dan bangkit dengan kesadaran *kebhinekaan* dalam merumuskan tatanan baru bangsa Indonesia. Bahwa desa-desa yang membentuk ke-Indonesia-an harus membangun tatanan yang lebih bermartabat, lebih berkeadilan, dan lebih *berkesetaraan*.

Bahwa tatanan itu lahir dari kekayaan sejarah panjang pengetahuan nusantara dan cara pandang jauh ke depan dengan kesadaran bahwa puncak dari relasi sosial adalah gotong royong, puncak dari relasi politik adalah musyawarah, dan puncak dari relasi ekonomi adalah kerja sama. Bahwa semua itu bersumber dari kekayaan kebudayaan desa dari Aceh hingga Papua.

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Mahakuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur maka desa menyatakan cita-cita tatanan Indonesia baru dari desa adalah terselenggaranya politik pemerintah desa yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang partisipatif, emansipatif, tenggang rasa, berdaya tahan, mandiri, serta memuliakan kelestarian semesta ciptaan melalui pendayagunaan datakrasi yang ditopang oleh cara kerja pengetahuan dan pengamalan lintas ilmu bagi terwujudnya distribusi sumber daya yang setara untuk kesejahteraan warga.

Bahwa perwujudan tatanan Indonesia baru dari desa tersebut ditempuh dengan cara menjadikan desa sebagai arena demokratisasi politik lokal sebagai wujud kedaulatan politik, menjadikan desa sebagai arena demokratisasi ekonomi lokal sebagai wujud kedaulatan



ekonomi dan *pemberkuasaan* desa melalui aktualisasi pengetahuan warga sebagai wujud kedaulatan data.

Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kemandirian dan inovasi desa yang mampu mengelola kewenangan dan hak atas asal-usulnya, yang mampu memberikan *pemberkuasaan* pada warga desa. Kita berdoa memohon rahmat, hidayah, kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, menyongsong Tatanan Indonesia Baru dari Desa.

Salam budaya desa. Panjang Umur Perjuangan.

Desa Panggungharjo

Yogyakarta 15 Agustus 2020



KERABAT KERJA KONGRES KEBUDAYAAN DESA 2020

Dewan Pengarah

1. Wahyudi Anggoro Hadi (Ketua)
2. Rumakso Setyadi
3. FX Rudy Gunawan
4. Andreas Budi Widyanta
5. Eko Pambudi
6. Ilham Yuli Isdiyanto
7. Achmad Musyaddad
8. Ryan Sugiarto

PANITIA KONGRES KEBUDAYAAN DESA

Ketua: Ryan Sugiarto

A. Strategis Business Unit: Sholahuddin Nur'azmy

Administrasi dan Keuangan

1. Ahmad Arief Rohman
(Koordinator)
2. Any Sundari
3. Rindy Widya Rasmono
4. Cintya Raffa Fathiya

Tim Media

1. Edy SR (Koordinator)
2. Ahmad Za'im Yunus
3. Ashilly Achidsti
4. Elyvia Inayah
5. Endah Sulistyorini
6. Gunawan Wibisono
7. Lutfi Retno Wahyudyanti
8. Vitus Kevinda Bramantya Viastra

Tim Humas

1. Muhammad Zidny Kafa
(Koordinator)
2. Aina Ulfah
3. Lina Listia

4. Nava Anggita Ardiana

5. Yesseta Novi Sukma

Tim Dokumentasi

1. Akhmad Nasir (Koordinator)
2. Amirul Mukmin
3. Annisa Suryantari
4. Ari Aji Heru Suyono
5. Khoiril Azmi
6. Shavira L. Phinahayu
7. Syaiful Choirudin
8. Veronika Yasinta
9. Windi Meilita W.

Tim IT

1. Muhammad Hanif Rifai
(Koordinator)
2. Ahmad Mizdad Hudani
3. R. Nurul Fitriana Putri
4. Adam Hanafi Syafrudin
5. Damar Saksomo Jati



B. Program: Aditya Mahendra Putra

Tim Webinar

1. Ambar Sari Dewi (Koordinator)
2. Angga Kurniawan
3. Emira Salma
4. Farhan Al Faried
5. Johan Visky Catur Aga
6. Okky Yayan Putra Armanda
7. Robi Setiyawan
8. Ruliyanto
9. Satrio Yoga Rachmanto
10. Tommy Destryanto
11. Toni Fajar Ristanto
12. Tri Muryani
13. Yusan Aprilianda

Tim Festival

1. Eko Nuryono (Koordinator)
2. Gundhi Aditya
3. Hardiansyah Ay
4. Linggar Ajikencono
5. Mona Kriesdinar
6. Nanang Garuda
7. Nandar Hutadima Idamsik
8. Nurohmad
9. Raliyanto Bw
10. Saptaji Prasetyo
11. Siska Aprisia
12. Very Hardian Kirnanda
13. Warsono

1. Faiz Ahsoul (Koordinator)
2. Ageng Indra Sumarah
3. Agus Teriyana
4. Ahmad Yasin
5. Amanatia Junda Solikhah
6. Asy Syaffa Nada Amatullah
7. Berryl Ilham
8. Chusna Rizqati
9. Citra Maudy Mahanani
10. Rheisnayucyntara
11. Dadang Ari Murtono
12. Diah Rizki Fitriani
13. Dwi Cipta
14. Dyah Permatasari
15. Fawaz
16. Fitriana Hadi
17. Fiqih Rahmawati
18. Gregorius Ragil Wibawanto
19. Irfan Afifi
20. Iswan Heriadjie
21. Ketjilbergerak
22. Kusharditya Albihafifzal
23. Prima Hidayah
24. Rio Anggoro Pangestu
25. Rofi Ali Majid
26. Suhairi Ahmad
27. Yona Primadesi

Tim Buku dan Call Of Papers



ANNEKA TUNGGAL



diimplementasikan oleh:
giz
German Development Cooperation
an international organization



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KESIBUKAN

